



Profil *Statistik* **Gender**

Kota Denpasar
Tahun 2025

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR

PROFIL STATISTIK GENDER KOTA DENPASAR TAHUN 2025

Oleh:
**WIDHIANTHINI
NI LUH MADE INDAH MURDYANI DEWI
NYOMAN AYU SUKMA PRAMESTISARI**

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**





SAMBUTAN

**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Denpasar**



Om Swastyastu,

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widi Wasa karena berkat asung kertha wara nugraha- Nya penyusunan buku Profil Statistik Gender Kota Denpasar tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi persoalan gender dan pemberdayaan perempuan, namun sampai saat ini ketimpangan gender pada berbagai bidang pembangunan masih tampak cukup menonjol, seperti di bidang ekonomi, pendidikan, dan politik. Oleh karena itu, hal penting

yang perlu dilakukan secara serius dan konsisten adalah penerapan strategi pengarusutamaan gender (PUG). Sementara ini masih ada dugaan bahwa, salah satu penyebab sulitnya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender adalah karena belum maksimalnya pengintegrasian gender dalam kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai akibat lemahnya kondisi data gender yang ada sehingga kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang dihasilkan belum sepenuhnya berperspektif gender. Padahal data terpilah berdasarkan jenis kelamin atau yang sering disebut data gender sangat penting artinya dalam setiap penyusunan perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Data ini dapat dikatakan sebagai dasar utama dalam menyusun perencanaan yang responsif gender karena atas dasar inilah kita bisa mengidentifikasi isu-isu gender yang masih terjadi di masyarakat.

Tersusunnya buku Profil Statistik Gender Kota Denpasar Tahun 2025, tidak lepas dan adanya komitmen dari pemerintah Kota Denpasar untuk mempublikasikan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dalam berbagai aspek pembangunan dan secara berkala memperbaharui data tersebut. Tujuan publikasi ini adalah untuk menunjukkan secara lebih nyata tentang kesenjangan dan isu gender yang masih terjadi pada berbagai aspek pembangunan yang pada gilirannya dapat memberikan petunjuk secara lebih

jas kepada para penentu kebijakan dan penyusun program/kegiatan sehingga penanganan isu gender dapat dilakukan secara lebih cermat dan tepat.

Oleh Karena itu, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak Walikota Denpasar serta semua pihak yang telah memfasilitasi sampai terwujudnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kepentingan pembangunan di Kota Denpasar.

Om, Shanti, Shanti, Shanti, Om

Denpasar, Juni 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Denpasar



Dra. I Gusti Agung Sri Wetrawati, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660311 199503 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa Buku Statistik Gender Kota Denpasar Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Tujuan penyusunan data terpilah dalam buku statistik gender adalah untuk menyajikan data statistik yang terpilah berdasarkan jenis kelamin di berbagai aspek pembangunan, seperti aspek pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi, publik dan aspek lainnya yang ada di Kota Denpasar. Pemilahan data menurut jenis kelamin merupakan prasyarat utama dilakukannya analisis gender yang bermanfaat dalam penyusunan analisis kebijakan dan penyusunan anggaran yang responsive gender.

Melalui buku Profil Statistik Gender Kota Denpasar diharapkan para perencana dapat menggunakan data-data ini sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan isu-isu gender terutama yang menjadi salah satu permasalahan di Kota Denpasar. Penyusunan buku ini diprakarsai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar bekerja sama dengan Kajian Gender dan Perlindungan Anak Universitas Udayana.

Penyusunan buku profil ini merupakan kelanjutan dari buku profil tahun sebelumnya. Melalui kesempatan ini tim penyusun memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam buku ini. Tim penyusun menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam melakukan penyusunan buku ini.

Akhirnya kami berharap semoga buku ini bermanfaat bagi pembangunan Kota Denpasar khususnya dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan mengimplementasikan pengarusutamaan gender di berbagai bidang pembangunan.

Tim Penyusun

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam perkembangan dunia yang semakin modern dan maju, perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi tantangan-tantangan yang muncul di era Revolusi Industri 5.0 dan Megatren 2045. Dalam konteks Revolusi Industri 5.0 dan Megatren 2045, peran perempuan menjadi semakin krusial. Revolusi Industri 5.0 menekankan keseimbangan antara teknologi canggih dan nilai-nilai kemanusiaan, termasuk dalam aspek kesetaraan gender. Perempuan memiliki kesempatan lebih luas untuk berkontribusi dalam bidang teknologi, inovasi, dan kewirausahaan berbasis digital, sehingga meningkatkan partisipasi mereka dalam ekonomi global.

Sementara itu, Megatren 2045 yang mencerminkan perubahan besar dalam demografi, urbanisasi, serta perkembangan teknologi dan ekonomi global, juga memberikan tantangan dan peluang bagi perempuan. Dengan meningkatnya otomatisasi dan digitalisasi, perempuan perlu mendapatkan akses lebih besar terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan digital agar dapat bersaing di pasar kerja yang terus berkembang. Selain itu, kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan menjadi kunci untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan

berkelanjutan. Revolusi Industri 5.0 merupakan istilah yang menggambarkan era di mana teknologi digital, internet, kecerdasan buatan, dan berbagai inovasi lainnya menyatu dalam segala aspek kehidupan manusia. Sementara, Megatren 2045 merupakan wacana tentang masa depan Indonesia pada tahun 2045 yang dikembangkan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya. Kedua fenomena ini menandai perubahan besar dalam dunia teknologi dan ekonomi global yang akan berdampak langsung terhadap cara hidup, bekerja, dan berinteraksi manusia.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Bali bervariasi antar kabupaten/kota. TPAK Kota Denpasar tahun 2023 mencapai 64,84%, lebih rendah dari TPAK laki-laki 81,31%. TPAK laki-laki biasanya lebih tinggi daripada perempuan karena peran ganda yang sering dialami perempuan dalam bekerja dan mengurus rumah tangga, serta faktor-faktor seperti kesenjangan upah dan kesempatan kerja, diskriminasi, dan pilihan karir yang sering berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Di bidang pendidikan, pada tahun 2024 rata-rata APM (Angka Partisipasi Murni) di Kota Denpasar mencapai angka 97,45 persen, dengan rata-rata target sebesar 89 persen dan realisasi menyentuh angka 86,75 persen. Rata-rata APK (Angka Partisipasi Kasar) di Kota Denpasar mencapai angka 100,50 persen dengan target rata-rata yakni 98,75 persen dan realisasi

yakni 99,14 persen. Data mengenai anak putus sekolah secara kuantitatif menunjukkan angka relatif kecil.

Di bidang kesehatan, kelahiran bayi laki-laki dan perempuan pada tahun 2023 berjumlah 18.180 jiwa mengalami penurunan di tahun berikutnya menjadi 11.419 jiwa atau terjadi penurunan jumlah kelahiran sebesar 37,2 persen. Penurunan kelahiran pada tahun 2024 terbanyak terjadi pada bayi perempuan yang menurun sebesar 38,68 persen dan kelahiran bayi berjenis kelamin laki-laki juga menurun sebesar 35,72 persen. Terjadi penurunan jumlah balita di Kota Denpasar pada tahun 2024 sebesar 34,73 persen. Sejalan dengan angka kelahiran bayi, jumlah balita dengan jenis kelamin laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan. Pada tahun 2023 jumlah balita laki-laki 38.563 balita dan perempuan 37.113 balita. Sedangkan pada tahun 2024 jumlah balita laki-laki 25.605 balita dan perempuan 23.789 balita. Secara keseluruhan kasus ASI Eksklusif di Kota Denpasar mengalami peningkatan dari 1.353 kasus menjadi 1.637 kasus di tahun 2024 atau meningkat sebesar 20,9 persen. Secara keseluruhan kasus ASI Eksklusif di Kota Denpasar mengalami peningkatan dari 1.353 kasus menjadi 1.637 kasus di tahun 2024 atau meningkat sebesar 20,9 persen. Status Gizi di Kota Denpasar tahun 2023 dan 2024, mengarahkan pemahaman bahwa jumlah status gizi baik mengalami peningkatan di seluruh kecamatan. Peningkatan tertinggi berada di Kecamatan

Denpasar Barat, di mana pada tahun 2023 terdapat 3.080 kasus gizi baik sedangkan tahun 2024 meningkat sejumlah 1.084 kasus menjadi 4164 kasus. Denpasar Timur mengalami peningkatan nomor dua dengan total 666 kasus. Kemudian Denpasar Selatan mengalami peningkatan status gizi baik sejumlah 583 kasus diikuti oleh Denpasar Timur sejumlah 393 kasus. Jika dilihat secara keseluruhan selisih jumlah imunisasi tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan 23.583 dari tahun sebelumnya atau setara 34,7 persen dalam satu tahun. Kecamatan yang mengalami cakupan imunisasi yang paling menurun ada di Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 9.068 jiwa selanjutnya Denpasar Barat dengan 5.319 jiwa, disusul Denpasar Utara 4.874 jiwa dan terakhir penurunan terendah terjadi di Denpasar Timur sebanyak 4.457 jiwa. Jumlah dokter umum baik laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan sebesar 25,9 persen dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Dilihat dari persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran di Kota Denpasar dimana Kesertaan KB keluarga PBI meningkat sebesar 26,72 persen dari tahun 2023 ke tahun 2024. Peningkatan ini merepresentasikan bahwa kesadaran masyarakat telah meningkat atas pengendalian jumlah anak dan jarak kelahiran anak demi memperhitungkan masa depan keluarga. Penting untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kesadaran masyarakat atas urgensi KB melalui berbagai kegiatan sosialisasi yang kontinyu.

Di bidang ekonomi, pada kelompok usia produktif yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Kelompok usia produktif mengalami kenaikan yaitu laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,53 persen sedangkan perempuan mengalami kenaikan sebesar 0,38 persen. Jumlah kelompok umur 0-14 tahun mengalami penurunan sebesar 0,43 persen yaitu pada tahun 2023 sebanyak 154,93 ribu jiwa dan pada tahun 2024 sebesar 154,27 ribu jiwa. Pada tahun 2023 jumlah penduduk yang bekerja sebagai karyawan swasta sebanyak 157.797 jiwa dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 162.443 jiwa.

Pada sektor pertanian, Kelompok Wanita Tani (KWT) yang berada di Kota Denpasar terbanyak ada di Kecamatan Denpasar Utara yaitu sebanyak empat KWT sedangkan kecamatan lainnya yaitu Denpasar Timur, Denpasar Selatan dan Denpasar Barat masing-masing memiliki tiga KWT. Terdapat 10 orang dari 15 tenaga penyuluh pertanian berjenis kelamin perempuan sedangkan sisanya yaitu 5 orang merupakan penyuluh pertanian berjenis kelamin laki-laki. Jumlah angkatan kerja yang bekerja mengalami penurunan sebesar 2,68% dan jumlah orang yang tidak bekerja mengalami kenaikan sebesar 11,35%.

Pada tahun 2023 hanya ada 359 orang tenaga kerja asing namun pada tahun 2024 meningkat menjadi 864 orang. Jumlah tenaga kerja asing masih didominasi pada tenaga kerja berjenis kelamin laki-laki namun tenaga kerja asing berjenis kelamin

perempuan mengalami peningkatan sebesar 56%. Jumlah tenaga kebersihan mengalami kenaikan sebesar 2%. Pada tahun 2023 yang berjumlah 560 orang perempuan dan pada tahun 2024 menjadi 571 orang. Tenaga kebersihan berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dikarenakan pekerjaan ini membutuhkan kekuatan fisik yang lebih besar. Tenaga kerja yang terserap di sektor pariwisata masih didominasi oleh laki-laki sebanyak 4765 orang sedangkan perempuan hanya 2031 orang. Perbedaan yang cukup besar ini disebabkan kebutuhan tenaga fisik dan tanggung jawab yang lebih besar yang berada di sektor pariwisata.

Jumlah KK yang terdaftar pada DTKS mengalami penurunan. KK Rumah Tangga (RT) yang terdaftar mengalami penurunan sebesar 9%. Sedangkan Anggota Rumah Tangga (ART) juga mengalami penurunan sebesar 17%. Menurunnya jumlah KK yang terdaftar pada DTKS menandakan hal baik yang berarti menurun juga kebutuhan akan kesejahteraan sosial dan penerima bantuan. Menurut jenis kelamin pada kelompok usia produktif mengalami kenaikan yaitu laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,53% sedangkan perempuan mengalami kenaikan 0,38%. Hal ini menjadikan dampak positif bagi Kota Denpasar dengan adanya potensi bonus demografi. Dalam hal ini jumlah pencari kerja laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan yang menunjukkan sadarnya akan pentingnya tingkat pendidikan. Namun hal ini juga menjadi permasalahan, yang seharusnya

dengan tingkat pendidikan yang tinggi dapat mendapatkan pekerjaan lebih mudah tidak sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh tingginya persaingan di dunia kerja dan banyaknya pencari kerja yang tidak memenuhi standar kualifikasi perusahaan sehingga digantikan dengan teknologi dan tenaga kerja asing. Jumlah industri kecil dan menengah banyak dikelola oleh perempuan sebanyak 19.714 perempuan sedangkan laki-laki hanya 13.142 yang mengelola industri kecil dan menengah. Hal ini dapat disebabkan oleh peran ganda yang dimiliki perempuan. Industri kecil dan menengah dapat dilakukan dengan fleksibel sehingga pelakunya dapat menjalankan usaha di rumah atau lingkungan yang dekat dari rumah sehingga perempuan dapat menjalankan peran gandanya dengan baik.

Jumlah ASN mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Hal ini dikarenakan pandangan ASN oleh masyarakat merupakan pekerjaan yang memiliki gaji tetap dan ternama sehingga banyak masyarakat yang berlomba-lomba untuk menjadi ASN. Jumlah ASN yang mengikuti diklat mengalami penurunan yaitu 0,82%. Pada jenis kelamin laki-laki mengalami penurunan sebesar 1,59% dan perempuan mengalami penurunan sebesar 0,48%. Jumlah pimpinan parpol masih didominasi oleh laki-laki. Laki-laki dianggap mampu memimpin sebuah partai dikarenakan citra pemimpin akan diikuti oleh citra partai. Hal ini juga dapat disebabkan oleh keterlibatan politik

praktis. Jumlah panitia pemilihan kecamatan didominasi oleh laki-laki sebanyak 18 orang dari 20 orang. Panitia berjenis kelamin perempuan hanya ada di wilayah Denpasar Barat dan Denpasar Timur dengan masing-masing memiliki 1 orang panitia perempuan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kota Denpasar terbesar di pangkat PPPK tidak memiliki pangkat. Pada tahun 2023 sebanyak 1008 perempuan atau sebesar 26,86% sedangkan pada tahun 2024 meningkat 14,61% menjadi 1782 atau sebesar 41,47%.

Persentase korban kekerasan pada laki-laki mengalami penurunan. Pada tahun 2023 sebanyak 2,3% namun pada tahun 2024 tidak ada korban kekerasan kepada lelaki. Hal ini berbanding terbalik dengan persentase kekerasan kepada perempuan yang meningkat 9%. Pada tahun 2023 yang mulanya 39% meningkat menjadi 48% pada tahun 2024. Jumlah KDRT yang terjadi di Kota Denpasar mengalami peningkatan sebesar 3%. Alat/cara KB yang paling banyak digunakan oleh perempuan yang berstatus nikah usia 15-49 tahun adalah AKDR/IUD/spiral. Jumlah kekerasan anak laki-laki mengalami penurunan sebesar 10% menjadi 23%. Sedangkan anak perempuan mengalami kenaikan sebesar 4% menjadi 29%. Dengan adanya pendampingan oleh dinas P3A, anak korban kekerasan dapat merasakan aman, terlindungi, pendampingan, dan arahan lebih lanjut untuk hidupnya.

Jumlah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak terjadi pada tahun 2023 dan 2024 pada jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Jumlah gepeng didominasi oleh kelompok umur 19 tahun keatas dan didominasi oleh laki-laki. Jumlah penduduk lansia pada tahun 2024 sebanyak 670,4 ribu jiwa dari total penduduk di Bali sebesar 4.461,3 ribu jiwa. Sebanyak 15% merupakan penduduk lansia yang ada di Bali.

Perempuan Bali memiliki peran penting dalam kehidupan adat, baik dalam lingkup keluarga, desa, maupun dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Mereka terlibat dalam berbagai upacara adat, pengelolaan kegiatan sosial, serta pelestarian budaya. Jumlah lembaga adat perempuan di Kota Denpasar pada tahun 2024 adalah 23 Paiketan dengan jumlah anggota 376 orang. Semakin banyak lembaga adat yang dibentuk oleh atau untuk perempuan (seperti Paiketan Krama Istri) menunjukkan adanya pengakuan resmi bahwa perempuan adat memiliki peran unik dan esensial dalam pemeliharaan nilai, pelestarian budaya, dan kesejahteraan komunitas.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	4
1.3 Manfaat.....	5
1.4 Jenis dan Sumber Data	5
1.5 Analisis Data.....	6
BAB II KONSEP-KONSEP	7
2.1 Konstruksi Gender	7
2.2 Pengarusutamaan Gender (PUG)	10
2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan.....	12
2.4 Statistik Gender	14
BAB III GAMBARAN UMUM KOTA DENPASAR	17
3.1 Kondisi Geografis dan Topografis.....	17
3.2 Sekilas Sejarah Berdirinya Kota Denpasar---	19
3.3 Lambang Kota Denpasar dan Penjelasannya	21
3.4 Visi dan Misi.....	23
3.5 Sistem Pemerintahan.....	24

3.6	Kondisi Demografi-----	25
3.7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Denpasar -----	27
3.8	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)-----	29
3.9	Indek Pembangunan Gender (IPG)-----	31
3.10	Indeks Ketimpangan Gender -----	34
BAB IV	PENDIDIKAN -----	39
4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) -----	40
4.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) -----	42
4.3	Jumlah Siswa-----	
4.4	Sekolah-----	44
4.5	Guru-----	
4.6	Kepala Sekolah -----	
4.7	Guru yang Tersertifikasi -----	62
BAB V	KESEHATAN -----	77
5.1	Angka Kelahiran Bayi-----	78
5.2	Jumlah Angka Balita di Kota Denpasar berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023 dan 2024-----	80
5.3	ASI Eksklusif di Kota Denpasar menurut Kecamatan Tahun 2023 dan 2024 -----	83
5.4	Status Gizi di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024-----	86

5.5	Pojok ASI di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024-----	91
5.6	Cakupan Imunisasi Pada Bayi di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024-----	93
5.7	Kematian Ibu-----	95
5.8	Angka Harapan Hidup-----	97
5.9	Jumlah Dokter Umum dan Dokter Spesialis menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar ----	99
5.10	Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih-----	106
5.11	Keluarga Berencana (KB)-----	107
5.12	Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB-----	112
5.13	Fasilitas Kesehatan -----	113
BAB VI	EKONOMI -----	115
6.1	Kegiatan Utama Penduduk -----	118
6.2	Penduduk Usia 15-59 Tahun Menurut Jenis Kelamin-----	118
6.3	Kegiatan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas --	120
6.4	Tenaga Penyuluh Pertanian -----	125
6.5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) --	127
6.6	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan-----	129
6.7	Partisipasi Perempuan di Sektor Swasta ----	
6.8	Tenaga Kerja Asing Pendetang -----	130

6.9	Lingkungan Hidup dan Kebersihan -----	133
6.10	Petugas Layanan Parkir -----	
6.11	Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata -----	
6.12	Pemilik Usaha Salon Kecantikan -----	
6.13	KK Terdaftar pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)-----	
6.14	Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin-----	
6.15	UMKM-----	136
BAB VII	SEKTOR PUBLIK-----	148
7.1	Eksekutif -----	149
7.2	Legislatif-----	157
7.3	Yudikatif-----	164
BAB VIII	LAIN-LAIN -----	166
8.1	Kekerasan -----	166
8.2	Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) -----	173
8.3	Lansia (Lanjut Usia) PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)-----	
8.4	Lembaga Adat Perempuan -----	174
BAB IX	PENUTUP -----	178
	DAFTAR PUSTAKA -----	18

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Persen) -----	14
Tabel 3.1	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan, 2020-2024 -----	25
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024-----	27
Tabel 4.1	Angka Partisipasi Khusus (APK) menurut Jenjang Pendidikan Kota Denpasar Tahun 2024 -----	41
Tabel 4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar Tahun 2024 -----	43
Tabel 4.3	Jumlah Siswa PAUD Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024-----	45
Tabel 4.4	Jumlah Siswa SD menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2024-----	48
Tabel 4.5	Jumlah Siswa SMP menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2024 -----	51
Tabel 4.6	Jumlah Siswa SMA/MA/SMK menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2024-----	53
Tabel 4.7	Jumlah Siswa berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar, Tahun 2024----	56
Tabel 4.8	Jumlah Siswa SD/MI yang Putus Sekolah Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024 -----	59
Tabel 4.9	Jumlah Siswa SMP/MTS yang Putus Sekolah Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024 -----	59
Tabel 4.10	Jumlah Sekolah di Kota Denpasar Tahun 2024 ----	

Tabel 4.11	Jumlah Guru SD Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 -----	
Tabel 4.12	Jumlah Kepala Sekolah SD menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 -----	
Tabel 4.13	Jumlah Kepala Sekolah SMP menurut Jenjang Pendidikan Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 -----	
Tabel 4.14	Jumlah Guru SD yang Tersertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024--	
Tabel 4.15	Jumlah Guru SMP yang Tersertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024--	
Tabel 4.16	Jumlah Guru SMA yang Tersertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024--	60
Tabel 4.17	Jumlah Anak Umur 7-18 Tahun yang Putus Sekolah di Kota Denpasar Tahun 2024-----	
Tabel 5.1	Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023 dan 2024-----	78
Tabel 5.2	Jumlah Angka Balita di Kota Denpasar berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023 dan 2024-----	81
Tabel 5.3	ASI Eksklusif di Kota Denpasar Menurut Kecamatan Tahun 2023 dan 2024 -----	84
Tabel 5.4	Status Gizi di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024 -----	87
Tabel 5.5	Pojok ASI di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024 -----	91
Tabel 5.6	Cakupan Imunisasi Pada Bayi di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024 -----	93

Tabel 5.7	Jumlah Angka Kematian Ibu Maternal di Kota Denpasar Tahun 2021-2024 -----	95
Tabel 5.8	Jumlah Dokter Umum menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024 -----	98
Tabel 5.9	Jumlah Angka Harapan Hidup di Kota Denpasar 2021-2024 -----	100
Tabel 5.10	Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 -----	102
Tabel 5.11	Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih Tahun 2023 dan 2024 -----	105
Tabel 5.12	Persentase Kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024 -----	108
Tabel 5.13	Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan Tahun 2023 dan 2024 di Kota Denpasar -----	108
Tabel 5.14	Persentase Peserta KB Aktif Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024 -----	109
Tabel 5.15	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Siap Melayani KB Di Kota Denpasar Tahun 2024 ---	112
Tabel 5.16	Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu menurut Kecamatan Tahun 2023 dan 2024 -----	114
Tabel 6.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024 (ribu jiwa) -----	119
Tabel 6.2	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Yang Dilakukan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024 -----	120

Tabel 6.3	Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024 -----	123
Tabel 6.4	Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kota Denpasar Tahun 2024 -----	125
Tabel 6.5	Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024--	126
Tabel 6.6	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024 -----	127
Tabel 6.7	Jumlah Perempuan yang Bekerja di Lembaga Pemerintahan di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024 -----	130
Tabel 6.8	Persentase Perempuan yang Bekerja di Lembaga Pemerintahan di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024-----	130
Tabel 6.9	Jumlah Perempuan yang Bekerja di Sektor Swasta -----	131
Tabel 6.10	Persentase Perempuan yang Bekerja di Lembaga Swasta di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024 -----	131
Tabel 6.11	Tenaga Kerja Asing Pendatang Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024 -----	133
Tabel 6.12	Jumlah Tenaga Kebersihan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024 -----	134
Tabel 6.13	Jumlah Petugas Kebersihan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024 -----	135

Tabel 6.14	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Pertamanan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024-----	136
Tabel 6.15	Jumlah Petugas Layanan Parkir Dalam Rumija dan Luar Rumija menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024-----	137
Tabel 6.16	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap di Sektor Pariwisata menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024-----	138
Tabel 6.17	Tenaga Kerja yang Diserap pada Bidang Usaha Hotel dan Restaurant menurut Jenis Kelamin Tahun 2024-----	139
Tabel 6.18	Jumlah Penanggung Jawab Usaha Akomodasi di Kota Denpasar menurut Jenis Kelamin Tahun 2024-----	140
Tabel 6.19	Usaha Salon Kecantikan menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024-----	140
Tabel 6.20	Jumlah KK Terdaftar Pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) menurut Rumah Tangga (RT) dan Anggota Rumah Tangga (ART) di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024 -----	141
Tabel 6.21	Jumlah Penduduk berusia 15 tahun keatas yang bekerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024--	142
Tabel 6.22	Jumlah Pemilik UMKM Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2024-----	
Tabel 6.23	Jenis Usaha dan Data Jumlah Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin Pada UMKM Kota Denpasar 2024 -----	

Tabel 6.24	Upah Minimum Tenaga Kerja di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024 -----	
Tabel 6.25	Jumlah Pemilik Industri Kecil dan Menengah Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024-----	143
Tabel 6.26	Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024--	
Tabel 7.1	Komposisi ASN Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024 -----	150
Tabel 7.2	Komposisi Pegawai Non ASN Menurut Jenjang (Honorar dan THL) dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024 -----	151
Tabel 7.3	Jumlah Pejabat Yang Sudah Mengikuti Diklat Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024-----	152
Tabel 7.4	Proporsi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang Pernah Mengikuti Diklat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023 dan 2024 -----	153
Tabel 7.5	Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin dan Unit Kerja di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024 -----	154
Tabel 7.6	Jumlah Pejabat Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024 -----	155
Tabel 7.7	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024-----	156

Tabel 7.8	Proporsi Keanggotaan DPRD Menurut Partai Periode 2024-2029 dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar-----	158
Tabel 7.9	Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024-----	
Tabel 7.10	Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 – 2024 -----	159
Tabel 7.11	Jumlah Pengurus Partai Politik (Parpol) Menurut Nama Partai dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024-----	160
Tabel 7.12	Jumlah Anggota Bawaslu, Pileg, Pilpres dan Pilkada Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 -----	
Tabel 7.13	Jumlah Anggota Bawaslu dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024-----	
Tabel 7.14	Jumlah Penegak Hukum Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024-----	162
Tabel 8.1	Persentase Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024 -----	167
Tabel 8.2	Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024 -----	167
Tabel 8.3	Bentuk-bentuk Kekerasan di Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023 dan 2024 -----	168
Tabel 8.4	Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024 -----	169

Tabel 8.5	Jumlah Perempuan Pernah Nikah Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Nikah Menurut Alat/Cara KB yang Digunakan-----	170
Tabel 8.6	Jumlah Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Tahun 2023 dan 2024 -----	171
Tabel 8.7	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani oleh Dinas P3A Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024 -----	172
Tabel 8.8	Jumlah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024-----	173
Tabel 8.9	Jumlah Gepeng Menurut Jenis Kelamin yang Terjaring dan Telah Dibina Dipulangkan ke Daerah Asal Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024 -----	174
Tabel 8.10	Jumlah Lansia terlantar Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024-----	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Luas Lahan Sawah di Kota Denpasar -----	17
Gambar 3.2	Peta Kota Denpasar -----	19
Gambar 3.3	Lambang Kota Denpasar -----	21
Gambar 3.4	Grafik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2010-2023-----	31
Gambar 3.5	Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2010-2023-----	34
Gambar 3.6	Grafik Indeks Ketimpangan Gender (IDG) Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2018-2023-----	35
Gambar 4.1	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang SMP/MTs dan SD/MI Pendidikan di Kota Denpasar Tahun 2024 ---	41
Gambar 4.2	Persentase Angka Partisipasi Khusus (APK) menurut Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar Tahun 2024 -----	43
Gambar 4.3	Jumlah Siswa PAUD pada Masing-Masing Kecamatan di Kota Denpasar 2024 -----	45
Gambar 4.4	Jumlah Siswa PAUD Menurut Jenis Kelamin pada Masing-Masing Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2024 -----	46
Gambar 4.5	Jumlah Siswa SD pada Masing-Masing Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2024 ---	48
Gambar 4.6	Jumlah Siswa SD menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2024 di Kota Denpasar Tahun 2024 -----	49

Gambar 4.7	Jumlah Siswa SMP pada Masing-Masing Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2024 ---	51
Gambar 4.8	Jumlah Siswa SMP menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2024 -----	52
Gambar 4.9	Jumlah Siswa SMA/MA/SMK pada Masing-Masing Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2024 -----	54
Gambar 4.10	Jumlah Siswa SMA/MA/SMK menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2024 -----	55
Gambar 4.11	Jumlah Siswa berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar Tahun 2024 ---	57
Gambar 4.12	Jumlah Siswa berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 -----	58
Gambar 4.13	Persentase Kepala Sekolah SD Berdasarkan Jenis Kelamin (2024) -----	66
Gambar 4.14	Persentase Guru SD yang Tersertifikasi Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 -----	
Gambar 4.15	Persentase Guru SMP yang Tersertifikasi Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 -----	
Gambar 4.16	Perbandingan Guru SD dan SMP yang Tersertifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 -----	67
Gambar 4.17	Persentase Kepala Sekolah SMP Berdasarkan Jenis Kelamin (2024) -----	
Gambar 5.1	Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023 -----	79

Gambar 5.2	Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024-----	79
Gambar 5.3	Jumlah Angka Balita di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023 -----	82
Gambar 5.4	Jumlah Angka Balita di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024 -----	82
Gambar 5.5	ASI Eksklusif di Kota Denpasar Menurut Kecamatan Tahun 2023 dan 2024-----	85
Gambar 5.6	Status Gizi di Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2023 dan 2024-----	88
Gambar 5.7	Status Gizi di Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2023 dan 2024-----	88
Gambar 5.8	Status Gizi di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2023 dan 2024-----	89
Gambar 5.9	Angka Kematian Ibu di Kecamatan Denpasar Barat tahun 2021-2024-----	89
Gambar 5.10	Status Gizi di Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2023 dan Tahun 2024 -----	96
Gambar 5.11	Angka Harapan Hidup di Kota Denpasar tahun 2021-2024-----	99
Gambar 5.12	Jumlah Dokter Umum Berdasarkan Jenis Kelamin pada Masing-Masing Puskesmas Tahun 2023 -----	101
Gambar 5.13	Jumlah Dokter Umum Berdasarkan Jenis Kelamin pada Masng-Masing Puskesmas Tahun 2023 -----	101

Gambar 5.14	Jumlah Dokter Umum Laki-Laki & Perempuan pada Puskesmas di Kota Denpasar (2023-2024)-----	102
Gambar 5.15	Persentase Perubahan Peserta KB Aktif MKJP Kota Denpasar (2023-2024)-----	110
Gambar 5.16	Peserta KB Aktif MKJP Tahun 2023-2024----	
Gambar 5.17	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Denpasar Tahun 2023 dan 2024-----	111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesetaraan gender merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Data dan informasi yang akurat mengenai kondisi gender di suatu wilayah sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna mengatasi ketimpangan gender dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, penyusunan profil statistik gender menjadi suatu kebutuhan yang mendasar dalam mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis bukti.

Dalam perkembangan dunia yang semakin modern dan maju, perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi tantangan-tantangan yang muncul di era Revolusi Industri 5.0 dan Megatren 2045. Dalam konteks Revolusi Industri 5.0 dan Megatren 2045, peran perempuan menjadi semakin krusial. Revolusi Industri 5.0 menekankan keseimbangan antara teknologi canggih dan nilai-nilai kemanusiaan, termasuk dalam aspek kesetaraan gender. Perempuan memiliki kesempatan lebih luas untuk berkontribusi dalam bidang teknologi, inovasi, dan

kewirausahaan berbasis digital, sehingga meningkatkan partisipasi mereka dalam ekonomi global.

Sementara itu, Megatren 2045 yang mencerminkan perubahan besar dalam demografi, urbanisasi, serta perkembangan teknologi dan ekonomi global, juga memberikan tantangan dan peluang bagi perempuan. Dengan meningkatnya otomatisasi dan digitalisasi, perempuan perlu mendapatkan akses lebih besar terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan digital agar dapat bersaing di pasar kerja yang terus berkembang. Selain itu, kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan menjadi kunci untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Revolusi Industri 5.0 merupakan istilah yang menggambarkan era di mana teknologi digital, internet, kecerdasan buatan, dan berbagai inovasi lainnya menyatu dalam segala aspek kehidupan manusia. Sementara, Megatren 2045 merupakan wacana tentang masa depan Indonesia pada tahun 2045 yang dikembangkan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya. Kedua fenomena ini menandai perubahan besar dalam dunia teknologi dan ekonomi global yang akan berdampak langsung terhadap cara hidup, bekerja, dan berinteraksi manusia.

Dampak dari Revolusi Industri 5.0 bagi perempuan meliputi peningkatan kesempatan kerja dalam sektor berbasis teknologi,

akses yang lebih luas terhadap pendidikan digital, serta peluang untuk berkontribusi dalam inovasi dan kepemimpinan. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital dan hambatan budaya dalam akses terhadap teknologi masih menjadi kendala yang harus diatasi melalui kebijakan yang inklusif.

Dampak dari Megatren 2045 bagi perempuan meliputi perubahan pola pekerjaan dengan meningkatnya fleksibilitas kerja, potensi meningkatnya keterwakilan perempuan dalam sektor ekonomi dan politik, serta tuntutan untuk meningkatkan keterampilan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan lingkungan kerja. Oleh karena itu, penguatan kebijakan kesetaraan gender dan peningkatan akses perempuan terhadap sumber daya menjadi hal yang sangat penting dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dari Megatren 2045.

Untuk mengukur kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender, terdapat beberapa indikator utama yang digunakan, antara lain (UNDP, 2022; World Economic Forum, 2023; dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2024) :

1. Indeks Pembangunan Gender (*Gender Development Index/GDI*)

Indeks ini mengukur kesenjangan pembangunan manusia berdasarkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup antara laki-laki dan perempuan.

2. Indeks Ketimpangan Gender (*Gender Inequality Index/GII*)
Indeks ini menilai ketimpangan dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi dalam pasar tenaga kerja.
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Indeks ini mengukur persentase perempuan yang aktif dalam dunia kerja dibandingkan laki-laki.
4. Representasi perempuan dalam politik
Indeks ini mengukur persentase perempuan dalam parlemen, pemerintahan, dan posisi kepemimpinan lainnya.
5. Akses terhadap pendidikan
Indeks ini mengukur tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
6. Akses terhadap layanan kesehatan
Indeks ini mengukur kesenjangan dalam akses perempuan terhadap layanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi.
7. Upah dan kesenjangan pendapatan gender
Indeks ini membandingkan pendapatan rata-rata perempuan dan laki-laki dalam berbagai sektor pekerjaan.

8. Tingkat kekerasan terhadap perempuan

Indeks ini mengukur prevalensi kekerasan berbasis gender, baik dalam lingkungan rumah tangga maupun publik.

9. Akses terhadap teknologi dan keuangan

Indeks ini mengukur tingkat akses perempuan terhadap teknologi digital, perbankan, dan sumber daya ekonomi lainnya.

10. Partisipasi perempuan dalam sektor STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika)

Indeks ini mengukur keterlibatan perempuan dalam bidang yang terkait dengan inovasi dan teknologi.

Dengan adanya indikator-indikator ini, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat melakukan evaluasi dan perumusan kebijakan yang lebih tepat guna mengatasi ketimpangan gender. Data yang tersaji dalam Profil Statistik Gender ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif untuk mendukung pembangunan yang lebih adil dan setara bagi semua pihak.

Profil Statistik Gender ini disusun sebagai upaya untuk menyajikan data yang menggambarkan kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik berdasarkan perbedaan gender. Dengan adanya data ini, diharapkan dapat memberikan wawasan kepada para pemangku kepentingan

dalam memahami kesenjangan yang ada serta merancang strategi yang lebih efektif untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.

Selain itu, penyusunan buku ini juga bertujuan untuk mendukung komitmen pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya pada tujuan ke-5 yang berfokus pada kesetaraan gender. Dengan informasi yang tersedia dalam buku ini, diharapkan berbagai pihak, baik dari pemerintah, akademisi, maupun masyarakat umum, dapat memanfaatkan data secara optimal guna meningkatkan peran serta dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan laki-laki secara adil dan setara.

Hunt (2004) memaparkan bahwa pemisahan data statistik dan informasi lainnya, berdasarkan jenis kelamin atau data terpilah (*sex-disaggregated data*) sangat diperlukan sebagai alat untuk melakukan analisis gender. Tanpa data terpilah, akan sangat sulit untuk menilai perbedaan dampak aktivitas pembangunan terhadap laki-laki dan perempuan. Pemilahan data sangat penting untuk dilakukan, untuk kelompok masyarakat yang mungkin akan mendapatkan pengaruh positif atau negatif dari pembangunan. Bukan hanya berdasarkan jenis kelamin, tetapi dapat pula berdasarkan usia, ras, etnis, dan kelompok sosial ekonomi lainnya.

Dengan demikian, Profil Statistik Gender ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang komprehensif, akurat, dan dapat digunakan dalam berbagai sektor guna menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan data terpilah dalam buku statistik gender adalah untuk menyajikan data statistik yang terpilah berdasarkan jenis kelamin di berbagai aspek pembangunan, seperti aspek pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi, publik dan aspek lainnya yang ada di Kota Denpasar. Pemilahan data menurut jenis kelamin merupakan prasyarat utama dilakukannya analisis gender yang bermanfaat dalam penyusunan analisis kebijakan dan penyusunan anggaran yang responsive gender. Sasaran kegiatan ini adalah tersusunnya buku data terpilah Profil Statistik Gender Kota Denpasar 2025.

1.3 Manfaat

Manfaat dari penyusunan Profil Statistik Gender adalah sebagai berikut: (1) sebagai baseline/pemetaan data untuk mengurangi kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan partisipasi, kontrol, dan mendapatkan manfaat atas kebijakan, program dan hasil Pembangunan secara adil dan setara; (2) digunakan dalam

melakukan analisis gender melalui GAP yang diperlukan untuk penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) yang berbasis kinerja; (3) sebagai dasar untuk mengintervensi/ mereformulasi kebijakan/program/ kegiatan Pembangunan yang responsive gender.

1.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang ditampilkan dalam buku ini adalah data kuantitatif yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Data yang dipublikasikan ini Sebagian besar berupa data primer yang diambil dari hasil-hasil survey yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) seperti Suvei Sosial Ekonomi (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan lain-lain. Selain dari BPS, data juga bersumber dari berbagai instansi terkait seperti dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar, Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota

Denpasar, Kantor PD Parkir Kota Denpasar, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Denpasar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Denpasar, Kantor Kehakiman, Kejaksaan, Polresta Kota Denpasar, dan Dinas Sosial Kota Denpasar.

1.5 Analisis Data

Profil Statistik Gender Kota Denpasar Tahun 2025 dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan data-data kuantitatif. Penampilan data kuantitatif ini akan menjadi lebih bermakna jika apa yang ada dibalik pemunculan data angka itu dianalisis secara mendalam. Analisis yang mendalam dilakukan dengan cara menarasikan secara lengkap atau menganalisis secara kualitatif data yang ada pada setiap tabel. Dalam analisis ini akan diberikan penafsiran-penafsiran sesuai dengan kondisi nyata dimasyarakat, namun penafsiran ini baru berupa dugaan sementara yang pada gilirannya untuk menguji kebenarannya masih perlu dilakukan kajian lebih lanjut.

BAB II

KONSEP-KONSEP

2.1 Konstruksi Gender

Konstruksi gender mengacu pada konsep sosial yang membentuk peran, perilaku, norma, dan harapan terhadap individu berdasarkan jenis kelamin mereka dalam masyarakat. Gender bukan hanya aspek biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Konsep ini berkembang melalui interaksi sosial dan ditanamkan dalam institusi seperti keluarga, sekolah, media, dan tempat kerja. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi konstruksi gender meliputi:

1. Norma sosial dan budaya

Masyarakat memiliki ekspektasi tertentu terhadap bagaimana laki-laki dan perempuan harus berperilaku.

2. Pendidikan

Kurikulum dan interaksi di sekolah dapat memperkuat peran gender tradisional atau memberikan ruang bagi kesetaraan.

3. Media dan representasi gender

Film, televisi, iklan, dan media sosial sering kali mencerminkan atau menantang stereotip gender.

4. Struktur ekonomi dan pekerjaan

Pembagian kerja berdasarkan gender masih terjadi di banyak sektor, meskipun kesadaran tentang pentingnya kesetaraan meningkat.

5. Hukum dan kebijakan publik

Regulasi dan kebijakan dapat memperkuat atau mengurangi ketidaksetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan.

Pemahaman tentang konstruksi gender sangat penting dalam upaya mencapai kesetaraan, karena dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan struktural yang menghalangi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi secara setara dalam masyarakat. Perbedaan norma dan perilaku/perlakuan terhadap seseorang yang terlahir sebagai laki-laki atau perempuan inilah yang kemudian membentuk peran, perilaku, dan atribut yang dikonstruksikan secara sosial dalam masyarakat. Konstruksi sosial tersebut yang disebut dengan gender. Konstruksi sosial dalam masyarakat yang memberikan perlakuan, norma, dan pandangan yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan pada kenyataannya berdampak terhadap adanya diskriminasi gender. Diskriminasi gender ini menimbulkan

perbedaan capaian antara laki-laki dan perempuan yang disebut sebagai ketimpangan gender. Lebih lanjut menyebutkan bahwa ketimpangan ini diperkuat dengan tumbuhnya budaya patriarki yang lebih mengutamakan laki-laki dari perempuan. Budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai pihak yang bertanggungjawab pada peran publik, sedangkan perempuan hanya berfokus pada peran domestik. Sebenarnya perempuan memiliki hak untuk memilih dan menjalani peran domestik maupun publik. Namun, masalah terjadi ketika peran yang dijalani perempuan dicampuri oleh tekanan pihak luar, bahkan pihak terdekat.

Gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis Kelamin merupakan konstruksi biologis, universal, tidak dapat diubah karena merupakan kodrat. Misalnya laki laki memiliki sperma dan perempuan memiliki sel telur. Sedangkan gender adalah konsep sosial dan budaya yang mengacu pada peran, tanggung jawab, perilaku, dan identitas yang dikonstruksikan oleh masyarakat untuk laki-laki dan perempuan. Artinya, gender bukan ditentukan oleh faktor biologis (jenis kelamin), melainkan oleh norma dan harapan sosial terhadap bagaimana seseorang seharusnya bertindak atau berperan sebagai laki-laki atau perempuan dalam suatu masyarakat. Untuk mengatasi berbagai polemik atau diskriminasi tersebut, perlu ada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi

bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender juga mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab, dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki (*UN Women*).

Kesetaraan gender adalah kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang setara dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan, pekerjaan, politik, kesehatan, dan kehidupan keluarga. Terwujudnya kesetaraan dalam gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara kaum perempuan dan laki-laki sehingga akses yang ada dapat mereka miliki, partisipasi terbuka lebar dan adanya kesempatan, kontrol dan juga memperoleh manfaat pembangunan yang setara dan adil. Adapun berbagai indikator dalam gender dan kesetaraannya adalah sebagai berikut (*International Labour Organization (ILO)*, 2023; *World Bank*, 2022):

1) Adanya akses

Peluang atau kesempatan dalam menggunakan sumberdaya tertentu. Mempertimbangkan dan juga memperhitungkan bagaimana laki-laki dan perempuan mendapatkan sumberdaya tersebut secara merata dan juga adil, dalam bidang pendidikan

adanya program beasiswa, dimana diberikan secara adil dan merata antara laki-laki dan perempuan.

2) Partisipasi

Aspek dalam partisipasi merupakan suatu keikutsertaan dalam suatu kelompok atau orang tertentu dalam pengambilan keputusan. Disini dapat dilihat bahwa perempuan dan juga laki-laki apakah memang memiliki suatu peran yang sama atau tidak dalam mengambil suatu keputusan.

3) Kontrol

Penguasaan atau juga wewenang atau kekuatan dalam pengambilan suatu keputusan yang ada. Pemegang jabatan dalam hal tertentu dapat dilihat didominasi oleh gender atau tidak.

4) Manfaat

Merupakan manfaat atau kegunaan yang dapat dan juga dirasakan dan dinikmati secara penuh dan optimal. Di mana dalam keputusan tersebut dapat memberikan suatu kemanfaatan adil dan sebaik-baiknya serta merata bagi laki-laki dan perempuan.

Jika merujuk pada pandangan yang normatif dimaksudkan bahwa kesetaraan gender didasarkan pada aturan dan norma yang berlaku, dimana sikap seseorang lebih berpedoman kepada loyalitas, kesetiaan, serta aturan dan kaidah yang berlaku di lingkungannya. Sudut pandang yang normatif memberikan

pengertian bahwa adanya aturan yang mengikat seseorang untuk tidak melakukan penyimpangan atau melanggar suatu kaidah atau norma yang sudah ditetapkan. Ketaatan dan kesetiaan ditunjukkan dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang ada, dimana prinsip-prinsip tersebut diadopsi dalam suatu peraturan hukum yang berdasarkan pada keadilan.

Menurut Fakih (2008) dan Sultana (2011), kesetaraan gender adalah kondisi di mana individu dari semua gender memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, politik, serta hak sosial dan ekonomi. Konsep ini bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi berbasis gender dan memastikan bahwa setiap individu dapat berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat tanpa hambatan yang disebabkan oleh stereotip gender.

2.2 Pengarusutamaan Gender (PUG)

Istilah Pengarusutamaan Gender (PUG) berasal dari bahasa Inggris "*Gender Mainstreaming*". Istilah tersebut digunakan pada saat Konferensi Wanita Sedunia ke IV di Beijing dan dicantumkan pada "*Beijing Platform of Action*". Semua negara peserta termasuk Indonesia dan organisasi yang hadir pada konferensi tersebut secara eksplisit menerima mandat untuk mengimplementasikan "*Gender Mainstreaming*" tersebut di

negaranya masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah suatu strategi untuk mencapai Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan

Tujuan pengarusutamaan gender adalah memastikan apakah perempuan dan laki-laki: (1) memperoleh akses yang sama kepada sumberdaya Pembangunan; (2) berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk proses pengambilan Keputusan; (3) mempunyai kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan, dan (4) memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender mencakup baik pemenuhan kebutuhan praktis gender maupun pemenuhan kebutuhan strategis gender. Kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan-kebutuhan jangka pendek dan berkaitan dengan perbaikan kondisi perempuan dan/atau laki-laki guna menjalankan peran-peran sosial masing-masing, seperti perbaikan taraf kehidupan, perbaikan pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan air bersih, dan pemberantasan buta aksara. Kebutuhan strategis gender adalah

kebutuhan perempuan dan/atau laki-laki yang berkaitan dengan perubahan pola relasi gender dan perbaikan posisi perempuan dan/atau laki-laki, seperti perubahan di dalam pola pembagian peran, pembagian kerja, kekuasaan dan kontrol terhadap sumberdaya. Pemenuhan kebutuhan strategis ini bersifat jangka panjang, seperti perubahan hak hukum, penghapusan kekerasan dan diskriminasi di berbagai bidang kehidupan, persamaan upah untuk jenis pekerjaan yang sama, dan sebagainya.

Pada dasarnya pengarusutamaan gender adalah menarik perempuan ke dalam arus utama pembangunan bangsa dan masyarakat sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program pembangunan nasional.

Pengarusutamaan gender berfungsi untuk menciptakan mekanisme-mekanisme kelembagaan bagi kemajuan perempuan di semua bidang kegiatan dan kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Pentingnya melaksanakan PUG di dalam berbagai bidang Pembangunan bertujuan untuk memastikan apakah laki-laki dan perempuan benar-benar sudah memperoleh akses yang sama terhadap sumberdaya

pembangunan, dan memperoleh manfaat sama dari hasil pembangunan.

2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. TPAK perempuan khususnya mencerminkan sejauh mana perempuan terlibat dalam pasar tenaga kerja.

Menurut BPS Provinsi Bali (2024), TPAK perempuan di Provinsi Bali menunjukkan tren yang relatif stabil. TPAK perempuan pada tahun 2022 adalah 61,94%, meningkat menjadi 64,84% pada tahun 2023, dan mencapai 60,5% pada tahun 2024. TPAK perempuan di Bali bervariasi antar kabupaten/kota. Sebagai contoh, pada tahun 2024, TPAK Kota Denpasar mencapai 61,94%, sedangkan TPAK Kabupaten Badung sebesar 68,07%. Variasi ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti struktur ekonomi lokal, tingkat pendidikan, dan budaya setempat.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi TPAK perempuan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan

Tingkat pendidikan yang lebih tinggi seringkali meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja.

2. Norma sosial dan budaya

Persepsi tradisional mengenai peran gender dapat mempengaruhi keputusan perempuan untuk bekerja di luar rumah.

3. Akses ke fasilitas pendukung

Ketersediaan fasilitas seperti penitipan anak dan transportasi umum yang aman dapat mendorong partisipasi perempuan dalam dunia kerja.

4. Kebijakan pemerintah

Program dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan TPAK perempuan.

Berbagai upaya yang dapat meningkatkan TPAK perempuan adalah sebagai berikut.

1. Pelatihan dan pendidikan

Menyediakan pelatihan keterampilan dan pendidikan yang relevan untuk meningkatkan kompetensi perempuan di pasar kerja.

2. Kebijakan ramah gender

Mendorong perusahaan untuk menerapkan kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan, seperti cuti melahirkan dan fleksibilitas jam kerja.

3. Pemberdayaan ekonomi

Mendukung program kewirausahaan bagi perempuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

Meningkatkan TPAK perempuan tidak hanya bermanfaat bagi individu perempuan, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang lebih inklusif di Indonesia dan Bali khususnya. Berikut disajikan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin dari Tahun 2022 – Tahun 2024.

TPAK Kota Denpasar mengalami penurunan dari tahun 2022-2024 baik laki-laki dan perempuan. TPAK perempuan lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki. Kondisi ini menunjukkan terdapat kesenjangan gender dalam partisipasi ekonomi, yang menunjukkan bahwa perempuan belum sepenuhnya mendapatkan atau memanfaatkan kesempatan untuk bekerja seperti laki-laki.

Tabel 2.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Persen)

Kota/Kabupaten	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Persen)					
	Laki-Laki			Perempuan		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Kab. Jembrana	85,91	85,49	86,78	75,46	74,67	73,49
Kab. Tabanan	83,15	81,28	83,17	70,89	67,17	67,59
Kab. Badung	80,15	81,42	83,16	65,19	66,21	68,07
Kab. Gianyar	85,1	82,08	83,7	75,38	72,53	69,46
Kab. Klungkung	85,1	84,97	82,89	74,76	74,82	71,58
Kab. Bangli	87,24	86,5	88,02	79,42	79,56	76,49
Kab. Karangasem	88,69	89,5	87,41	82,15	82,52	80,11
Kab. Buleleng	85,85	83,82	84,77	65,18	67,18	74,78
Kota Denpasar	82,36	81,31	78,8	61,94	64,84	60,5
Provinsi Bali	84,06	83,55	83,77	69,62	70,63	70,49

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

2.4 Statistik Gender

Statistik gender adalah data kuantitatif yang dikumpulkan dan dianalisis berdasarkan perbedaan gender, baik antara laki-laki maupun perempuan. Statistik ini digunakan untuk memahami kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, dan kesejahteraan social (*United Nations Statistics Division, 2020*).

Statistik gender sangat penting dalam pembuatan kebijakan yang berbasis bukti guna mencapai kesetaraan gender. Data ini membantu mengidentifikasi diskriminasi, mengukur perkembangan kesetaraan gender, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dan lembaga internasional.

Statistik Gender merupakan statistik yang mengandung isu gender, seperti terefleksikan dari kesenjangan dan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan atau dalam isu yang spesifik. Statistik Gender merupakan hasil analisa lebih lanjut dari data terpilah menurut jenis kelamin. Sementara PBB mendefinisikan bahwa Statistik Gender adalah statistik yang mencerminkan perbedaan dan ketidaksetaraan yang cukup berarti dalam situasi perempuan dan laki-laki disemua aspek kehidupan (PBB, 2006).

Beberapa manfaat dari Statistik Gender adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kesenjangan

Statistik gender membantu mengukur sejauh mana perbedaan akses dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan.

2. Dasar kebijakan publik

Data yang akurat memungkinkan pemerintah merancang kebijakan yang lebih adil dan inklusif.

3. Monitoring dan evaluasi

Statistik gender digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan kesetaraan gender.

4. Pemberdayaan perempuan

Dengan data yang akurat, program pemberdayaan perempuan dapat lebih tepat sasaran.

Data terpilah menurut jenis kelamin dan umur memberikan gambaran umum tentang keadaan perempuan dan laki-laki disemua kelompok umur dan diberbagai aspek kehidupan. Data terpilah menurut jenis kelamin, tidak selalu mengandung isu gender. Akan tetapi data terpilah menurut jenis kelamin merupakan unsur dasar yang harus ada untuk mengungkapkan isu gender, yaitu suatu isu yang muncul karena pemberlakuan ketidakadilan atas dasar jenis kelamin. Isu gender selama ini kurang diperhitungkan dalam berbagai proses pembangunan.

Statistik gender tidak boleh disamakan dengan statistik perempuan. Pemahaman tentang statistik gender, kegunaannya, dan penggunaannya telah berubah seiring berjalannya waktu (Hedman, Perucci dan Sundström, 1996; Corner, 2003). Pekerjaan awal terfokus pada pembuatan statistik perempuan, dalam konteks di mana banyak negara mengumpulkan data berdasarkan jenis kelamin, namun sebagian besar data dianalisis dan/atau disediakan bagi pengguna sebagai data total, tanpa ada kemungkinan untuk membedakan antara perempuan dan laki-

laki. Permintaan akan data dan indikator mengenai perempuan datang dari organisasi perempuan dan aktivis perempuan, yang membutuhkan statistik untuk mendukung kebijakan dan program baru yang berorientasi pada pengurangan kerugian yang dihadapi perempuan. Namun sejak saat itu, fokusnya telah bergeser dari “perempuan saja” menjadi “perempuan dan laki-laki”, baik dari segi statistik maupun kebijakan. Dari segi statistik, menjadi jelas bahwa situasi perempuan dapat digambarkan dan dianalisis secara memadai hanya dengan membandingkannya dengan laki-laki. Selain itu, para ahli statistik telah menyadari bahwa perbaikan juga diperlukan dalam bidang statistik laki-laki. (Hedman, Perucci dan Sundström, 1996). Isu-isu khusus yang berkaitan dengan kehidupan laki-laki, seperti tingkat konsumsi alkohol dan merokok yang berbahaya, risiko kecelakaan atau cedera yang lebih besar, dan akses terhadap cuti melahirkan yang dibayar, semakin diperhitungkan dan tercakup dalam statistik gender. Dalam hal kebijakan, perubahan fokus dari perempuan ke gender berasal dari pengakuan bahwa mengisolasi keprihatinan perempuan dari kebijakan dan strategi pembangunan arus utama akan membatasi dampak kebijakan dan strategi tersebut, sementara memberikan

lebih banyak perhatian pada peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki. keterkaitannya dapat membuat kebijakan dan strategi menjadi lebih efektif.

BAB III

GAMBARAN UMUM KOTA DENPASAR

3.1 Kondisi Geografis dan Topografis

Kota Denpasar merupakan daerah atau salah satu kota yang terletak di tengah – tengah Pulau Bali, yang juga merupakan Ibukota dari Provinsi Bali sekaligus sebagai pusat pemerintahan, pendidikan dan perekonomian. Letak yang sangat strategis ini sangatlah menguntungkan baik dari segi ekonomis maupun dari kepariwisataan karena merupakan titik sentral atau pusat dari berbagai kegiatan sekaligus sebagai penghubung dengan kabupaten lainnya. Kota Denpasar memiliki luas wilayah seluas 125,98 km² (BPS Kota Denpasar, 2024). Kota Denpasar terdiri atas 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Denpasar Timur dan Kecamatan Denpasar Barat. Kondisi geografis ini dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut.



Gambar 3.1 Peta Kota Denpasar

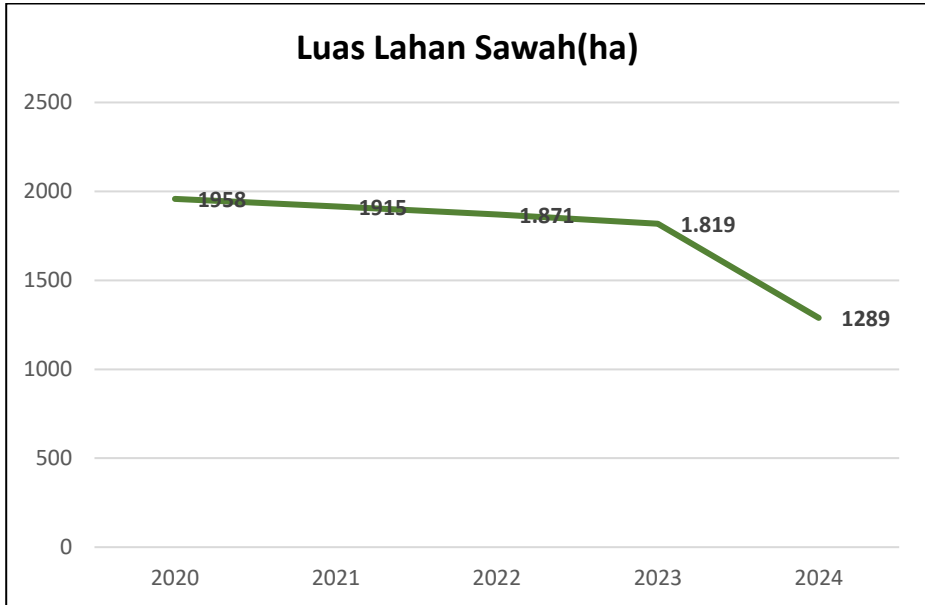
Ditinjau dari tata letak topografisnya, Kota Denpasar terletak di antara 08 35' 31" – 08 44' 49" Lintang Selatan dan 115 10' 23" – 115 16' 27" Bujur Timur. Keadaan topografi Kota Denpasar, posisinya miring ke arah selatan dengan ketinggian berkisar antara 0—75 meter di atas permukaan laut. Semakin ke arah

utara letak wilayahnya tampak semakin tinggi walaupun ketinggiannya agak tidak merata. Sebaliknya, semakin ke arah selatan letak wilayahnya semakin rendah karena paling ujung berbatasan dengan bibir pantai, antara lain Pantai Padang Galak, Pantai Sanur, Pantai Pesanggaran, dan Pantai Serangan. Morfologi wilayah Kota Denpasar yang landai dengan kemiringan lahan sebagian besar berkisar antara 0—5%, tetapi di bagian tepi kemiringannya bisa mencapai 15% (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, 2021).

Lahan pertanian sawah di Kota Denpasar yang masih bertahan sampai sekarang ini, dapat ditanami secara intensif sepanjang tahun karena didukung oleh aliran air sungai yang memadai. Di wilayah Kota Denpasar terdapat sungai besar bernama Tukad Badung yang sementara ini tidak pernah kering. Alih fungsi lahan sawah di Kota Denpasar merupakan isu penting yang mempengaruhi ketahanan pangan dan keseimbangan ekosistem lokal. Berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian Kota Denpasar, selama periode 2023 hingga 2024, terjadi penyusutan lahan pertanian seluas 265 hektare di Kota Denpasar (BPS Kota Denpasar, 2025).

Pemerintah Kota Denpasar memadukan alat regulasi formal (Perda, RTRW), insentif ekonomi, penguatan lembaga adat pertanian (subak), serta kontrol ketat atas perizinan untuk menekan laju alih fungsi lahan. Meskipun alih fungsi tetap terjadi

sekitar 265 ha dalam kurun 2023–2024, langkah-langkah terpadu ini diharapkan dapat mengurangi jumlah lahan yang hilang dalam jangka panjang.



Gambar 3.2 Luas Lahan Sawah di Kota Denpasar

Sumber:

https://dota.denpasarkota.go.id/?domain=dota.denpasarkota.go.id&page=Data-List-Denpasar-Detail&language=id&data_id=1706248017

3.2 Sekilas Sejarah Berdirinya Kota Denpasar

Ditinjau dari segi historisnya, Kota Denpasar mempunyai riwayat yang relatif panjang yang pada akhirnya menjadi Ibu Kota Provinsi Bali. Asal usul kata denpasar berasal dari dua suku kata, yaitu den dan pasar. Kata den berarti utara dan kata pasar berarti

pasar atau peken. Sesuai dengan asal-usul katanya, Denpasar berarti di utara pasar yang sekaligus juga menunjukkan lokasi puri yang saat itu menjadi pusat orientasi penduduk berada di sebelah utara pasar (Salain dalam Wiasti, 2010; 52).

Ditinjau dari segi ruang (*space*), pada awalnya Kota Denpasar menjadi pusat Kerajaan Badung, yang pada mulanya merupakan sebuah taman. Taman ini disebut-sebut bukanlah sekadar taman karena taman ini merupakan kesayangan Raja Badung Kyai Jambe Ksatrya yang beristana di Puri Jambe Ksatrya di Pasar Satria sampai ke utara, yang sampai sekarang pasar ini masih tetap ajeg. Selain itu, taman ini dilengkapi pula dengan tempat peraduan yang diperuntukkan khusus bagi tamu-tamu yang datang dari luar Badung. Taman itu terletak di sebelah utara pasar, tepatnya di rumah jabatan Gubernur Bali, sekarang bernama Jaya Sabha. Awalnya pasar terletak di lapangan Puputan Badung sekarang, tapi pada zaman Belanda pasar itu dipindah ke dekat Tukad Badung sehingga dikenal sebagai Pasar Badung. Oleh karena itu, Kota Denpasar merupakan perkembangan dari wilayah kerajaan yang saat itu Puri Denpasar menjadi pusat pemerintahannya.

Pada tahun 1779 terjadi konflik antara Kyai Jambe Ksatrya dengan I Gusti Ngurah Rai. Padahal, I Gusti Ngurah Rai tak lain orang kepercayaan Kyai Jambe Ksatrya, terutama dalam hal permainan aduan ayam. Konflik ini berujung pada terbunuhnya

Kyai Jambe Ksatrya. Pasca terbunuhnya Kyai Jambe Ksatrya, kekuasaan dilimpahkan kepada I Gusti Ngurah Made Pemecutan. Pelimpahan kekuasaan kepada I Gusti Ngurah Made Pemecutan menandai berakhirnya kekuasaan Puri Jambe Ksatrya. Pasalnya, I Gusti Ngurah Made Pemecutan mendirikan istana baru di Taman Denpasar. Istana baru itulah dinamai Puri Denpasar dan dipelaspas pada tahun 1788. I Gusti Ngurah Made Pemecutan pun dinobatkan sebagai Raja Denpasar I. Tahun 1788 inilah sebagai tonggak kelahiran Kota Denpasar (Sujaya: <http://www.balebengong.net>).

Dalam perkembangan selanjutnya wilayah Kota Denpasar dijadikan pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, dan selanjutnya pada tahun 1958 Kota Denpasar dijadikan pusat pemerintahan Provinsi Bali sekaligus menjadi ibu kota. Pada awalnya Kota Denpasar dijadikan sebagai kota Administratif dengan fokus orientasi pada urusan administrasi pemerintahan. Selanjutnya, dengan dijadikannya sebagai pusat pemerintahan Daerah Tingkat II Badung dan sebagai Ibu Kota Provinsi Bali, maka tidak bisa dipungkiri menjadi pusat orientasi berbagai aspek kehidupan dari berbagai penjuru wilayah pemerintahan sehingga secara pasti mengalami perkembangan yang sangat cepat, baik di bidang fisik, ekonomi, sosial dan budaya maupun demografinya.

Selain sebagai pusat pemerintahan, secara otomatis Kota Denpasar juga menjadi pusat perdagangan, pusat pendidikan dan pusat pariwisata yang pada awalnya secara keseluruhan wilayahnya di bagi menjadi tiga kecamatan, yakni Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur, dan Denpasar Selatan. Melihat perkembangan kota administratif ini dari berbagai sektor begitu pesat, maka tidak mungkin ditangani oleh pemerintahan sebatas pemerintahan yang berstatus kota administratif. Oleh karena itu, selanjutnya sesuai dengan perkembangan kota serta berbagai pertimbangan antara provinsi Bali dan Kabupaten Badung sepakat untuk meningkatkan status kota administratif Denpasar menjadi Kota Denpasar. Akhirnya pada tanggal 15 Januari 1992 berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1992 tentang pembentukan Kota Denpasar lahir dan telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Februari 1992. Setelah kota Denpasar dirubah statusnya, yaitu dari kota administratif menjadi Kota Denpasar berarti juga merupakan babak baru bagi penyelenggaraan pemerintahan kota.

3.3 Lambang Kota Denpasar dan Penjelasannya

Masing-masing kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bali telah memiliki lambang tersendiri. Lambang Kota Denpasar berbentuk segi lima sama sisi sebagai berikut.



Gambar 3.3 Lambang Kota Denpasar

Warna dasar segi lima sama sisi pada lambang Kota Denpasar, yaitu berwarna biru laut, sedangkan garis pinggirnya berwarna hitam. Pita berwarna putih pada bagian bawahnya tertulis motto “PURADHIPA BHARA BHAVANA”, yang mengandung arti, yaitu “kewajiban pemerintah adalah meningkatkan kemakmuran rakyat”. Di dalam segi lima sama sisi tersebut, terdapat pula lukisan-lukisan yang merupakan unsur-unsur lambang Kota Denpasar. Arti dari lambang Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Segi lima sama sisi
 - a) Dasarnya berbentuk segi lima sama sisi berarti bahwa dasar Negara Republik Indonesia adalah Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia.

- b) Warna dasar biru laut melambangkan keagungan.
- c) Garis pinggir berwarna putih melambangkan kesucian/budi luhur, dan warna hitam melambangkan kekuatan.

2. Padmasana Jagatnatha

- a) Melambangkan alam semesta tempat suci untuk pemujaan Ida Sanghyang Widhi Wasa.
- b) Jagatnatha dapat pula diartikan sebagai tempat pemerintahan atau penguasa. Jadi Jagatnatha dalam hal ini diartikan sebagai Denpasar merupakan pusat pemerintahan.
- c) Warna kuning emas pada Pura Jagadnatha melambangkan tempat suci untuk pemujaan Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

3. Keris

- a) Melambangkan jiwa/melintas keperwiraan yang lazim disebut jiwa keperwiraan.
- b) Keris juga melambangkan bahwa Kota Denpasar sebagai kota perjuangan.
- c) Warna hitam dalam keris melambangkan ketegasan.

4. Candi Bentar

- a) Melambangkan kebudayaan, yakni Kota Denpasar memiliki kebudayaan yang bersifat khas.
- b) Candi bentar juga diartikan sebagai pintu gerbangnya Provinsi Bali.

5. Tangga yang berjumlah tiga buah

Melambangkan bahwa konsep pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Denpasar selalu berlandaskan konsep *TRI KAYA PARISUDHA*.

6. Lingkaran bunga teratai yang jumlahnya 8 (delapan) helai melambangkan asta dala atau asta beratha.

7. Padi Kapas serta rantai (gelang) 2 (dua) melambangkan:

- a) Padi yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) buah melambangkan tanggal 27.
- b) Rantai (gelang) berjumlah dua buah melambangkan bulan dua (Februari).
- c) Kapas dengan bunga berjumlah 9 (Sembilan) buah dan daun dua helai melambangkan tahun 92. Dengan demikian, padi, kapas, serta rantai sebagai pengikat padi kapas melambangkan bahwa Kota Denpasar lahir pada tanggal 27 Februari 1992.

3.4 Visi dan Misi

Kota Denpasar yang dipimpin oleh Walikota sebagai pucuk pimpinan didalam melaksanakan roda pemerintahan merumuskan program-program pembangunan dan kebijakan-kebijakannya. Penyusunan program-program dan kebijakan-kebijakan tersebut dijabarkan dengan mengacu kepada visi dan misi yang disampaikan oleh pasangan calon yang terpilih menjadi

Walikota (Walikota dan Wakilnya). Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, visi dan misi ini mengarahkan pembangunan Kota Denpasar sebagai berikut.

3.4.1 Visi

Rumusan visi Kota Denpasar adalah “Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”. Konsep kota kreatif menitikberatkan pada Denpasar Kota Hidup, dimana kota hidup memberikan kesadaran dinamis terhadap sumber daya alam untuk menggugah inovasi, sumberdaya manusia untuk menggugah dinamika kultur dan sumber daya spiritual yang dapat menggugah kreasi aparatur. Kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreatifitas, baik penciptaan, pelestarian maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban dan keseimbangan sosial. Berbasis budaya pada gilirannya dapat memelihara keseimbangan kekuatan regulasi, kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini, Denpasar menjadi kota makmur, aman, jujur, dan unggul.

3.4.2 Misi

Relevan dengan rumusan visi tersebut di atas maka dirumuskan misi Kota Denpasar sebagai berikut.

- a) Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
- b) Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana.
- c) Kejujuran dan spirit Sewakadarma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
- d) Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
- e) Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

3.5 Sistem Pemerintahan

Terdapat 4 kecamatan di Kota Denpasar, yaitu: (1) Kecamatan Denpasar Selatan, (2) Kecamatan Denpasar Timur, (3) Kecamatan Denpasar Barat, dan (4) Kecamatan Denpasar Utara. Masing-masing kecamatan tersebut dipimpin oleh satu orang sebagai pucuk pimpinan yang bernama camat.

Secara fungsional dan struktural di masing-masing camat terbagi menjadi beberapa desa dinas/kelurahan, dan desa adat. Pucuk pimpinan di level desa dinas bernama perbekel atau kepala desa, sedangkan di level kelurahan bernama lurah dan di level desa adat bernama bendesa. Selanjutnya, di level desa secara fungsional dan struktural dibagi lagi menjadi banjar dinas dan banjar adat.

Dalam konteks ini, di Bali pada umumnya dan di Kota Denpasar khususnya di level pemerintahan di tingkat desa dan banjar telah terjadi pemisahan penanganan di bidang kedinasan dan bidang adat. Demikian pula, di level banjar, ada disebut banjar adat dan banjar dinas. Walaupun demikian, dalam menjalani kewajiban sehari-hari antara desa dinas dan desa adat serta antara banjar dinas dan banjar adat bersinergi, baik secara intern maupun ekstern. Jumlah desa/kelurahan di seluruh kecamatan yang ada di Kota Denpasar tidak mengalami perubahan dari tahun 2020-2024, yaitu sebanyak 43 desa/kelurahan dan data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan, 2020-2024

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Denpasar Selatan	10	10	10	10	10
Denpasar Timur	11	11	11	11	11
Denpasar Utara	11	11	11	11	11
Denpasar Barat	11	11	11	11	11
Denpasar	43	43	43	43	43

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2024

3.6 Kondisi Demografi

Peningkatan jumlah penduduk di Kota Denpasar pada tahun 2025 membawa berbagai dampak signifikan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kota. Berikut adalah beberapa dampak utama yang telah teridentifikasi:

1. Pencemaran lingkungan

Pertumbuhan penduduk yang pesat, terutama dari migrasi dengan tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, telah berkontribusi pada peningkatan pencemaran lingkungan. Perilaku seperti pembuangan limbah sembarangan menjadi salah satu penyebab utama. Data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Denpasar menunjukkan bahwa

volume sampah yang harus ditangani mencapai 1.500 m³ per hari.

2. Alih fungsi lahan

Meningkatnya kebutuhan akan pemukiman dan fasilitas lainnya akibat pertumbuhan penduduk menyebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi area terbangun. Hal ini mengancam keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan di Denpasar.

3. Kemacetan lalu lintas

Bertambahnya jumlah penduduk berimplikasi pada peningkatan jumlah kendaraan di jalan raya, yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Masalah ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kenyamanan dan efisiensi mobilitas warga.

4. Pengelolaan sampah

Dengan meningkatnya jumlah penduduk, volume sampah yang dihasilkan juga meningkat. Hal ini menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

5. Tantangan sosial dan ekonomi

Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menimbulkan berbagai tantangan sosial dan ekonomi, seperti peningkatan angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Pemerintah daerah perlu merancang kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Ditinjau dari jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin di tahun 2024, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki paling banyak berada di kelompok umur 25-29 tahun (30.500 jiwa), sedangkan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan paling banyak berada di kelompok umur 45-49 tahun (29.930 jiwa). Data pada Tabel 3.2 menunjukkan penduduk di Kota Denpasar mayoritas berada pada kategori produktif. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Denpasar pada tahun 2024 jika ditinjau dari jenis kelaminnya tidak menunjukkan perbedaan jumlah yang mencolok. Namun, dari perspektif gender, jumlahnya penduduk Kota Denpasar didominasi oleh jenis kelamin laki-laki.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024

Kelompok Umur <i>Age Groups</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	26,72	25,54	52,26
5-9	25,32	24,25	49,57
10-14	26,90	25,54	52,44
15-19	29,52	27,61	57,13
20-24	29,50	27,60	57,10
25-29	30,50	29,27	59,78
30-34	29,72	28,96	58,67
35-39	28,73	29,06	57,79
40-44	28,43	29,65	58,08
45-49	29,38	29,93	59,31
50-54	27,18	27,74	54,92
55-59	24,81	23,90	48,71
60-64	18,46	17,55	36,01
65-69	12,28	11,89	24,17
70-74	8,00	8,07	16,08
75+	6,24	7,32	13,55
Denpasar	381,68	373,88	755,57

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2025

3.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP) adalah indikator yang mengukur persentase perempuan yang

aktif dalam pasar tenaga kerja, baik sebagai pekerja maupun sebagai pencari kerja, dibandingkan dengan jumlah total perempuan dalam kelompok usia angkatan kerja (biasanya 15 tahun ke atas) (World Bank, 2021). TPAK Perempuan dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{TPAKP} = \frac{\text{Jumlah perempuan dalam angkatan kerja}}{\text{Jumlah total perempuan usia kerja}} \times 100\%$$

Angkatan kerja terdiri atas:

- o Pekerja (*employed*): perempuan yang bekerja, baik penuh waktu maupun paruh waktu.
- o Pencari kerja (*unemployed*): perempuan yang sedang mencari pekerjaan dan siap bekerja.

Bukan angkatan kerja mencakup perempuan yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan, seperti ibu rumah tangga penuh waktu, pelajar, dan penyandang disabilitas yang tidak dapat bekerja.

TPAKP dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik struktural maupun sosial-ekonomi:

a. Faktor Ekonomi

Ketika ekonomi tumbuh, permintaan tenaga kerja meningkat, yang dapat mendorong lebih banyak perempuan untuk bekerja. Negara dengan sektor jasa yang lebih besar cenderung

memiliki TPAKP lebih tinggi karena lebih banyak pekerjaan yang cocok untuk perempuan.

b. Faktor Sosial dan Budaya

Di beberapa negara, peran tradisional perempuan sebagai ibu rumah tangga membatasi partisipasi mereka dalam angkatan kerja. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan peluang perempuan mendapatkan pekerjaan.

c. Faktor Kebijakan dan Regulasi

Regulasi yang mendukung kesetaraan gender di tempat kerja (seperti cuti melahirkan, fleksibilitas kerja) dapat meningkatkan TPAKP. Ketersediaan penitipan anak dan sistem transportasi publik yang baik dapat mempermudah perempuan untuk bekerja.

Negara berkembang cenderung memiliki TPAKP lebih rendah karena hambatan sosial dan kurangnya akses ke peluang kerja yang layak. Indonesia memiliki TPAKP sekitar 53-55% lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mencapai sekitar 80%.

Jika TPAKP rendah maka akan mempengaruhi potensi ekonomi. Potensi ekonomi yang tidak optimal karena kurangnya keterlibatan perempuan dan ketimpangan gender dalam pendapatan dan kesejahteraan. Jika TPAKP tinggi maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena lebih banyak tenaga

kerja produktif dan terjadi peningkatan kesejahteraan rumah tangga karena adanya sumber pendapatan tambahan.

Ada beberapa cara meningkatkan TPAKP, diantaranya: meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan supaya perempuan lebih siap memasuki dunia kerja; mendorong kesetaraan upah dan perlindungan kerja supaya perempuan tidak mengalami diskriminasi di tempat kerja; meningkatkan akses ke jaringan dan modal usaha untuk mendukung perempuan yang ingin berwirausaha; menyediakan Infrastruktur sosial, seperti penitipan anak dan sistem transportasi yang lebih baik.

3.8 Indek Pemberdayaan Gender (IDG)

BPS mendefinisikan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik (<https://www.bps.go.id/subject/40/gender.html>). Dimensi ini mengandung tiga unsur penting yaitu perempuan di legislative, perempuan professional dan kontribusi perempuan dalam pendapatan keluarga.

Indikator pada IDG dapat dilihat dari 3 dimensi utama, diantaranya ada keterwakilan parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan. Keterwakilan parlemen dikategorikan sebagai sebuah arena politik dimana proses kebijakan yang dibuat berfokus pada gerakan perempuan

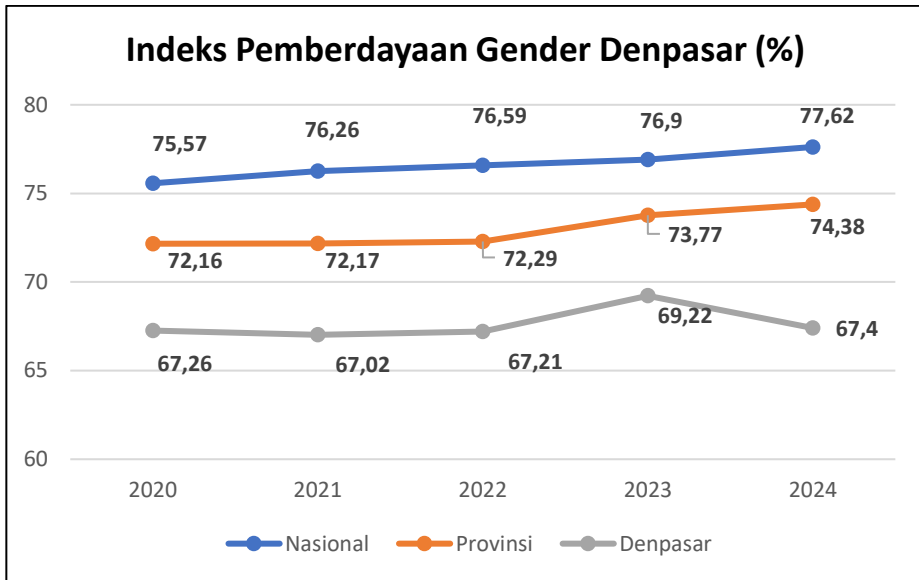
di dunia, selain menuntut hak dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan juga mendorong partisipasi keterwakilan perempuan dalam mengambil peran baik didalam partai politik di Indonesia untuk melakukan aktivitas *gatekeeping* terutama dalam candidacy perempuan seperti menjadi Dewan Perwakilan Rakyat baik di tingkat daerah maupun nasional (Adeni & Harahap, 2017; Mukarom, 2008; Rodiyah, 2013; Zaetun & Mariyah, 2020). Terlebih kondisi pada gelombang modernisasi yang kian menerpa seakan sangat mudah menenggelamkan orang-orang yang tidak siap dengan perkembangan zaman, mau tidak mau perempuan harus mengikutinya (Aspariyana, 2018). Jika dilihat dari aspek pengambilan keputusan, kondisi ini merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang mempunyai strategi dalam peningkatan serta pengembangan dari berbagai sektor, baik dari sektor ekonomi, budaya, sosial dan sebagainya. Hal ini diperuntukan untuk kaum gender di Indonesia agar keadilan dari berbagai aspek tersebut bisa dirasakan secara signifikan (Azizah, 2019; Rinawati et al., 2007; Sahban, 2016; Tuapattinaya & Hartati, 2014; Solina et al., 2021). Distribusi pendapatan akan berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD), partisipasi perempuan di dalam dunia pekerjaan baik sektor formal dan informal mendorong pengurangan tingkat pengangguran hingga kemiskinan (Adnan & Amri, 2020;

Amnesi, 2013), terutama perempuan yang memiliki *softskill* dan *hardskill* yang memberikan kontribusi terhadap industri usaha mikro, kecil, dan menengah atau disebut UMKM (Angin & Sukanto, 2014; Hamid et al., 2020; Sri, 2013; Syarif & Zainuddin, 2017). Namun demikian dari 3 dimensi tersebut, pemberdayaan gender juga harus mengidentifikasi dari strategi dan kebijakan pembangunan berbagai bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi dan harus didukung oleh peran serta dari seluruh lapisan masyarakat dengan mengutamakan kesetaraan gender.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 dipaparkan bahwa IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perempuan dalam suatu wilayah memiliki akses, peluang, dan kontrol atas sumber daya dan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. IDG mencerminkan tingkat pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan partisipasi politik. IDG menunjukkan keaktifan peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik dengan menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.

Data IDG Kota Denpasar dari tahun 2020-2023 masih berada dibawah IDG nasional dan Provinsi Bali. Kondisi ini

menunjukkan tingkat pemberdayaan perempuan di Kota Denpasar lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional maupun rata-rata Provinsi Bali. perempuan di Denpasar lebih sedikit yang menduduki posisi strategis dalam pemerintahan, parlemen, atau manajemen dibandingkan perempuan di wilayah lain secara umum. Implikasinya adalah pemerintah daerah perlu meningkatkan kebijakan pemberdayaan perempuan, termasuk dalam bidang pendidikan, kepemimpinan, pelatihan keterampilan kerja, dan kesetaraan kesempatan. Kesenjangan gender struktural di Denpasar perlu diperbaiki agar pembangunan lebih inklusif. Pada tahun 2024 IDG Kota Denpasar menurun menjadi 67,4% dan berada dibawah IDG nasional dan Provinsi Bali. Ini menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan perempuan di bidang strategis (politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan) di Kota Denpasar masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Bali maupun Indonesia secara nasional.



Gambar 3.4 Grafik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

3.9 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan terkait gender. Salah satu alat ukur untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dilakukan pemerintah terkait kesetaraan gender yaitu melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Sebaliknya, semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

IPG adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kesetaraan gender dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPG mencerminkan tingkat pencapaian gender dalam suatu wilayah atau negara. Semakin tinggi IPG, semakin tinggi pula tingkat kesetaraan gender. IPG dihitung berdasarkan dimensi umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta kehidupan layak yang terbagi menjadi laki-laki dan perempuan berdasarkan perhitungan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki.

IPG kota Denpasar dari tahun 2020-2024 memiliki nilai lebih tinggi diatas IPG nasional dan Provinsi Bali. IPG Kota Denpasar yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perempuan di Denpasar menikmati hasil pembangunan secara lebih setara dengan laki-laki, serta berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan perempuan di rata-rata nasional dan provinsi Bali.

Komitmen Kota Denpasar dalam mendorong kesetaraan gender tercermin dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan. Berikut beberapa bentuk nyata komitmen tersebut:

1. Kebijakan dan Regulasi

Pemerintah Kota Denpasar telah mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan, antara lain melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Ini memastikan bahwa program-program pemerintah mempertimbangkan kebutuhan dan peran laki-laki dan perempuan secara adil.

2. Peningkatan Partisipasi Perempuan

Denpasar mendorong keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat desa/kelurahan maupun kota. Pemerintah juga mendorong peningkatan jumlah perempuan dalam jabatan struktural di pemerintahan dan lembaga publik lainnya.

3. Penguatan Ekonomi Perempuan

Melalui program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, serta pembinaan UMKM yang dikelola oleh perempuan, Kota Denpasar membuka akses ekonomi yang lebih luas dan setara bagi perempuan.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Kota Denpasar memberikan perhatian pada akses pendidikan yang merata bagi anak laki-laki dan perempuan, serta menyelenggarakan pelatihan vokasi yang terbuka bagi semua gender untuk meningkatkan kualitas SDM secara inklusif.

5. Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

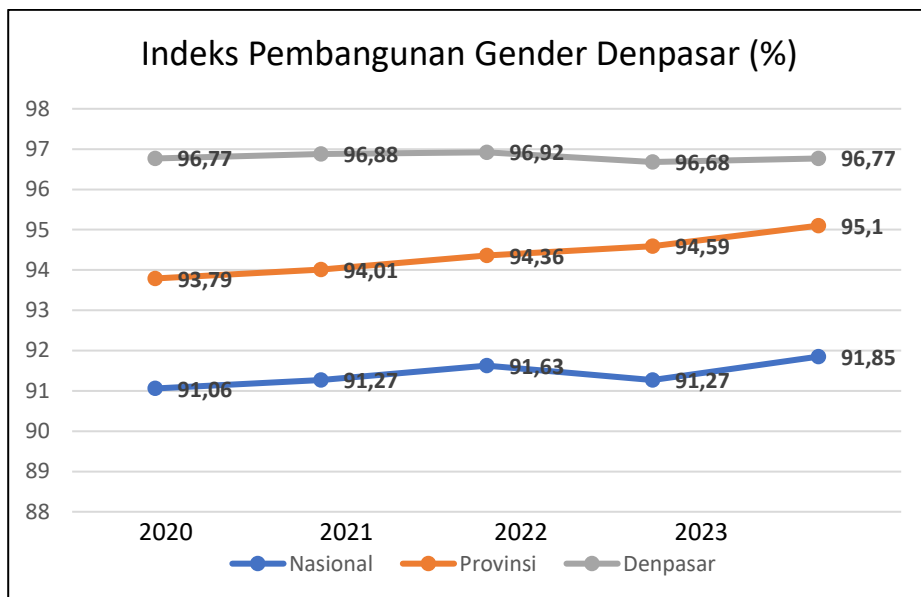
Dengan membentuk unit layanan seperti UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah), Denpasar berkomitmen melindungi hak perempuan dan anak dari kekerasan dan diskriminasi, serta memberikan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban.

6. Kerjasama dan Kolaborasi

Pemerintah Kota Denpasar bekerja sama dengan LSM, organisasi perempuan, akademisi, dan komunitas lokal untuk memperkuat advokasi dan pelaksanaan program-program kesetaraan gender.

7. Penghargaan dan Apresiasi

Denpasar secara aktif mengikuti program nasional seperti Anugerah Parahita Ekapraya, sebagai bentuk komitmen dan evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan pengarusutamaan gender.



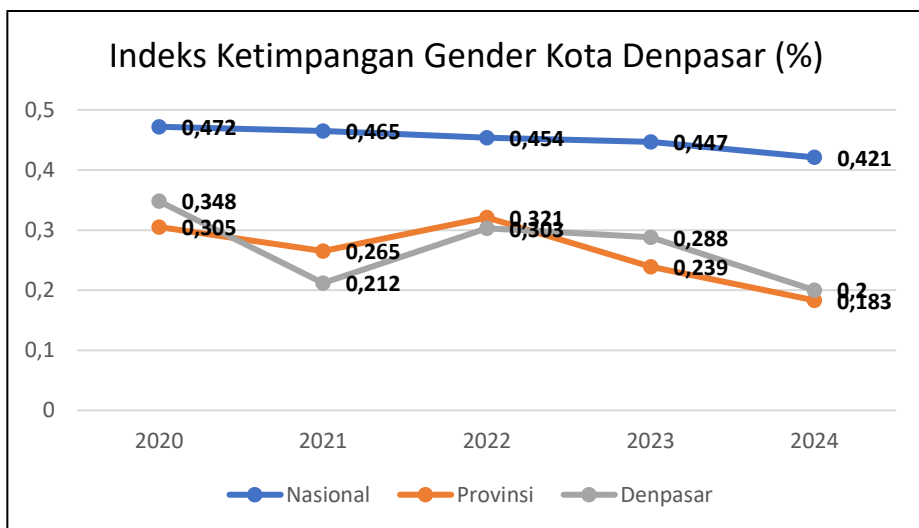
Gambar 3.5 Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

3.10 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indikator penilaian kesetaraan antar gender. Nilai IKG berkisar antara 0-1, di mana semakin tinggi nilai IKG menunjukkan semakin kecilnya kesetaraan gender antara penduduk laki-laki dan perempuan. Nilai IKG Kota Denpasar dari tahun 2020-2024 mengalami penurunan dan berada dibawah IKG nasional dan IKG Provinsi Bali. Pada tahun 2024 nilai IKG kota Denpasar sebesar 0,2% lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. IKG Kota Denpasar

yang lebih rendah dibandingkan IKG nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa Denpasar memiliki tingkat ketimpangan gender yang lebih kecil, sehingga kesetaraan gender di kota ini relatif lebih baik dan lebih merata.



Gambar 3.6 Grafik Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2020-2024

IKG Kota Denpasar pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,200, yang berarti terdapat ketimpangan gender sebesar 20% dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Bali yang berada di angka 0,183, namun masih menunjukkan kondisi yang relatif baik dibandingkan banyak

wilayah lain di Indonesia (https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mzk1IzI%3D/indeks-ketimpangan-gender-ikg-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html?utm_source=chatgpt.com).

Salah satu indikator kesehatan reproduksi adalah angka kematian ibu. Data dari Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2024 menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terjadi 14 kematian ibu dari 11.361 kelahiran hidup, menghasilkan AKI sebesar 123,2 per 100.000 kelahiran hidup. Untuk setiap 100.000 kelahiran hidup yang terjadi, terdapat sekitar 123 ibu yang meninggal dunia akibat penyebab yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, atau masa nifas (42 hari setelah melahirkan) (Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2024). Penyebab utama kematian ibu di Denpasar pada tahun 2024 meliputi kelainan jantung dan pembuluh darah, gangguan autoimun, hipertensi, serta perdarahan. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam sistem pelayanan kesehatan ibu, termasuk deteksi dini, penanganan komplikasi, dan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.

Ditinjau dari indikator pemberdayaan, keterwakilan perempuan dalam politik dari 45 anggota DPRD Kota Denpasar, hanya 4 orang (8,9%). Disamping itu terdapat keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu, seperti: Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 20 anggota, hanya 3 orang (15%); Panitia Pemungutan Suara (PPS) dimana keterlibatan

perempuan bervariasi antara 17% hingga 24% di berbagai kecamatan; Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD) dimana keterlibatan perempuan mencapai 48,84% (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar, 2024; NusaBali.com.,2024; DetikBali, 2024; Antara News, 2022; Warta Bali Online, 2024; Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2023; Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024).

Ditinjau dari partisipasi ekonomi, pada tahun 2023, TPAK Kota Denpasar mencapai 64,84% (BPS Provinsi Bali, 2024). Dari seluruh penduduk usia kerja di Kota Denpasar pada tahun 2023 ini, sebanyak 64,84% ikut serta dalam kegiatan ekonomi, baik bekerja maupun sedang mencari kerja. Sisa 35,16% tidak termasuk angkatan kerja, misalnya karena masih sekolah atau kuliah, mengurus rumah tangga, sudah pensiun, dan tidak ingin atau tidak mampu bekerja. Jika dilihat dari Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan di Kota Denpasar dari tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami peningkatan (41,51% di tahun 2023 menjadi 42,01% di tahun 2024) dan masih diatas persentase Provinsi Bali (<https://denpasarkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MT11Izl=/persentase-sumbangan-pendapatan-perempuan-di-kota-denpasar-dan-provinsi-bali.html>)

Persentase sumbangan pendapatan menunjukkan seberapa besar kontribusi kelompok tertentu terhadap total pendapatan. Perempuan di Kota Denpasar menyumbang 42,01%, artinya hampir separuh dari total pendapatan kota tersebut berasal dari perempuan, baik melalui pekerjaan formal, informal, usaha, maupun aktivitas ekonomi lainnya. Angka ini menunjukkan tingkat partisipasi ekonomi perempuan di Denpasar cukup tinggi. Kondisi ini dapat menjadi indikator kemandirian ekonomi perempuan dan tingkat kesetaraan gender dalam hal kontribusi pendapatan.

Kota Denpasar menunjukkan komitmen yang kuat dalam **mengatasi ketimpangan gender** melalui berbagai kebijakan, program, dan pendekatan kolaboratif yang menysasar kesetaraan di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai tindakan nyata yang dilakukan:

1. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pemerintah Kota Denpasar menerapkan prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Ini dilakukan melalui:

- Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), yaitu menyusun program pembangunan berdasarkan kebutuhan nyata laki-laki dan perempuan.
- Pelatihan PUG bagi aparatur pemerintah daerah.

2. Peningkatan Akses dan Partisipasi Perempuan

Denpasar mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam proses pembangunan, termasuk:

- Meningkatkan partisipasi perempuan dalam forum musyawarah desa dan perencanaan pembangunan.
- Memberikan ruang bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis di pemerintahan dan lembaga masyarakat.

3. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Upaya ini dilakukan melalui:

- Pelatihan keterampilan dan wirausaha bagi perempuan, khususnya ibu rumah tangga dan kelompok rentan.
- Fasilitasi akses modal usaha mikro melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- Dukungan pemasaran produk UMKM yang dikelola oleh perempuan melalui event seperti Denpasar Festival.

4. Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Kota Denpasar aktif dalam:

- Menangani kasus kekerasan berbasis gender melalui UPTD
- Membuka layanan pengaduan, pendampingan hukum dan psikologi bagi korban kekerasan.
- Mengadakan kampanye anti-kekerasan dan edukasi di sekolah-sekolah serta komunitas.

5. Pendidikan dan Sosialisasi Kesetaraan Gender

Denpasar memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai:

- Peran setara laki-laki dan perempuan di rumah, tempat kerja, dan masyarakat.
- Pentingnya kesetaraan akses pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki.
- Sosialisasi melalui media sosial, kegiatan komunitas, dan kurikulum pendidikan yang sensitif gender.

6. Kolaborasi dengan Berbagai Pihak

Tindakan ini diperkuat dengan:

- Kemitraan bersama LSM, akademisi, organisasi perempuan, dan tokoh masyarakat.
- Program kolaboratif seperti Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA)

7. Penghargaan dan Evaluasi

- Denpasar menerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian PPPA sebagai pengakuan atas keberhasilan pelaksanaan pengarusutamaan gender.
- Evaluasi rutin terhadap capaian gender di berbagai sektor pembangunan.

Tindakan Kota Denpasar tidak hanya simbolis, tetapi juga struktural dan berkelanjutan. Fokusnya adalah pada keadilan gender, yang berarti memberikan akses, kesempatan, dan perlakuan yang adil kepada semua gender sesuai kebutuhan mereka, untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan berdaya.

BAB IV

PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam konteks masyarakat modern, pendidikan memegang peranan krusial yakni sebagai wadah pengembangan diri individu berdasar pada keunikan potensi dan tujuan individu untuk menjadi manusia terbaik. Melalui implementasi pendidikan diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan sosial seperti kesenjangan, mencapai derajat kesetaraan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik. Secara konkret, esensi pendidikan tercurah pada tujuan pendidikan nasional di Indonesia yakni tujuan humaniora dan tujuan keilmuan. Tujuan humaniora meliputi mencapai bangsa yang beriman, bertakwa, berbudi luhur, mandiri, dan bertanggung jawab. Sedangkan tujuan keilmuan mengarah pada penguasaan pengetahuan serta kepemilikan keterampilan.

Pada tataran praktis, sistem pendidikan memiliki hubungan intim dengan sistem ekonomi. Perkembangan ekonomi akan mengembangkan struktur pendidikan, dan pendidikan dapat membekali para pekerja dengan skill memadai. Apabila sistem

pendidikan dapat berkembang dengan baik bahkan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, maka akan membawa kesempatan luas bagi mobilitas sosial masyarakat utamanya kelas bawah menuju kesejahteraan. Secara objektif mobilitas sosial dapat terjadi karena melalui pendidikan terjadi maksimalisasi pengembangan bakat sehingga terjadi pertumbuhan personal. Kondisi ini sejalan dengan empat pilar pendidikan dari UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) yakni belajar untuk tahu, belajar untuk terampil melakukan sesuatu, belajar menjadi seseorang, dan belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Dengan kata lain, perolehan pendidikan bagi individu tidak hanya berdampak pada dirinya melainkan kepada kualitas bangsa dan masyarakat luas.

Komitmen tinggi Indonesia atas pendidikan tertuang pada UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara bermakna baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak hingga dewasa, memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk berkesempatan secara setara memperoleh pendidikan. Ibu Kota Provinsi Bali, yakni Kota Denpasar berkomitmen penuh atas pengembangan kualitas manusia berbasis pendidikan. Komitmen terefleksi pada bagaimana meletakkan pendidikan sebagai salah satu program prioritas untuk mewujudkan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Untuk memonitor akses pemerataan

pembangunan pendidikan di Kota Denpasar akan disajikan berbagai data pada BAB IV ini seperti penggunaan indikator Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Khusus (APK).

4.1. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APM digunakan untuk mengetahui jumlah anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang sesuai. Dengan kata lain, semakin tinggi APM maka semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu.

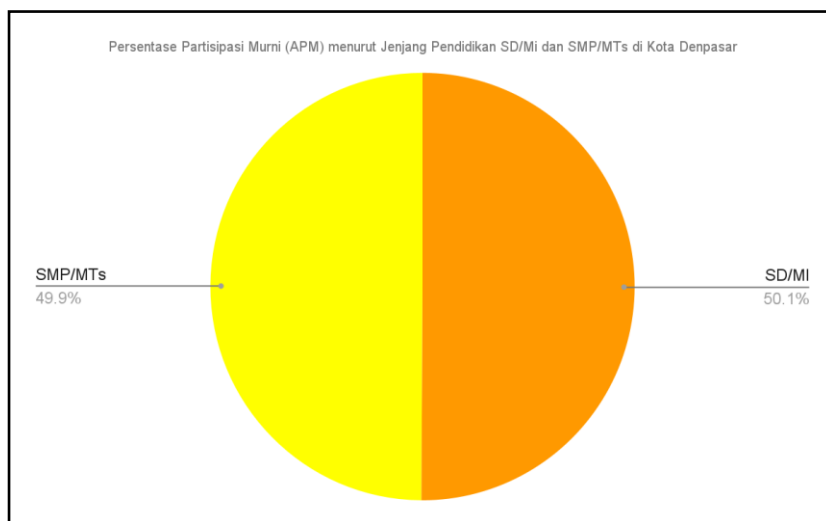
Kondisi APM di Kota Denpasar pada tahun 2024 dapat dilihat melalui Tabel 4.1. Perolehan data APM dari Dinas Pendidikan Kota Denpasar terbagi ke dalam dua tingkatan sekolah yaitu SD/MI dan SMP/MTS. Berdasarkan tabel 4.1. dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 rata-rata Angka Partisipasi Murni mencapai angka 97.45 persen, dengan rata-rata target sebesar 89 persen dan realisasi menyentuh angka 86.75 persen. Jenjang sekolah SD/MI menyentuh angka 97.62 persen, dengan target 97.5 persen dan realisasi 95.18 persen. Sedangkan pada jenjang SMP/MTS mencapai 97.29 persen dengan target 80.5 persen dan 78.32 persen. Apabila diperhatikan maka tingkatan sekolah SD/MI

mencapai persentase lebih besar dari pada tingkatan sekolah SMP/MTS.

Tabel 4.1. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar Tahun 2024.

Tingkatan Sekolah	Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Persentase (%)
SD/MI	97.5	95.18	97.62
SMP/MTs	80.5	78.32	97.29
Rata-rata	89.00	86.75	97.45

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2025



Gambar 4.1 Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang SMP/MTs dan SD/MI Pendidikan di Kota Denpasar Tahun 2024

Gambar 4.1. memberikan gambaran lebih jelas mengenai perbandingan persentase APM menurut jenjang SD/MI dan SMP/MTs pendidikan di Kota Denpasar tahun 2024. Berdasarkan perbandingan capaian APM tahun 2024, jenjang SD/MI sedikit lebih tinggi (50,1 persen) dibanding SMP/MTs (49,9 persen) jika dilihat dari total keseluruhan kontribusi kedua jenjang terhadap angka partisipasi murni. Jika dikontekstualisasikan APM berdasarkan jenjang SD berusia 7-12 tahun, maka sebesar 95.18 persen dari total jumlah anak berusia 7-12 tahun di Kota Denpasar terdata sedang menempuh pendidikan dasar sebagai siswa SD. Di lain sisi APM jenjang SMP berusia 13-15 tahun, maka sebesar 78.32 persen dari total jumlah anak berusia 13-15 tahun di Kota Denpasar terdata sedang menempuh pendidikan menengah sebagai siswa SMP.

Dapat dipahami melalui seluruh sajian data bahwa APM pada tahun 2024 relatif tinggi yakni menyentuh lebih dari 50 persen. Namun, perlu digaris bawahi bahwa masih terdapat anak yang tidak menempuh jenjang pendidikan sesuai usia mereka. Maka dari itu penting untuk menyelidiki lebih lanjut terkait penyebab atau berbagai faktor yang melatarbelakangi. Berbagai penelitian menunjukkan kendala APM kerap kali terletak pada kondisi ekonomi penduduk, kapasitas fiskal pemda, faktor geografi, ketersediaan layanan pendidikan (rasio jumlah anak usia 7-12 tahun per ruang kelas SD atau rasio jumlah anak usia 13-15

tahun per ruang kelas SMP) dan tingkat pendidikan penduduk (Berlian, 2011). Pemetaan atas kendala pembangunan pendidikan berupa tingkat APM akan menjadi pondasi bagi pemerintah Kota Denpasar menentukan langkah strategis menyusun kebijakan demi maksimalisasi APM pada tahun berikutnya.

4.2. Angka Partisipasi Kasar

Konsep Angka Partisipasi Kasar (APK) hadir guna mengetahui perbandingan jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Kondisi APK di Kota Denpasar pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.2. dan Gambar 4.2. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Denpasar, APK terbagi ke dalam dua kategori yakni SD/MI dan SMP/MTS. Tabel 4.2. menunjukkan rata-rata APK mencapai angka 100.50 persen dengan target rata-rata yakni 98.75 persen dan realisasi yakni 99.14 persen.

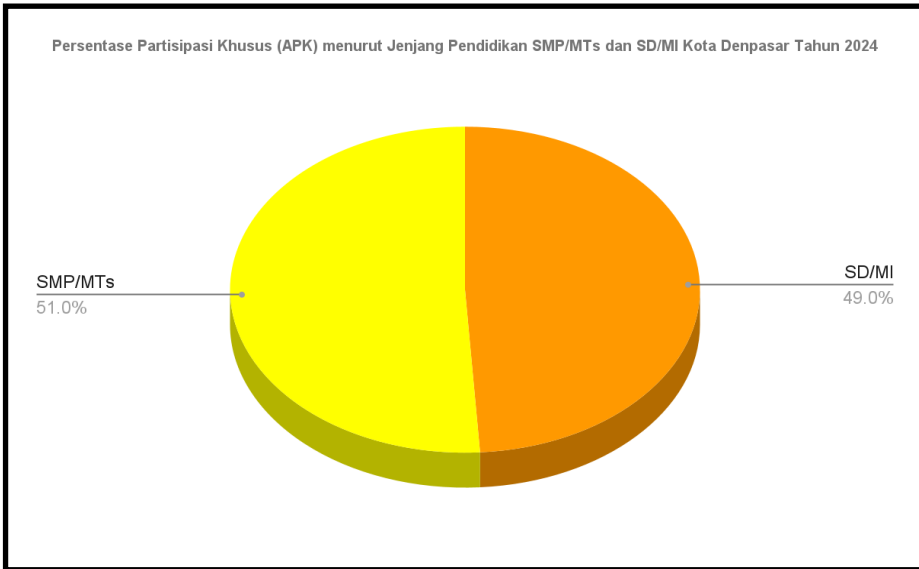
Kategori tingkatan SD/MI mencapai angka persentase sebesar 9 pada tahun 2024 rata-rata Angka Partisipasi Murni mencapai angka 97.45 persen, dengan rata-rata target sebesar 89 persen dan realisasi menyentuh angka 86.75 persen. 8.45 persen dengan target 104 persen dan realisasi 102.39 persen. Sedangkan tingkatan sekolah smp/mts mencapai angka

persentase sebesar 102.56 persen dengan target pada 93.5 persen dan realisasi 95.89 persen. Data di bawah menunjukkan perbandingan persentase APM pada dua tingkatan sekolah, di mana jenjang SMP memiliki persentase lebih tinggi (102.56 persend) dibandingkan dengan jenjang SD (98.45 persen). Tingginya nilai APK merujuk pada pemahaman bahwa telah terjadi peningkatan akses pendidikan, kesetaraan, dan kualitas hidup manusia.

**Tabel 4.2. Angka Partisipasi Khusus (APK) menurut
Jenjang Pendidikan Kota Denpasar Tahun 2024**

Tingkatan Sekolah	Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Persentase (%)
SD/MI	104	102.39	98.45
SMP/MTs	93.5	95.89	102.56
Rata-rata	98.75	99.14	100.50

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2025



Gambar 4.2 Persentase Angka Partisipasi Khusus (APK) menurut Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar Tahun 2024

Diagram di atas memberikan gambaran visual lebih konkret terkait perbandingan APK dari dua kategori tingkatan sekolah. Berdasarkan Gambar 4.2, jenjang SMP/MTs memiliki persentase lebih tinggi yakni 51 persen dibanding SD/MI yakni 49 persen jika dilihat dari total seluruh kontribusi kedua jenjang terhadap angka partisipasi kasar. Meskipun secara persentase jenjang SMP/MTS memiliki persentase lebih tinggi dibandingkan jenjang SD/MI, namun angka tersebut tidaklah signifikan.

Nilai APK tinggi yang melewati 100 persen selain memiliki makna bahwa tingkat partisipasi sekolah tinggi, juga

mengindikasikan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya, terkhusus pada APK jenjang SMP/MTS yakni 102.56 persen. Dalam konteks positif, ini berarti partisipasi sekolah di Kota Denpasar tinggi, namun terdapat persoalan terkait ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Secara sederhana, pada jenjang ini terdapat siswa yang bersekolah namun tidak pada usia ideal yang ditetapkan. Bertolak dari kondisi tersebut, penting untuk dikaji lebih lanjut mengenai faktor penyebab capaian persentase APK yang relatif tinggi guna mengatasi persoalan tersebut melalui kebijakan strategis yang relevan dan tepat sasaran.

4.3. Jumlah Siswa

Siswa atau peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu. Dalam proses belajar mengajar siswa berperan sebagai komponen pusat sekaligus objek penentu dan memiliki pengaruh dalam mencapai tujuan belajar berkualitas. Secara fundamental, siswa mengikuti proses belajar mengajar bertujuan untuk menuntut ilmu dan meraih cita-cita untuk mencapai potensi diri maksimal demi kesejahteraan hidup masa depan. Pada bagian

ini, penulis akan menjabarkan data mengenai jumlah siswa menurut jenjang pendidikan di Kota Denpasar.

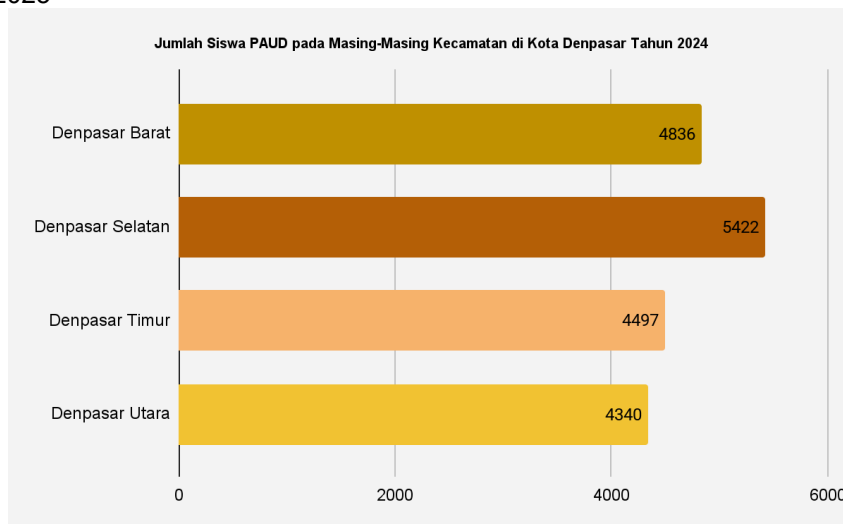
4.3.1. Siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini merupakan suatu proses tumbuh kembang anak usia lahir hingga enam tahun secara menyeluruh menyangkut seluruh aspek fisik dan non fisik, dengan memberikan stimulus bagi perkembangan jasmani, rohani, motorik, akal pikir emosional dan sosial guna tumbuh kembang optimal. Bradecamp & Copple (1993) menyatakan tujuan PAUD untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak dan menyeluruh sesuai norma dan nilai kehidupan yang dianut. Pada hakikatnya pendidikan pada PAUD mengutamakan bermain melalui belajar dan belajar melalui bermain dengan orientasi pada perkembangan dan pertumbuhan anak. Implementasi tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan pada anak untuk aktif, bebas, dan kreatif dalam melakukan berbagai kegiatan demi maksimalisasi perkembangan mereka.

Tabel 4.3. Jumlah Siswa PAUD Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024

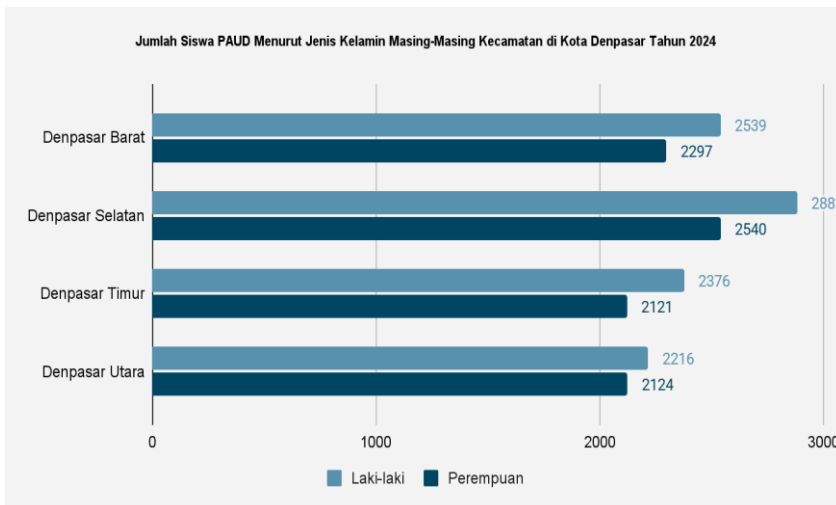
No	Kecamatan	Tahun 2024		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kec. Denpasar Barat	2.539	2.297	4.836
2	Kec. Denpasar Selatan	2.882	2.540	5.422
3	Kec. Denpasar Timur	2.376	2.121	4.497
4	Kec. Denpasar Utara	2.216	2.124	4.340
Jumlah		10.013	9.082	19.095

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2025



Gambar 4.3 Jumlah Siswa PAUD pada Masing-Masing Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2024

Data Dinas Pendidikan Kota Denpasar pada tahun 2024 menunjukkan bahwa total jumlah siswa PAUD menyentuh angka 19.095 siswa dengan komposisi 10.013 siswa laki-laki dan 9.082 perempuan. Berdasarkan empat kecamatan yang ada di Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan memiliki jumlah siswa PAUD tertinggi yakni 5.422 siswa. Setelah Kecamatan Denpasar Selatan, posisi kedua dan ketiga kecamatan dengan jumlah siswa PAUD tertinggi ialah Kecamatan Denpasar Barat dan Denpasar Timur yakni 4.836 siswa dan 4.497 siswa. Sedangkan Kecamatan Denpasar Utara menduduki peringkat terakhir dengan jumlah siswa PAUD yaitu 4.340 siswa.



Gambar 4.4 Jumlah Siswa PAUD Menurut Jenis Kelamin pada Masing-Masing Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2024

Apabila dilihat dari jenis kelamin, maka di seluruh kecamatan memiliki jumlah siswa PAUD berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, dari jumlah total yakni 10.013 siswa laki-laki dan 9.082 siswa perempuan. Kedua, berdasarkan masing-masing kecamatan dengan perbandingan data lebih tinggi siswa PAUD berjenis kelamin laki-laki (Gambar 4.4.). Berdasarkan Gambar 4.4., Kecamatan Denpasar Selatan memiliki jumlah siswa PAUD berjenis kelamin laki-laki tertinggi yakni 2.882 siswa. Disusul dengan Denpasar Barat, Denpasar Timur, dan Denpasar Utara secara berturut-turut yakni 2.539 siswa, 2.376 siswa, dan 2.216 siswa. Sedangkan jumlah siswa PAUD berjenis kelamin perempuan paling tinggi berada di Kecamatan Denpasar Selatan yakni 2.540 siswa dan terendah berada di Kecamatan Denpasar Utara yakni 2.124 siswa.

Perbedaan antara jumlah siswa laki-laki dan perempuan perlu menjadi perhatian lebih lanjut. Apabila alasan konkret dikarenakan semata-mata perbedaan komposisi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tentu bukan masalah serius. Namun, ketika latar belakang perbedaan jumlah siswa PAUD adalah akses pendidikan maka kondisi ini telah mengarah pada kesenjangan partisipasi pendidikan akibat ketimpangan gender. Mengingat, berbagai studi menunjukkan rendahnya partisipasi pendidikan perempuan akibat hambatan ekonomi, geografi, dan

khususnya kultural yang kerap mendiskreditkan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan karena domestifikasi perempuan (Margaret. dkk, 2021).

4.3.2. Siswa Sekolah Dasar (SD)

Paska pemberian pembelajaran landasan terkait dasar-dasar numerasi, literasi, dan pembentukan karakter di jenjang PAUD, anak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar. Pendidikan sekolah dasar (SD) merupakan jenjang dasar bagi siswa dalam menempuh pendidikan. Jenjang sekolah dasar berkapasitas untuk memberi kontribusi dalam membangun dasar pengetahuan siswa guna melanjutkan pendidikan jenjang menengah. Dasar pengetahuan menjadi acuan utama meliputi melek huruf dan kemampuan menghitung sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan sosial budaya. Peserta didik di jenjang SD secara umum biasanya berusia tujuh hingga 13 tahun. Berikut ini merupakan kondisi jumlah siswa SD menurut jenis kelamin.

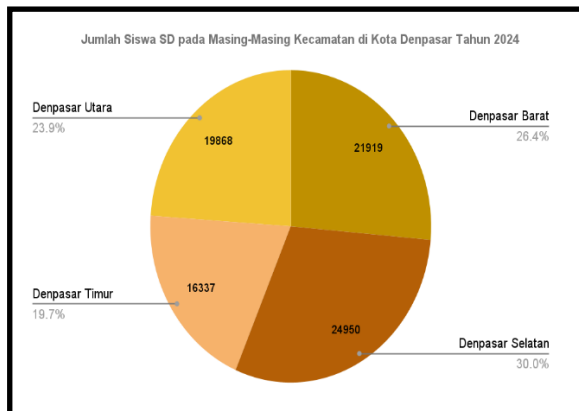
Berdasarkan Tabel 4.4., pada tahun 2024 jumlah siswa SD mencapai angka 83.074 siswa, di mana 42.820 siswa berjenis kelamin laki-laki dan 40.254 siswa berjenis kelamin perempuan. Seluruh siswa tersebut terbagi ke dalam empat kecamatan di Kota Denpasar. Kecamatan dengan jumlah siswa tertinggi berada di

Kecamatan Denpasar Selatan yakni 24.950 siswa dan terendah berada di Kecamatan Denpasar Timur yakni 16.337 siswa.

Tabel 4.4. Jumlah Siswa SD menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2024

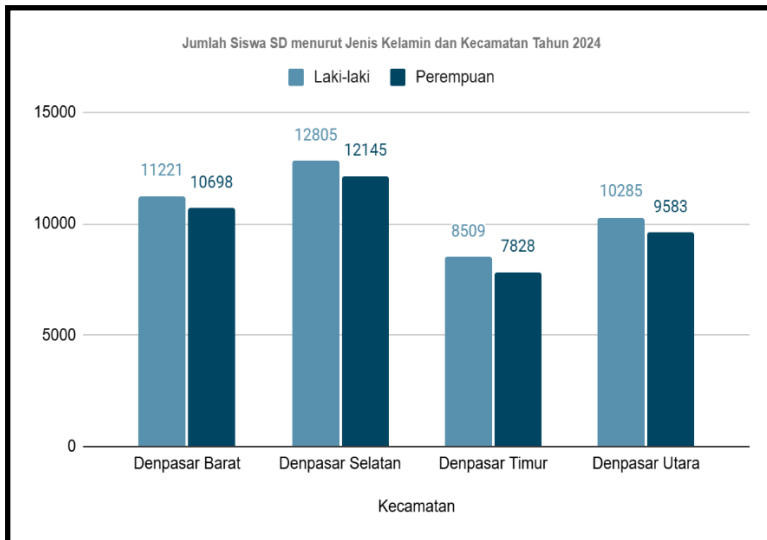
No	Kecamatan	Tahun 2024		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kec. Denpasar Barat	11.221	10.698	21.919
2	Kec. Denpasar Selatan	12.805	12.145	24.950
3	Kec. Denpasar Timur	8.509	7.828	16.337
4	Kec. Denpasar Utara	10.285	9.583	19.868
Jumlah		42.820	40.254	83.074

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2025



Gambar 4.5 Jumlah Siswa SD pada Masing-Masing Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2024

Gambar 4.5. memberikan visual lebih detail mengenai persentase jumlah siswa SD di Kota Denpasar pada tahun 2024. Berdasarkan gambar 4.5. dapat dilihat bahwa persentase tertinggi dimiliki oleh Kecamatan Denpasar Selatan yakni 30 persen atau setara dengan 24.950 siswa SD. Peringkat dua kecamatan dengan jumlah siswa SD tertinggi ialah Denpasar Barat yakni 26.4 persen atau setara dengan 21.919 siswa SD. Kemudian secara berturut-turut posisi tiga dan empat diduduki oleh Denpasar Utara dan Denpasar Timur yakni 23.9 persen dan 19.7 persen atau setara dengan 19.868 siswa SD dan 16.337 siswa SD.



Gambar 4.6 Jumlah Siswa SD menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2024 di Kota Denpasar Tahun 2024

Selain melihat sebaran data terkait jumlah total siswa SD berdasarkan jenis kelamin dan perbandingan empat kecamatan, data tersebut menyajikan perbedaan jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin dari masing-masing kecamatan. Pada Gambar 4.6. memperlihatkan secara jelas bahwa di seluruh kecamatan, jumlah siswa SD lebih didominasi oleh siswa dengan jenis kelamin laki-laki. Kecamatan dengan jumlah siswa laki-laki tertinggi berada di Denpasar Selatan yakni sejumlah 12.805 siswa sedangkan jumlah siswa laki-laki terendah berada di Denpasar Timur yakni 8509 siswa. Adapun kecamatan dengan jumlah siswa perempuan tertinggi berada di Denpasar Selatan sejumlah 12.145 siswa dan terendah berada di Denpasar Timur sejumlah 7.828 siswa.

Perbedaan jumlah siswa SD berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa siswa berjenis kelamin laki-laki lebih dominan daripada siswa perempuan. Bahkan tidak saja pada jumlah total, melainkan di masing-masing kecamatan data menunjukkan pola serupa. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus untuk mengetahui alasan utama perbedaan jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Sehingga apabila alasan di luar dari semata-mata perbedaan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, dapat ditangani dengan cepat dan tepat. Khususnya alasan seperti keterbatasan ekonomi, sosial-budaya yang masih

terlekat dengan sistem patriarki, atau alasan geografis yang sulit mengakses sekolah.

4.3.3. Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki peran kunci dalam perkembangan pendidikan dan pembentukan karakter siswa. Siswa menempuh pendidikan menengah pertama ketika telah dinyatakan lulus pada jenjang SD dan dalam rentang usia 13-15 tahun. Pada jenjang menengah pertama, siswa akan membangun pondasi pengetahuan dan keterampilan lebih luas. Beberapa diantaranya ialah pengembangan keterampilan akademik, pembentukan karakter, pemahaman minat dan bakat, persiapan masa depan khususnya karir, dan keterampilan sosialisasi. Upaya bangunan pondasi jenjang SMP pada siswa tentu memainkan peran penting dalam membentuk siswa dan mempersiapkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi serta kehidupan dewasa. Dengan kata lain, bekal selama jenjang Pendidikan SMP merupakan investasi dalam perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat karena pendidikan yang baik akan membantu menciptakan siswa berkualitas dan berpotensi dalam masyarakat.

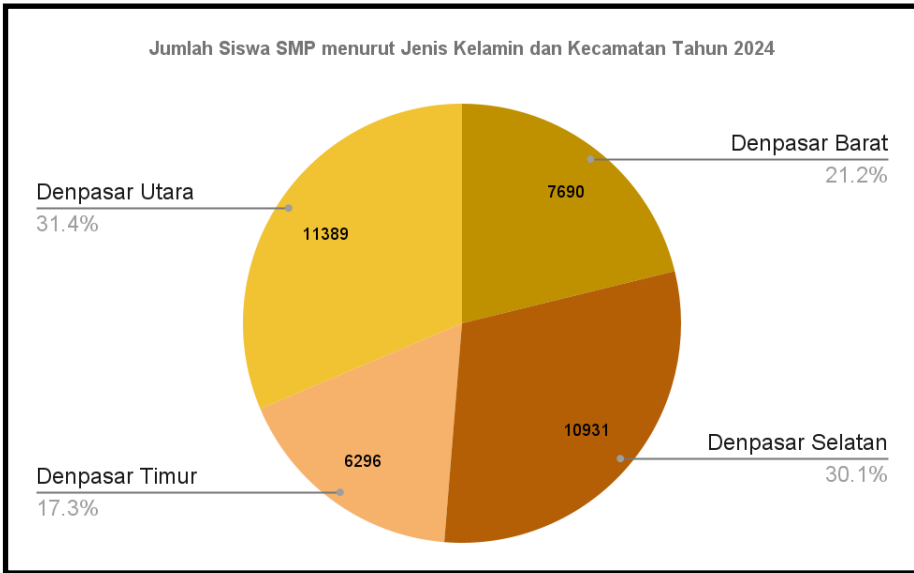
Di Indonesia, sejak pemberlakuan otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan SMP kini menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Dalam konteks Kota Denpasar,

berdasarkan Tabel 4.5., pada tahun 2024 jumlah siswa SMP mencapai angka 36.306 siswa, di mana 18.805 siswa berjenis kelamin laki-laki dan 17.501 siswa berjenis kelamin perempuan. Seluruh siswa tersebut terbagi ke dalam empat kecamatan di Kota Denpasar. Kecamatan dengan jumlah siswa tertinggi berada di Kecamatan Denpasar Utara yakni 11.389 siswa dan terendah berada di Kecamatan Denpasar Timur yakni 6.296 siswa.

Tabel 4.5. Jumlah Siswa SMP menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Tahun 2024		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kec. Denpasar Barat	4.036	3.654	7.690
2	Kec. Denpasar Selatan	5.701	5.230	10.931
3	Kec. Denpasar Timur	3.255	3.041	6.296
4	Kec. Denpasar Utara	5.813	5.576	11.389
Jumlah		18.805	17.501	36.306

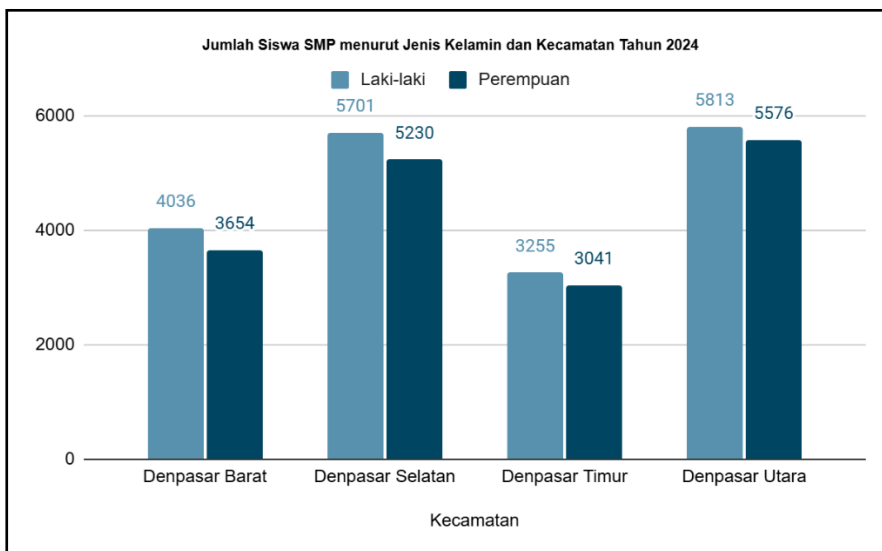
Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2025



Gambar 4.7 Jumlah Siswa SMP pada Masing-Masing Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2024

Gambar 4.7. memberikan visual lebih detail mengenai persentase jumlah siswa SMP di Kota Denpasar pada tahun 2024. Berdasarkan gambar 4.7. dapat dilihat bahwa persentase tertinggi dimiliki oleh Kecamatan Denpasar Utara yakni 31.4 persen atau setara dengan 11.389 siswa SMP. Peringkat dua kecamatan dengan jumlah siswa SMP tertinggi ialah Denpasar Selatan yakni 30.1 persen atau setara dengan 10.931 siswa SMP. Kemudian secara berturut-turut posisi tiga dan empat diduduki oleh Denpasar Barat dan Denpasar Timur yakni 21.2 persen dan 17.3 persen atau setara dengan 7.690 siswa SMP dan 6.296

siswa SMP. Selisih Persentase jumlah siswa tertinggi dan terendah diketahui sebanyak 14.1 persen



Gambar 4.8 Jumlah Siswa SMP menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2024

Selain melihat sebaran data terkait jumlah total siswa SMP berdasarkan jenis kelamin dan perbandingan empat kecamatan, data tersebut menyajikan perbedaan jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin dari masing-masing kecamatan. Pada Gambar 4.8. memperlihatkan secara jelas bahwa di seluruh kecamatan, jumlah siswa SMP lebih didominasi oleh siswa dengan jenis kelamin laki-laki. Kecamatan dengan jumlah siswa laki-laki tertinggi berada di Denpasar Utara yakni sejumlah 5.813 siswa sedangkan jumlah

siswa laki-laki terendah berada di Denpasar Timur yakni 3.255 siswa. Adapun kecamatan dengan jumlah siswa perempuan tertinggi berada di Denpasar Utara sejumlah 5.576 siswa dan terendah berada di Denpasar Timur sejumlah 3.041 siswa. Selisih siswa berdasarkan jenis kelamin di Denpasar Timur laki-laki lebih banyak sejumlah 184 siswa dari siswa perempuan.

Perbedaan jumlah siswa SMP berdasarkan jenis kelamin menunjukkan dominasi siswa laki-laki terhadap perempuan. Walaupun tidak signifikan, namun selisih 300 siswa tetap menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai faktor yang melatar belakangi dominasi ini, sehingga segera dapat diambil kebijakan yang tepat.

4.3.5. Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)

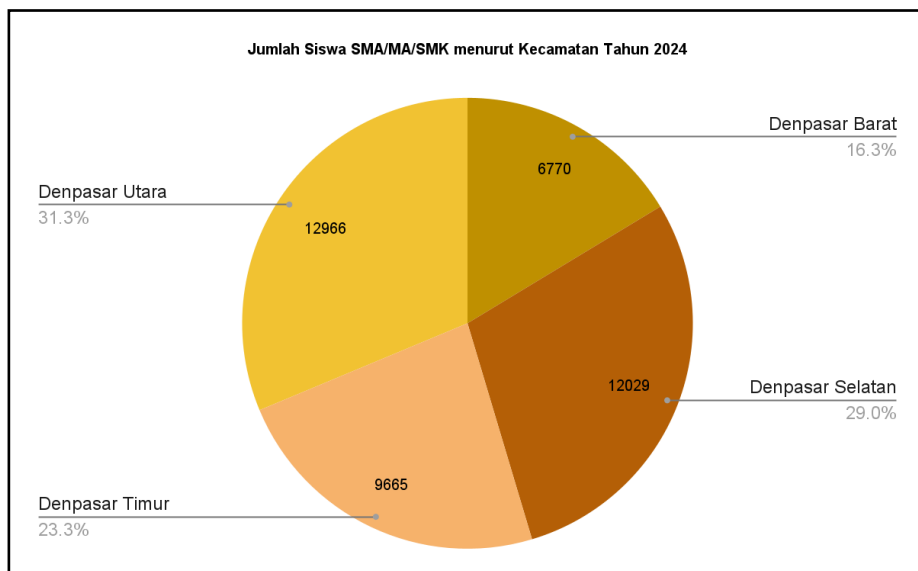
Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia. Dilaksanakan ketika siswa dinyatakan telah lulus dari sekolah menengah pertama (SMP). Kurikulum SMA dirancang untuk memberikan dasar pengetahuan kuat dalam berbagai bidang ilmu. Tujuannya adalah mempersiapkan siswa agar memiliki kemampuan analitis, berpikir kritis, dan dasar akademis yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Jenjang pendidikan ini dimulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Rentang usia siswa pada

jenjang menengah atas umumnya 15-18 tahun. Pada tahun pertama (kelas 10) siswa mendapatkan pelajaran umum. Kemudian pada tahun ke-2 (kelas 11) siswa akan diwajibkan untuk memilih peminatan terhadap beberapa kelompok mata pelajaran, dan berlanjut hingga tahun ke-3 (Kelas 12).

Tabel 4.6. Jumlah Siswa SMA/MA/SMK menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	TOTAL		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kec. Denpasar Barat	3.123	3.647	6.770
2	Kec. Denpasar Selatan	6.082	5.947	12.029
3	Kec. Denpasar Timur	5.258	4.407	9.665
4	Kec. Denpasar Utara	6.975	5.991	12.966
	Jumlah	21.438	19.992	41.430

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali, 2025

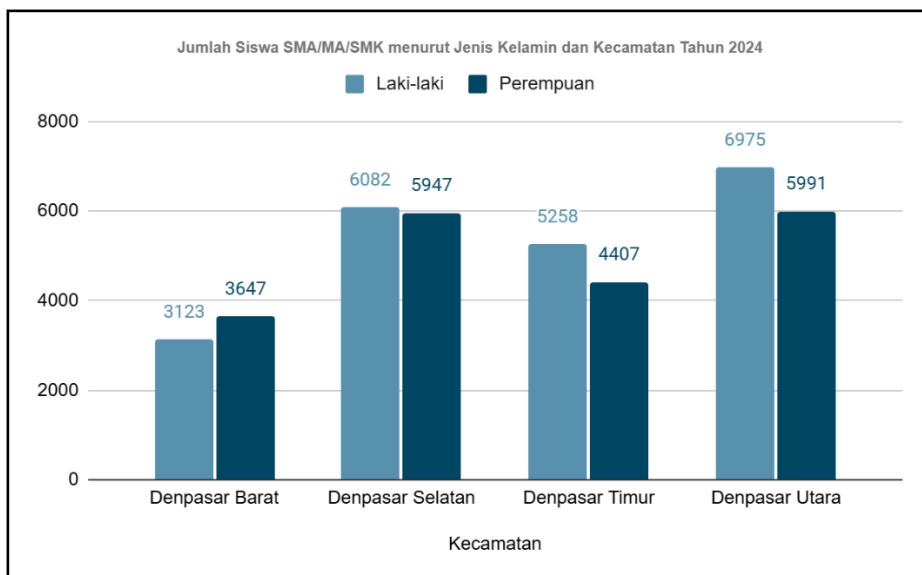


Gambar 4.9 Jumlah Siswa SMA/MA/SMK pada Masing-Masing Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2024

Data Dinas Pendidikan Kota Denpasar pada tahun 2024 menunjukkan bahwa total jumlah siswa SMA/MA/SMK menyentuh angka 41.430 siswa dengan komposisi 21.438 siswa laki-laki dan 19.992 perempuan. Berdasarkan empat kecamatan yang ada di Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Utara memiliki jumlah siswa SMA/MA/SMK tertinggi yakni 12.966 siswa. Setelah Kecamatan Denpasar Utara, posisi kedua dan ketiga kecamatan dengan jumlah siswa SMA/MA/SMK tertinggi ialah Kecamatan Denpasar Selatan dan Denpasar Timur yakni 12.029 siswa dan 9.665 siswa. Sedangkan Kecamatan Denpasar Barat menduduki

peringkat terakhir dengan jumlah siswa SMA/MA/SMK yaitu 6.770 siswa.

Jika diperhatikan berdasarkan persentase, Denpasar Utara memiliki siswa SMA/SMK paling banyak yaitu 31.3 persen dan terendah berada di Denpasar Barat yaitu 16.3 persen. Selisih dari dua kecamatan persentasenya 15 persen, sedangkan persentase yang tidak jauh beda dari Denpasar Utara adalah Denpasar Selatan sebanyak 29.0 persen dimana selisihnya hanya 2.3 persen.



Gambar 4.10 Jumlah Siswa SMA/MA/SMK menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2024

Apabila dilihat dari jenis kelamin, terdapat tiga kecamatan memiliki jumlah siswa SMA/MA/SMK berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, dari jumlah total yakni 21.438 siswa laki-laki dan 19.992 siswa perempuan. Kedua, berdasarkan masing-masing dari tiga kecamatan dengan perbandingan data lebih tinggi siswa SMA/MA/SMK berjenis kelamin laki-laki (Gambar 4.10). Berdasarkan Gambar 4.10., Kecamatan Denpasar Utara memiliki jumlah siswa SMA/MA/SMK berjenis kelamin laki-laki tertinggi yakni 6.975 siswa. Disusul dengan Denpasar Selatan, Denpasar Timur, dan Denpasar Barat secara berturut-turut yakni 6.083 siswa, 5.258 siswa, dan 3.123 siswa. Sedangkan jumlah siswa SMA/MA/SMK berjenis kelamin perempuan paling tinggi berada di Kecamatan Denpasar Utara yakni 5.991 siswa dan terendah berada di Kecamatan Denpasar Barat yakni 3.647 siswa namun data menarik ditemukan bahwa Kecamatan Denpasar Barat menjadi daerah dengan jumlah siswa perempuan lebih banyak dibandingkan dengan siswa laki-laki.

Tabel 4.7. menunjukkan perbedaan jumlah siswa berdasarkan jenjang pendidikan di Kota Denpasar tahun 2024. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Denpasar dan Dinas Pendidikan Provinsi Bali, total jumlah siswa dari tiga jenjang pendidikan mencapai angka 139.423 siswa dengan dominasi jenis kelamin laki-laki yaitu 71.107 siswa dan 68.316 lainnya

berjenis kelamin perempuan. Sejumlah 83.074 atau setara dengan 59.6 persen dari total jumlah siswa berada di jenjang Sekolah Dasar. 26 persen lainnya berada di jenjang pendidikan menengah pertama dan 14.4 persen sisanya berada di jenjang pendidikan menengah atas.

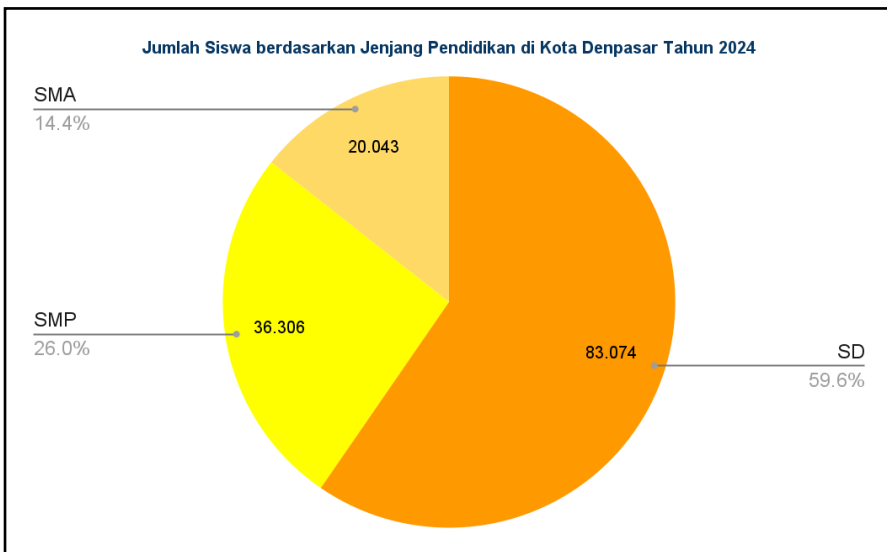
Tabel 4.7. Jumlah Siswa berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar, Tahun 2024

Tingkatan Sekolah	2024		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SD	42.820	40.254	83.074
SMP	18.805	17.501	36.306
SMA	9.482	10.561	20.043
Jumlah	71.107	68.316	139.423

Sumber : Disdikpora Kota Denpasar dan Provinsi Bali, 2025

Selain visualisasi pada Gambar 4.11. yang menitikberatkan pada persentase jumlah siswa berdasarkan tiga jenjang pendidikan, Gambar 4.12. memberikan gambaran konkret terkait sebaran siswa berdasarkan jenis kelamin. Dapat dilihat bahwa dua dari tiga jenjang pendidikan didominasi oleh siswa berjenis kelamin laki-laki yaitu pada jenjang SD dan SMP. Pada

jenjang SD, 42.820 dari 83.074 siswa berjenis kelamin laki-laki dan 40.254 sisanya adalah perempuan. Kemudian pada jenjang SMP 18.805 siswa berjenis kelamin laki-laki dan 17.501 siswa berjenis kelamin perempuan dari total 36.306 siswa. Berbeda dengan SD dan SMP, pada jenjang SMA, jumlah siswa perempuan lebih dominan yakni 10.561 siswa perempuan dan 9.482 siswa laki-laki dari total 20.043 siswa.

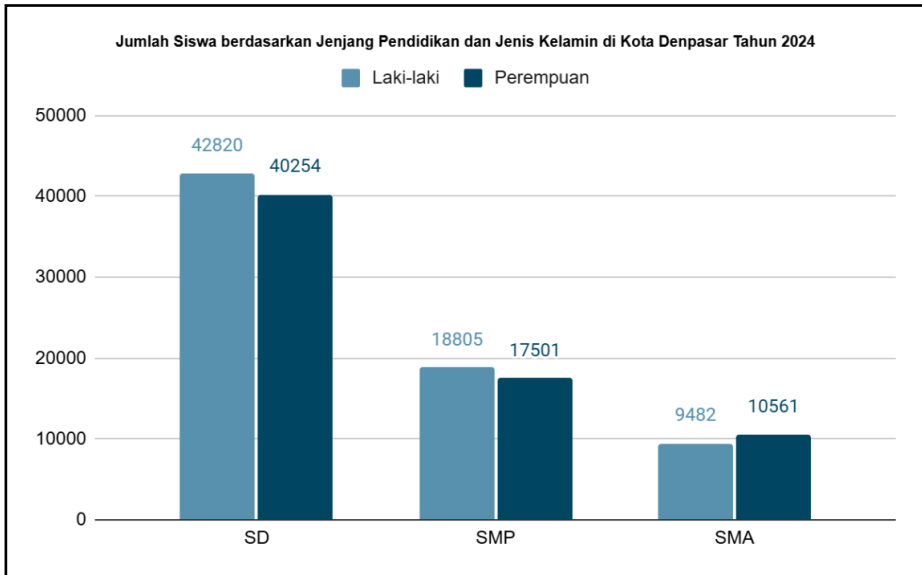


Gambar 4.11 Jumlah Siswa berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar Tahun 2024

Gambar 4.11. memberikan visualisasi konkret mengenai perbedaan jumlah siswa berdasarkan tiga jenjang pendidikan di Kota Denpasar. Jenjang SD memiliki jumlah siswa tertinggi atau setara dengan 59.6 persen. Kemudian disusul oleh jenjang

pendidikan SMP yakni 26 persen. Adapun jenjang SMA memiliki jumlah siswa terendah atau setara dengan 14.4 persen. Perbedaan ini tentu bukan persoalan apabila dilihat secara umum. Tetapi apabila melihat sebaran data berdasarkan jenis kelamin, ketiga jenjang ini memiliki pola serupa di mana siswa laki-laki berjumlah lebih banyak dibandingkan siswa perempuan. Tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat alasan lain di luar persoalan komposisi jumlah penduduk semata.

Berbagai studi mengungkapkan bahwa akses pendidikan terhadap perempuan dianggap tidak signifikan penting khususnya pada masyarakat patriarki. Konstruksi sosial budaya yang mensimplifikasi arena perempuan pada ranah domestik dianggap tidak memerlukan pendidikan formal karena berkaitan dengan karir di ranah publik. Kondisi ini tentu kerap membelenggu perempuan karena akses untuk keluar dari zona diskriminasi ditutup secara sistematis. Sehingga, untuk menghindari persoalan ini diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor perbedaan jumlah siswa dengan mensinkronisasi berbagai data terkait.



Gambar 4.12 Jumlah Siswa berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024

4.3.5. Siswa Putus Sekolah

Keadaan di mana siswa tidak dapat menyelesaikan program belajar sebelum waktunya selesai atau siswa tidak tamat menyelesaikan program belajar disebut putus sekolah. Putus sekolah merupakan permasalahan yang kerap terjadi di dunia pendidikan dan penting untuk dicegah karena berdampak secara mikro maupun makro. Farah (2014) menjabarkan bahwa implikasi dari anak putus sekolah melingkupi gangguan psikologis, sosial,

dan akademik seperti kurangnya wawasan, pengangguran, kenakalan remaja dan anak menjadi pengemis. Masalah ini sulit untuk dipecahkan penyebabnya dan sudah berakar, salah satunya adalah ekonomi. UNICEF mengungkapkan bahwa faktor ekonomi adalah alasan utama siswa putus sekolah. Selain itu, alasan seperti rasa malas, latar belakang pendidikan orang tua, dan ketidakharmonisan hubungan orang tua turut memberikan sumbangan atas keadaan putus sekolah pada anak.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Denpasar pada Tabel 4.8, jumlah siswa SD yang mengalami putus sekolah di Tahun 2024 adalah enam siswa. Fenomena putus sekolah tertinggi berada Kecamatan Denpasar Utara yaitu sejumlah tiga siswa, disusul Kecamatan Denpasar Selatan yaitu dua siswa, dan Kecamatan Denpasar Timur satu siswa. Sedangkan, di Kecamatan Denpasar Barat tidak tercatat satupun kasus putus sekolah.

Tabel 4.8. Jumlah Siswa SD/Mi yang Putus Sekolah berdasarkan Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Tahun 2024
1	Kec. Denpasar Barat	0
2	Kec. Denpasar Selatan	2
3	Kec. Denpasar Timur	1
4	Kec. Denpasar Utara	3
	Jumlah	6

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2025

Berbeda dengan data sekolah dasar, kasus siswa putus sekolah pada jenjang SMP/MTs sejumlah tiga siswa. Hal ini dapat dilihat melalui Tabel 4.9.. Masing-masing berada di Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Selatan, dan Denpasar Timur. Sedangkan tidak ada kasus putus sekolah tercatat di Denpasar Utara.

**Tabel 4.9. Jumlah Siswa SMP/MTs yang Putus Sekolah
berdasarkan Kecamatan Tahun 2024**

No	Kecamatan	Tahun 2024
1	Kec. Denpasar Barat	1
2	Kec. Denpasar Selatan	1
3	Kec. Denpasar Timur	1
4	Kec. Denpasar Utara	0
	Jumlah	3

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Denpasar, 2025

Pada Tabel 4.10. Jumlah Anak Umur 7-18 Tahun Yang Putus Sekolah di Kota Denpasar Tahun 2024 memperlihatkan bahwa terdapat sembilan kasus putus sekolah. Enam diantaranya pada jenjang Sekolah Dasar dan tiga lainnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama. Kasus tertinggi berada di Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Selatan dengan masing-masing tiga anak putus sekolah. Sedangkan di Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Barat masing-masing terdiri dari dua anak dan satu anak.

Tabel 4.10. Jumlah Anak Umur 7-18 Tahun Yang Putus Sekolah di Kota Denpasar Tahun 2024

No	Kecamatan	SD	SMP
1	Kec. Denpasar Utara	3	0
2	Kec. Denpasar Timur	1	1
3	Kec. Denpasar Selatan	2	1
4	Kec. Denpasar Barat	0	1
	Jumlah	6	3

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2025

Data mengenai anak putus sekolah secara kuantitatif menunjukkan angka relatif kecil. Namun, persoalan putus sekolah bukan persoalan data sedikit atau banyak melainkan kasus tersebut berarti tetap terjadi. Paling tidak ada sembilan anak yang harusnya mendapatkan hak pendidikan, tetapi terpaksa putus sekolah dengan berbagai alasan. Enam diantaranya mengalami putus sekolah pada jenjang sekolah dasar, artinya mereka bahkan tidak menyelesaikan standar pendidikan paling dasar. Hal ini tentu harus dikaji kembali, baik mengenai alasan pendorong beserta implikasi kehidupan yang sedang dan akan mereka jalani kedepannya. Urgensi kajian mendalam berkaitan dengan strategi menghadapi kehidupan mendatang. Jika alasan ekonomi,

geografis, sosial budaya, pemerintah dan stakeholder segera dengan sigap mengambil sikap untuk memastikan hak pendidikan anak dapat diberikan kembali. Namun, apabila alasan kesehatan sehingga sama sekali tidak memungkinkan anak untuk melanjutkan sekolah, penting untuk memastikan kualitas dari *caregiver* anak. Sayangnya, data tidak menunjukkan perbedaan berdasarkan jenis kelamin sehingga tidak memungkinkan untuk analisis secara gender.

4.4. Sekolah

Lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan dalam rangka membantu para siswa untuk mengembangkan potensi secara optimal adalah sekolah. Potensi dalam konteks ini meliputi aspek moral-spiritual, intelektual, emosional, sosial, maupun fisik-motorik. Dalyono (2010) menegaskan bahwa lingkungan sekolah adalah kesatuan ruang dalam lembaga pendidikan formal yang memberikan pengaruh pembentukan sikap dan pengembangan potensi siswa. Bertolak dari peran krusial lembaga pendidikan formal, maka penting untuk meletakkan perhatian pada sarana/prasarana sekolah termasuk bangunan sekolah. Ketersediaan sarana terutama gedung sekolah wajib untuk diperhitungkan guna terlaksananya proses pendidikan.

Data Dinas Pendidikan Kota Denpasar dan Dinas Pendidikan Provinsi Bali pada Tabel 4.11. tentang Jumlah Sekolah di Kota Denpasar Tahun 2024 menunjukkan jumlah sekolah ada di angka 804 sekolah. Di mana, jumlah terbesar berada pada jenjang TK sejumlah 294 sekolah, disusul oleh SD sejumlah 262 sekolah, dan SLTP sejumlah 91 sekolah. Adapun tiga jenjang pendidikan dengan total sekolah terendah ialah TPA dengan 15 sekolah, SMK dengan total 35 sekolah, dan SLTA dengan 41 sekolah.

Tabel 4.11. Jumlah Sekolah di Kota Denpasar Tahun 2024

Pendidikan	2024
TK	294
PAUD	66
TPA	15
SD/Sederajat	262
SLTP/Sederajat	91
SLTA/Sederajat	41
SMK	35
Jumlah	804

Sumber : Disdikpora Kota Denpasar dan Provinsi Bali, 2025

4.5. Guru

Guru merupakan fasilitator utama dengan tugas menggali, mengembangkan, dan mengoptimalkan potensi murid agar menjadi bagian dari masyarakat beretika (Karwati & Priansa,

2014). Dalam pendidikan formal, guru diartikan sebagai pendidik profesional dengan tiga fungsi tugas utama yaitu tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas kemasyarakatan. Tugas dalam bidang profesi berarti guru bertugas untuk mendidik, mengajar, dan melatih siswa. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan siswa.

Pada konteks tugas bidang kemanusiaan, berarti guru harus menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua bagi para siswanya. Sedangkan pada konteks bidang kemasyarakatan berarti guru menempati posisi terhormat di masyarakat berkaitan dengan tugas dan kapabilitas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan kata lain, eksistensi guru baik secara kuantitas maupun kualitas sangat menentukan keberhasilan atas pendidikan.

Selain kapasitas personal, komposisi antara jumlah guru dan tenaga pendidik menjadi penting untuk mencapai hasil pendidikan berkualitas. Disparitas ini berdampak pada persoalan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar seperti guru mengajar dengan jumlah jam melebihi kewajiban, guru harus mengajar mata pelajaran di luar bidang keahlian, dan lain-lain. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Denpasar pada Tabel 4.12. tentang Jumlah Guru SD menurut Jenjang Pendidikan dan

Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 berjumlah 4.175 guru SD. Berdasarkan jumlah tersebut, 75 persen atau setara dengan 3.126 guru didominasi oleh guru berjenis kelamin perempuan. Dari seluruh total guru SD, terbagi ke dalam empat jenjang pendidikan yakni SMA, Diploma 1/2/3, S1, dan S2 serta tersebar di empat kecamatan.

Apabila dilihat dari masing-masing jenjang, guru SD dengan jenjang pendidikan S1 memiliki jumlah tertinggi yakni 3.892 guru, di mana 961 guru berjenis kelamin laki-laki dan 2.931 guru berjenis kelamin perempuan. Guru SD dengan jenjang pendidikan Diploma 1/2/3 memiliki jumlah terendah yaitu 33 guru dengan komposisi 25 guru berjenis kelamin perempuan dan delapan diantaranya berjenis kelamin laki-laki. Komposisi guru SD jika dilihat berdasarkan jenis kelamin dari empat jenjang memperlihatkan dominasi guru perempuan lebih dari 50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender khususnya perempuan terhadap akses pekerjaan profesional tenaga pendidik maupun akses pendidikan tinggi sudah sangat baik.

Tabel 4.12. Jumlah Guru SD menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024

Kecamatan	Jenjang Pendidikan											
	SMA			Dip 1/2/3			S1			S2		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Denpasar Utara	13	18	31	3	7	10	207	702	909	13	22	35
Denpasar Timur	4	13	17	2	7	9	191	576	767	9	25	34
Denpasar Selatan	7	19	26	2	6	8	312	873	1185	11	15	26
Denpasar Barat	5	1	6	1	5	6	251	780	1031	18	57	75
Jumlah	29	51	80	8	25	33	961	2931	3892	51	119	170
Total L	1049											
Total P	3126											
Total L+P	4175											

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2025

Signifikansi dominasi jumlah guru perempuan dibandingkan laki-laki tentu bukan hanya data tanpa makna. Secara umum kondisi dominan guru perempuan terjadi di berbagai daerah khususnya pendidikan dasar karena berbagai alasan yang melatarbelakangi. Akbar (2022) memaparkan beberapa faktor dominasi guru perempuan di jenjang pendidikan dasar karena stereotipe di masyarakat seperti budaya atau paradigma bahwa mendidik adalah urusan perempuan. Selain itu dalam mendidik dibutuhkan ketelitian, ketelatenan, dan kesabaran untuk mendidik sehingga dianggap jauh dari karakteristik laki-laki. Dalam beberapa kasus, ketika terdapat guru sekolah dasar laki-laki kerap dipertanyakan “laki-laki sejatinya”.

Alasan krusial lain keengganan laki-laki menjadi guru sekolah dasar berkaitan dengan upah yang relatif kecil sehingga mengharuskan untuk memilih pekerjaan lain demi menafkahi keluarga. Untuk mengetahui relevansi studi Akbar dengan data di atas, tentu diperlukan kajian lebih lanjut.

4.6. Kepala Sekolah

Kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam memengaruhi komponen sekolah agar dapat bekerja dalam mencapai tujuan bersama. Kepala sekolah menjadi pimpinan tunggal di sekolah dengan kewenangan mengatur, mengelola, dan menyelenggarakan kegiatan di sekolah. Bertolak dari peran vital tersebut, maka penting untuk memastikan kualitas dari kepemimpinan kepala sekolah. Paling tidak terdapat empat kategori pokok kepemimpinan ideal bagi kepala sekolah.

Pertama, kepribadian positif seperti ramah, periang, bersemangat, murah hati, percaya diri, tegas, mentalitas kuat dan kepekaan sosial tinggi. Kedua, pemahaman dan penguasaan terhadap tujuan pendidikan seperti mengembangkan sekolah dan merumuskan program fiskal sekolah bersama stakeholder demi mewujudkan tujuan sekolah. Ketiga, pengetahuan berkaitan dengan kemampuan mumpuni dalam bidang ilmu pengetahuan,

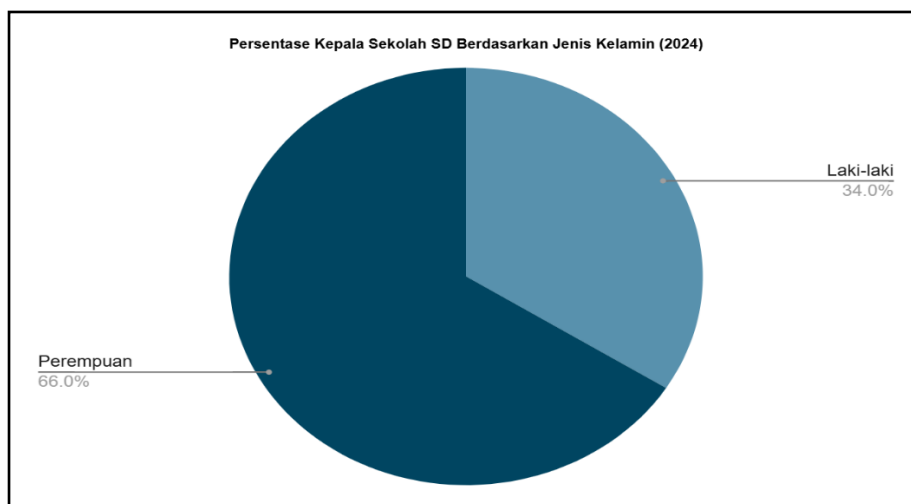
teknologi, dan seni. Keempat, ketarampilan profesional berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi-fungsi administrasi pendidikan.

Peran sentral kepala sekolah terhadap maju atau mundurnya sebuah sekolah mengakibatkan penting untuk terus mengevaluasi kinerja pucuk pimpinan tersebut. Berdasarkan data 4.13 tentang jumlah kepala sekolah SD menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin di Kota Denpasar tahun 2024, dapat disoroti melalui dua kategori menarik, yaitu jenjang pendidikan dan jenis kelamin. Jumlah total kepala sekolah SD pada tahun 2024 mencapai 262 kepala sekolah. 66 persen atau setara dengan 173 kepala sekolah diantaranya adalah perempuan. Jika diperhatikan berdasarkan tiga kategori jenjang pendidikan, kualitas kepala sekolah di Denpasar sangat baik sebab tidak ada di bawah jenjang S1. Kepala sekolah dengan jumlah tertinggi berada pada jenjang pendidikan S1, terdapat total 199 kepala sekolah dengan 129 diantaranya adalah perempuan dan 70 lainnya laki-laki. Sedangkan pada jenjang pendidikan lebih tinggi dari S1 berjumlah 63 kepala sekolah dimana 70 persen atau setara dengan 44 kepala sekolah berjenis kelamin perempuan dan 30 persen atau setara dengan 19 kepala sekolah berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 4.13. Jumlah Kepala Sekolah SD menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024

Jenjang Pendidikan	Tahun 2024	
	Laki-laki	Perempuan
<S1	0	0
S1	70	129
>S1	19	44
Jumlah	89	173

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2025



Gambar 4.13 Persentase Kepala Sekolah SD Berdasarkan Jenis Kelamin (2024)

Gambar 4.13 secara visual lebih konkret memberikan gambaran mengenai perbandingan jumlah persentase kepala sekolah SD berdasarkan jenis kelamin. Sejalan dengan dominasi guru SD seperti sub bab sebelumnya, dominasi kepala sekolah SD perempuan juga erat kaitannya dengan stereotipe serupa. Hal ini mengingat usia siswa SD berada di kisaran 7-13 tahun atau dalam klasifikasi usia anak-anak dan transisi remaja. Sehingga pendekatan ideal yakni kesabaran, ketelitian, dan ketelatenan dalam membentuk karakter anak dilekatkan pada perempuan.

Berbeda dengan Tabel 4.13, Tabel 4.14 memberikan sajian data mengenai jumlah kepala sekolah SMP menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin di Kota Denpasar tahun 2024. Tabel 4.14 menyertakan jumlah kepala sekolah berdasarkan kategori jenjang pendidikan dan jenis kelamin. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Denpasar, jumlah kepala sekolah SMP menyentuh angka 91 kepala sekolah, didominasi oleh laki-laki yakni sejumlah 51 kepala sekolah atau setara dengan 56 persen. Sedangkan, kepala sekolah perempuan hanya berjumlah 40 orang atau setara dengan 44 persen.

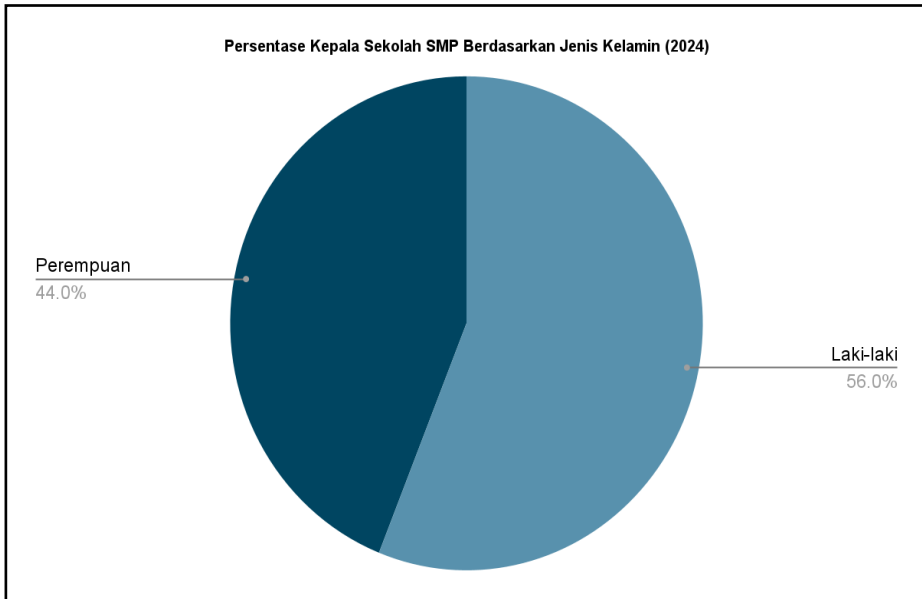
Apabila dilihat berdasarkan jenjang pendidikan, maka jumlah terendah berada pada jenjang pendidikan kurang dari S1 karena tidak ada sama sekali kepala sekolah dengan jenjang pendidikan kurang dari S1. Sedangkan, jumlah kepala sekolah tertinggi berada pada jenjang pendidikan S1 yaitu 48 kepala

sekolah atau setara 52 persen dari total jumlah kepala sekolah. Dari jumlah 48 tersebut, 28 diantaranya atau setara dengan 58 persen adalah laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Sedangkan untuk jenjang pendidikan lebih tinggi dari S1 berjumlah 43 kepala sekolah. Dominasi laki-laki pada jenjang pendidikan lebih tinggi dari S1 turut terjadi sejumlah 53 persen atau setara dengan 23 kepala sekolah.

Tabel 4.14. Jumlah Kepala Sekolah SMP menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024.

Jenjang Pendidikan	Tahun 2024	
	Laki-laki	Perempuan
<S1	0	0
S1	28	20
>S1	23	20
Jumlah	51	40

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2025



**Gambar 4.14 Persentase Kepala Sekolah SMP
Berdasarkan Jenis Kelamin (2024)**

Gambar 4.14. memberikan bayangan konkret mengenai perbandingan persentase jumlah kepala sekolah SMP berdasarkan jenis kelamin. Berbeda dengan perbandingan pada kepala sekolah SD, dominasi pada jenjang ini terletak pada kepala sekolah laki-laki. Apabila dikontekstualisasi dengan studi Akbar (2022), menjadi relevan sebab pada masa SMP, usia siswa berada di kisaran 13-15 tahun atau pada masa remaja. Sehingga, pembentukan karakter dasar telah terlewati dan siswa bukan lagi kategori anak-anak yang membutuhkan pendekatan “ke-ibu”an.

Hal ini menjadikan penguatan pemahaman bahwa stereotipe atas perempuan masih sangat kuat karena struktur patriarki yang berkuasa.

4.7. Guru yang Tersertifikasi

Guru merupakan faktor inti dalam memacu kualitas pendidikan, sehingga peningkatan kualitas profesi guru adalah sebuah keniscayaan. Pendidik profesional memiliki seperangkat kompetensi yang dipersyaratkan untuk menopang tugas dan fungsinya sebagai pendidik. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menekankan bahwa guru adalah sebuah profesi, sama seperti profesi lainnya. Untuk mewujudkan guru sebagai profesi, melalui Permendiknas No 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan untuk mengatur kompetensi yang harus dimilikinya. Sehingga, profesionalitas guru dapat diukur salah satunya melalui kepemilikan sertifikat profesi.

Sertifikasi bukanlah “hadiah” bagi guru untuk sekedar memperoleh pendapatan lebih besar, tetapi sebuah pengakuan atas profesi mereka. Pengakuan tersebut berupa simbol dari kapasitas, perilaku, dan karya-karya profesinya. Jika sertifikasi berfungsi demikian, maka semakin banyak guru yang bersertifikat, semakin cepat pula mutu pendidikan meningkat secara terukur. Pada Tabel 4.15 merupakan data bersumber dari Dinas Pendidikan Kota Denpasar mengenai Jumlah Guru SD

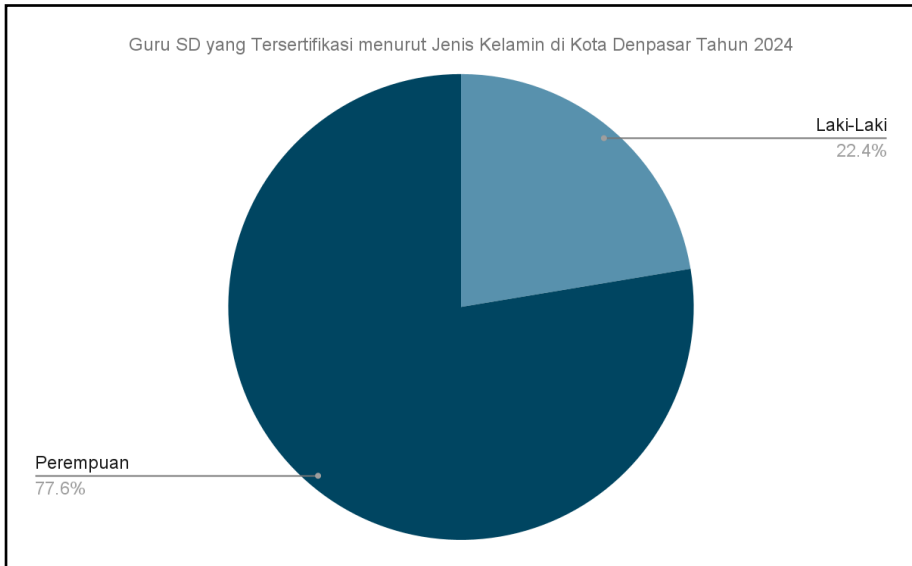
yang Tersertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar. Total jumlah guru SD tersertifikasi berjumlah 1.783 guru berdasarkan 21 klasifikasi bidang studi. Apabila ditelisik berdasarkan jenis kelamin, maka jumlah guru tersertifikasi didominasi oleh guru berjenis kelamin perempuan yaitu 1.384 guru atau setara dengan 77 persen. Sedangkan guru tersertifikasi berjenis kelamin laki-laki berjumlah tiga kali lebih sedikit dibandingkan guru perempuan yakni hanya 399 guru.

Apabila dilihat berdasarkan bidang studi, maka tiga bidang studi dengan guru tersertifikasi paling tinggi adalah Guru Kelas SD, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, dan Pendidikan Agama Hindu. Guru Kelas SD berjumlah 1.367 guru dengan 1.120 diantaranya berjenis kelamin perempuan dan 247 lainnya berjenis kelamin laki-laki. Bidang studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan berjumlah 132 guru dengan dominasi dari guru laki-laki yaitu 91 guru dan 41 lainnya guru perempuan. Sedangkan, pada Pendidikan Agama Hindu berjumlah 97 guru, di mana 82 guru perempuan dan 15 guru laki-laki. Adapun bidang studi tanpa guru tersertifikasi ialah ekonomi, matematika, bimbingan dan konseling, dan pendidikan kewarganegaraan.

Tabel 4.15. Jumlah Guru SD yang Tersertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024

Bidang Studi Sertifikasi	Tahun 2024	
	Laki-laki	Perempuan
Bahasa dan Sastra Bali	12	36
Bahasa Inggris	3	20
Bahasa Jepang	1	0
Bimbingan dan Konseling (Konselor)	0	8
Ekonomi	0	0
Guru Kelas SD/MI	247	1120
Kependidikan Dasar	2	9
Kewirausahaan	0	0
Lainnya	0	0
Matematika	6	16
Muatan Lokal Bahasa Daerah	4	10
Pendidikan Agama Budha	2	2
Pendidikan Agama Hindu	15	82
Pendidikan Agama Islam	15	33
Pendidikan Agama Katolik	1	1
Pendidikan Agama Kong hu chu	0	3
Pendidikan Agama Kristen	0	2
Bimbingan dan Konseling (Konselor)	0	0
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	91	41
Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn)	0	0
Seni Budaya	0	1
Jumlah	399	1384

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2025



Gambar 4.15 Persentase Guru SD yang Tersertifikasi Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024

Gambar 4.15 memberikan visual konkret mengenai perbandingan jumlah guru SD tersertifikasi dengan didominasi sebesar 77 persen oleh guru perempuan. Selain data guru SD tersertifikasi, Kota Denpasar melalui Dinas Pendidikan turut memiliki data guru SMP tersertifikasi pada tahun 2024. Berdasarkan Tabel 4.16. Jumlah Guru SMP yang Tersertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024, terdapat 26 bidang studi sertifikasi dengan total jumlah guru mencapai 731 guru. Dari total jumlah tersebut, di dominasi oleh guru perempuan dengan total jumlah 473 guru dan 258 lainnya adalah guru laki-

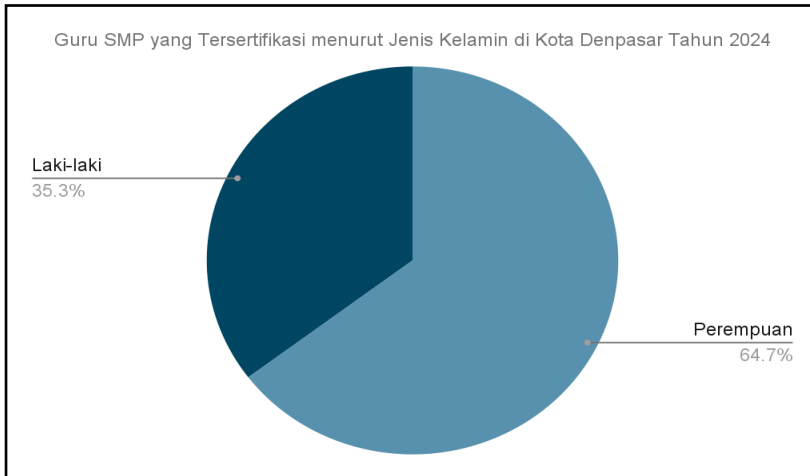
laki. Apabila ditelisik berdasarkan bidang studi, maka tiga bidang dengan jumlah guru tersertifikasi tertinggi adalah matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam. menariknya, dominasi guru perempuan terjadi pada ketiga ranah tersebut.

Bidang studi dengan jumlah guru tersertifikasi adalah matematika yakni 99 guru tersertifikasi. 56 dari total 99 guru tersebut adalah perempuan dan 43 lainnya laki-laki. Bahasa Inggris menduduki posisi kedua bidang studi dengan guru tersertifikasi terbanyak yakni sejumlah 96 guru. Dari total 96 guru, 77 diantaranya berjenis kelamin perempuan dan 19 lainnya laki-laki. Pada posisi ketiga ditempati oleh bidang studi IPA dengan total 85 guru, 54 diantaranya adalah perempuan dan 31 lainnya laki-laki. Adapun bidang studi dengan jumlah guru tersertifikasi paling rendah adalah Agama Budha yakni 0 guru.

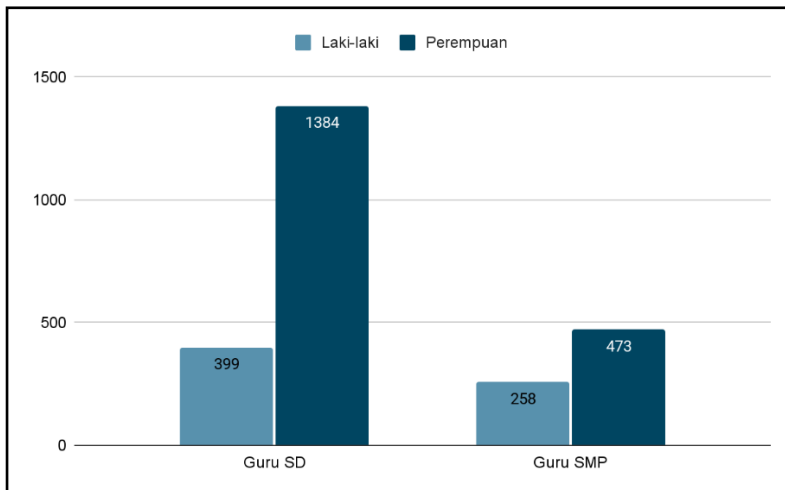
Tabel 4.16. Jumlah Guru SMP yang Tersertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024

Bidang Studi Sertifikasi	Tahun 2024	
	Laki-laki	Perempuan
Bahasa Bali	7	9
Bahasa Indonesia	23	55
Bahasa Inggris	19	77
Bahasa Prancis	0	2
Bimbingan dan Konseling (Konselor)	7	27
Fisika	1	5
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	31	54
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	17	42
Keterampilan	0	3
KKPI	1	0
Matematika	43	5
Muatan Lokal Bahasa Daerah	11	16
Pendidikan Agama Budha	0	0
Pendidikan Agama Hindu	8	18
Pendidikan Agama Islam	9	5
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	23	44
Pendidikan Agama Katholik	0	1
Pendidikan Agama Kong hu chu	0	3
Pendidikan Agama Kristen Protestan	0	1
Pendidikan Biologi	1	5
Pendidikan Ekonomi	1	5
Pendidikan Jasmani (OR dan kesehatan)	36	11
Sejarah	0	1
Seni Budaya	16	28
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	4	5
Lainnya	0	0
Jumlah	258	473

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2025



Gambar 4.16 Persentase Guru SMP yang Tersertifikasi Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024



Gambar 4.17 Perbandingan Guru SD dan SMP yang Tersertifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024

Berdasarkan gambar 4.18 dapat dilihat jumlah guru tersertifikasi di Kota Denpasar tahun 2024 lebih dominan pada jenjang SD. Guru SD yang tersertifikasi berjumlah 1.783 guru sedangkan guru SMP yang tersertifikasi 731 guru. Dengan kata lain, 60 persen dari total guru tersertifikasi adalah guru SD. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka baik dominasi guru perempuan sangat jelas kentara di dua jenjang tersebut.

Berdasarkan Tabel 4.17 tentang Jumlah Guru SMA yang Tersertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024, terdapat 510 guru dengan 309 guru berjenis kelamin perempuan dan 201 sisanya adalah laki-laki. Berdasarkan 26 bidang studi, tiga bidang studi dengan jumlah guru tersertifikasi paling tinggi ialah matematika, bahasa inggris, dan fisika. Bidang studi matematika memiliki 65 guru tersertifikasi, dengan 39 guru perempuan dan 26 guru laki-laki. Pada bidang studi Bahasa Inggris terdapat total 50 guru, dengan komposisi 35 guru perempuan dan 15 guru laki-laki. Bidang studi dengan guru tersertifikasi tertinggi ketiga adalah Fisika yakni 40 guru, di mana guru perempuan berjumlah 18 orang dan 22 guru laki-laki. Sedangkan untuk bidang studi Keterampilan, KKPI, Pendidikan Agama Katholik, dan Pendidikan Agama Protestan, belum memiliki satupun guru tersertifikasi.

Tabel 4.17. Jumlah Guru SMA yang Tersertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024

Bidang Studi Sertifikasi	Tahun 2024	
	Laki-laki	Perempuan
Bahasa Bali	2	7
Bahasa Indonesia	8	22
Bahasa Inggris	15	35
Bahasa Prancis	1	0
Bimbingan dan Konseling (Konselor)	7	12
Fisika	22	18
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	1	2
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	2	0
Keterampilan	0	0
KKPI	0	0
Matematika	26	39
Muatan Lokal Bahasa Daerah	0	1
Pendidikan Agama Budha	1	1
Pendidikan Agama Hindu	4	8
Pendidikan Agama Islam	2	2
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	5	6
Pendidikan Agama Katholik	0	0
Pendidikan Agama Kong hu chu	0	1
Pendidikan Agama Kristen Protestan	0	0
Pendidikan Biologi	10	29
Pendidikan Ekonomi	5	23
Pendidikan Jasmani (OR dan kesehatan)	16	2
Sejarah	9	12
Seni Budaya	13	10
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	7	9
Lainnya	46	71
Jumlah	201	309

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali, 2025

Berdasarkan tiga jenjang pendidikan di atas, sertifikasi guru terbanyak berada pada jenjang SD, kemudian disusul oleh SMP, dan paling rendah adalah SMA. Dari setiap jenjang dapat diperhatikan bahwa dominasi perempuan terjadi di setiap jenjang. Dalam konteks gender, dapat dikatakan bahwa akses terhadap pengakuan profesi khususnya guru telah terealisasi dengan baik. Walaupun demikian, sertifikasi guru memiliki segenap persoalan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa bidang studi dari tiga jenjang yang sama sekali tidak memiliki guru tersertifikasi.

BAB V

KESEHATAN

World Health Organization (WHO) mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan individu hidup produktif dalam masyarakat. Kesehatan juga menjadi salah satu komponen utama dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), selain pendidikan dan pendapatan. Tubuh yang sehat merupakan fondasi bagi kemampuan individu untuk beraktivitas secara optimal. Standar kesehatan yang belum ideal dianggap sebagai ketidakseriusan pemerintah, pada akhirnya mampu mengikis kepercayaan publik. Maka dari itu, pemantauan data statistik kesehatan menjadi hal yang sangat penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan penguatan *human capital*, dimulai sejak dalam kandungan hingga sepanjang kehidupan.

Kondisi geografis dan sosial Indonesia yang beragam menimbulkan tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jumlah penduduk yang tinggi, ketimpangan akses pangan, dan perbedaan budaya menjadi faktor penyebab kesenjangan layanan kesehatan. Di wilayah pedalaman, akses terhadap fasilitas kesehatan masih terbatas,

menyebabkan tingginya kasus ibu hamil berisiko, kematian bayi, hingga malnutrisi. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesehatan harus dimulai sejak dini, yakni sejak masa kehamilan dan kelahiran.

Kelahiran menjadi fase awal kehidupan manusia, di mana seseorang resmi dianggap sebagai individu dengan usia 0 tahun pada hari dilahirkan. Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini akan diawali dengan data terkait kelahiran bayi, sebagai langkah awal dalam memahami kondisi kesehatan masyarakat secara umum dan dilanjutkan penyajian data imunisasi, fasilitas kesehatan maupun aspek dalam perhatian indikator kesehatan di Kota Denpasar. Pemerintah secara konsisten memantau *trend* kasus yang terjadi agar mampu mengambil kebijakan yang tepat sasaran.

5.1 Angka Kelahiran Bayi

Angka kelahiran bayi merupakan ukuran demografi yang menunjukkan banyaknya bayi dilahirkan hidup dalam periode tertentu, salah satu indikator yang umum digunakan adalah Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate/CBR*), yaitu jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu per 1.000 penduduk di pertengahan tahun. Di Kota Denpasar, pendataan jumlah kelahiran bayi dilakukan setiap tahun berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Denpasar dimana data kelahiran juga diklasifikasikan

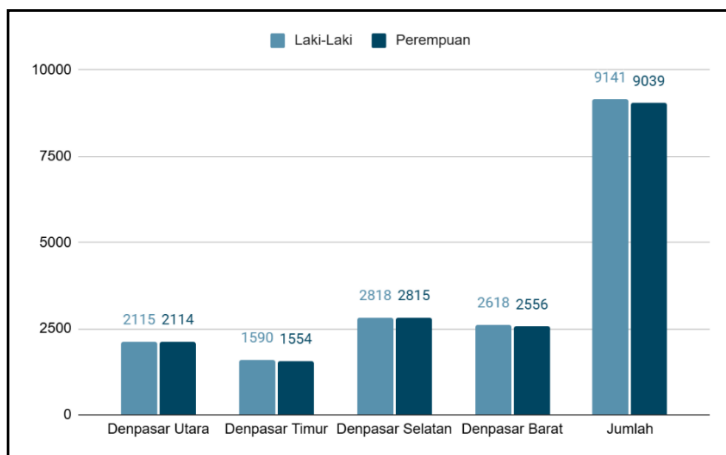
berdasarkan kecamatan (Denpasar Barat, Denpasar Timur, Denpasar Selatan, dan Denpasar Utara) serta jenis kelamin bayi (laki-laki dan perempuan). Klasifikasi ini penting untuk mengetahui sebaran kelahiran secara lebih rinci dan sebagai dasar perencanaan pelayanan kesehatan yang tepat sasaran di setiap wilayah seperti tabel 5.1 dibawah.

**Tabel 5.1. Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar
Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun
2023 dan 2024**

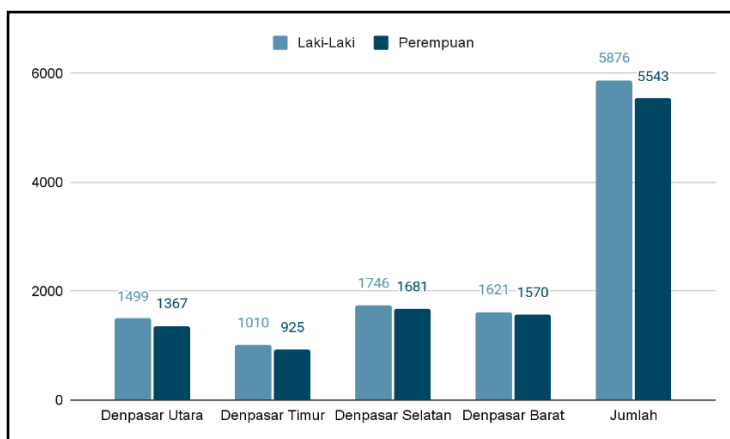
No.	Kecamatan	2023		2024	
		L	P	L	P
1.	Denpasar Utara	2115	2114	1499	1367
2.	Denpasar Timur	1590	1554	1010	925
3.	Denpasar Selatan	2818	2815	1746	1681
4.	Denpasar Barat	2618	2556	1621	1570
Jumlah		9141	9039	5876	5543

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2025

Tabel 5.1. tentang Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar berdasarkan jenis kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan terjadinya penurunan. Gambar 5.1. dan 5.2. di bawah menunjukkan jumlah angka kelahiran bayi di Kota Denpasar pada tahun 2023 dan 2024 dalam bentuk grafik.



Gambar 5.1. Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023



Gambar 5.2. Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Dari tabel dan grafik di atas, data kuantitatif menunjukkan bahwa secara akumulatif kelahiran bayi laki-laki dan perempuan pada tahun 2023 berjumlah 18.180 jiwa mengalami penurunan di tahun berikutnya menjadi 11.419 jiwa atau terjadi penurunan jumlah kelahiran sebesar 37,2 persen. Penurunan kelahiran pada tahun 2024 terbanyak terjadi pada bayi perempuan yang menurun sebesar 38,68 persen dan kelahiran bayi berjenis kelamin laki-laki juga menurun sebesar 35,72 persen.

Melalui Tabel 5.1. juga dapat dilihat kelahiran terendah pada tahun 2024 berturut-turut terjadi di Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Utara, Denpasar Barat dan Denpasar Selatan memiliki jumlah kelahiran yang paling tinggi. Jumlah kelahiran bayi di Kecamatan Denpasar Timur pada tahun 2024 yaitu sebanyak 1.935 bayi menurun sebesar 38,45 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan di Kecamatan Denpasar Selatan yang memiliki jumlah kelahiran bayi tertinggi pada tahun 2024 yaitu sebanyak 3.427 bayi (menurun 2.206 atau sebesar 39,15 persen) dibandingkan dengan tahun 2023 dan sebagai kecamatan yang mengalami penurunan angka kelahiran tertinggi dari tahun sebelumnya.

Penurunan angka kelahiran pada tahun 2024 terjadi secara signifikan. Data tersebut sejalan dengan studi World Fertility Report (2024) di mana rata-rata angka kelahiran global menurun drastis yakni 2,2 kelahiran per perempuan pada tahun 2024, dari

sebelumnya yakni 4,8 kelahiran per perempuan. Alasan penurunan angka kelahiran tentu beragam baik faktor eksternal maupun internal. Pertama, alasan sosial-ekonomi di mana kebutuhan hidup terus meningkat mulai dari pendidikan, kesehatan, perumahan, pengasuhan anak, dan sebagainya. Kedua, meningkatnya akses terhadap kontrasepsi sehingga kehamilan tidak direncanakan dapat dicegah. Kompleksitas kehidupan bahkan menjadikan tren childfree merebak di tengah masyarakat, karena masyarakat beranggapan lebih baik kualitas daripada kuantitas. Walaupun demikian, untuk mengetahui alasan di balik penurunan angka kelahiran bayi di Kota Denpasar tentu memerlukan studi lebih lanjut.

5.2. Jumlah Angka Kelahiran Balita di Kota Denpasar berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023 dan 2024

Balita adalah fase manusia sebagai anak pada rentang usia 12 - 59 bulan. Kesehatan bayi dan balita sangat perlu diperhatikan karena menjadi masa emas pada anak-anak dimana periode ini ditandai dengan pertumbuhan otak, fisik, dan keterampilan kognitif yang berkembang pesat. Upaya kesehatan sangat ditentukan oleh nutrisi yang diberikan meliputi bagaimana pelaksanaan rujukan, gizi, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, rehabilitas, imunisasi maupun perawatan jangka

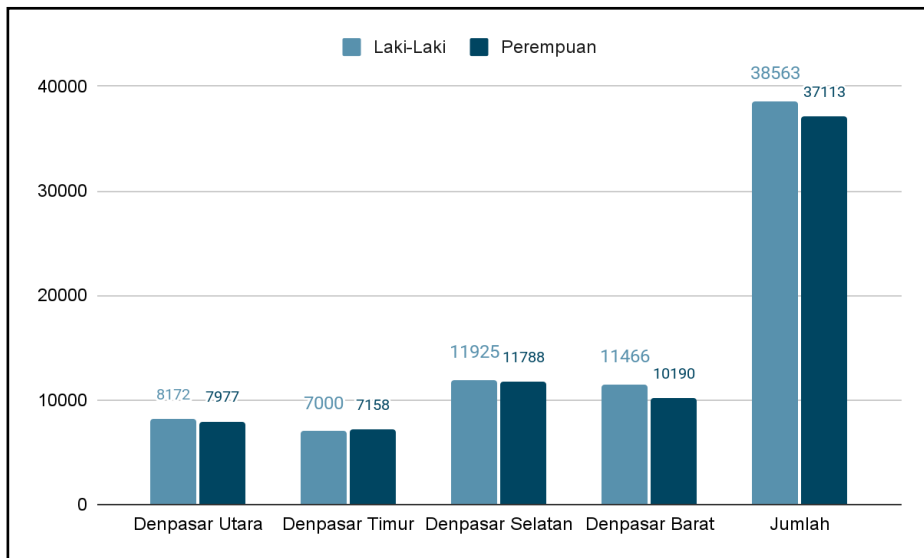
panjang pada anak yang memiliki penyakit kronis/langka, serta faktor pengaruh lain seperti pola asuh dan stimulasi perkembangan dan penyediaan lingkungan yang sehat dan aman.

Faktor tumbuh kembang anak di masa depan memiliki pengaruh besar dari latar belakang yang kompleks, mulai nutrisi, lingkungan, sosial, budaya bahkan kondisi ekonomi keluarga. Masa balita merupakan periode krusial dimana perkembangan kemampuan bicara, bahasa, kreativitas, kesadaran sosial, emosi, serta kecerdasan berlangsung sangat pesat dan menjadi fondasi bagi fase perkembangan selanjutnya. Nilai-nilai moral dan dasar kepribadian juga mulai terbentuk pada masa ini. Oleh karena itu, gangguan sekecil apapun yang tidak terdeteksi atau tidak ditangani secara tepat dapat berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Latar belakang tersebut menjadikan pentingnya data untuk menyiapkan kesehatan dalam menghasilkan generasi berkualitas di masa mendatang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar dengan menghimpun data berbagai persoalan anak khususnya balita dikategorikan melalui kecamatan dan jenis kelamin melalui tabel 5.2.

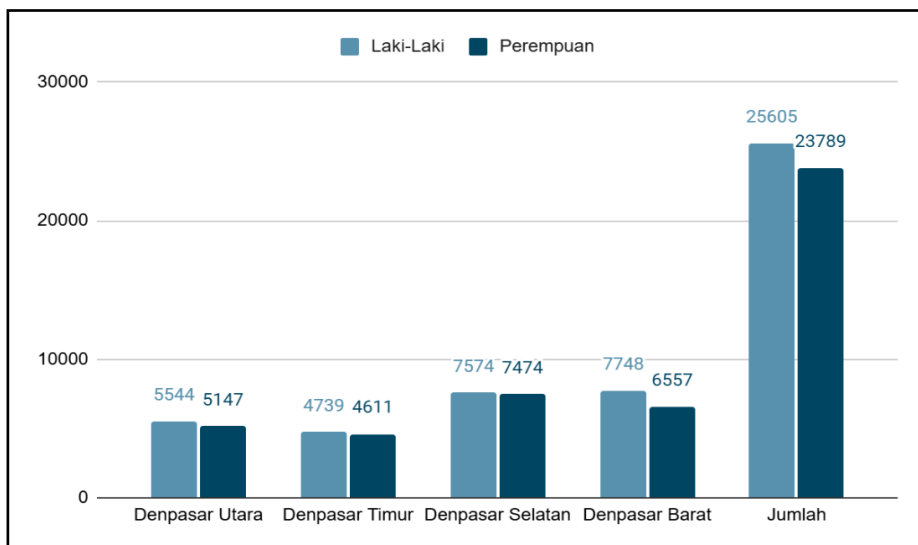
Tabel 5.2. Jumlah Angka Kelahiran Balita di Kota Denpasar berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023 dan 2024

No	Kecamatan	2023		2024	
		L	P	L	P
1.	Denpasar Utara	8172	7977	5544	5147
2.	Denpasar Timur	7000	7158	4739	4611
3.	Denpasar Selatan	11925	11788	7574	7474
4.	Denpasar Barat	11466	10190	7748	6557
Jumlah		38563	37113	25605	23789

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2025



Gambar 5.3. Jumlah Angka Balita di Kota Denpasar berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023



Gambar 5.4. Jumlah Angka Kelahiran Balita di Kota Denpasar berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Dari data tabel dan grafik di atas, dapat dilihat jumlah balita (laki-laki dan perempuan) pada tahun 2023 berjumlah 75.676 balita dan pada tahun 2024 berjumlah 49.394 balita. Dengan kata lain, terjadi penurunan jumlah balita di Kota Denpasar pada tahun 2024 sebesar 34,73 persen. Sejalan dengan angka kelahiran bayi, jumlah balita dengan jenis kelamin laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan. Pada tahun 2023 jumlah balita laki-laki 38.563 balita dan perempuan 37.113 balita.

Sedangkan pada tahun 2024 jumlah balita laki-laki 25.605 balita dan perempuan 23.789 balita.

Penurunan atau berkurangnya jumlah balita didominasi oleh Kecamatan Denpasar Selatan dengan total penurunan jumlah balita sebanyak 8.665 balita. Adapun kecamatan balita terendah berada di Kecamatan Denpasar Timur baik pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023 jumlah balita sejumlah 75.676 balita dan pada tahun 2024 menyentuh angka 49.394 balita. Dengan kata lain, terjadi penurunan jumlah balita sebesar 34.7 persen dalam kurun waktu satu tahun.

Penurunan angka balita pada tahun 2024 di Kota Denpasar dalam hemat penulis memiliki relevansi kuat dengan analisis penurunan kelahiran bayi. Dari tahun ke tahun, tren kelahiran bayi menurun sehingga jumlah balita turut mengalami penurunan. Namun, hal yang perlu digaris bawahi adalah melaksanakan studi lebih lanjut mengenai alasan penurunan jumlah balita. Apabila penurunan dikarenakan perbedaan jumlah kelahiran atau mobilitas, maka perbedaan tersebut bukan persoalan serius. Sebaliknya, ketika penurunan dikarenakan mortalitas, maka diperlukan pendekatan oleh pemerintah untuk mengetahui penyebab dan pencegahan guna memastikan kesejahteraan ibu hamil dan janin.

5.3. ASI Eksklusif di Kota Denpasar menurut Kecamatan Tahun 2023 dan 2024

Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa ASI diberikan kepada bayi dari baru lahir sampai usia enam bulan tanpa menambahkan ataupun mengganti dengan makanan lain kecuali jika terdapat pemberian obat, mineral ataupun vitamin. Kemudian, menyusui tetap dilakukan hingga usia dua tahun dibarengi pemberian MPASI yang mencukupi kualitas dan kuantitasnya dikarenakan 65% kebutuhan energi seorang bayi pada umum 6-8 bulan masih terpenuhi dari ASI. Pada umur 9-12 bulan sekitar 50% kebutuhannya dari ASI dan 1- 2 tahun sekitar 20% dari ASI.

Pemberian ASI eksklusif menjadi makanan paling baik bagi bayi untuk membentuk daya tahan tubuh dan juga berperan penting pada pembentukan sel-sel tubuh anak yang akan mengalami perkembangan. Disisi lain juga bermanfaat bagi ibu yang memberi ASI sebagai cara mengatasi rasa trauma pasca melahirkan, mengurangi terjadinya resiko kanker payudara dan ovarium serta membantu ibu dan bayi menjalin ikatan emosional yang kuat. Meskipun fakta manfaat dari pemberian ASI telah sering disosialisasikan namun masih ditemukan kasus bayi yang tidak mendapat ASI dan hal tersebut perlu dikaji lebih dalam untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi.

Faktor keberhasilan pemberian ASI sangat dipengaruhi pada kondisi ibu dari bayi terutama kondisi psikologis mampu mempengaruhi kuantitas ASI yang dihasilkan, dukungan suami maupun lingkungan kerja yang ramah terhadap perempuan. Pemberian ASI saat ini menjadi isu yang krusial dalam ranah publik dan mampu menarik perhatian dunia terkait dengan stunting dikarenakan ASI adalah salah satu intervensi untuk pencegahan stunting. Dukungan pemerintahan dalam keseriusan pada kasus ASI eksklusif dilakukan dengan berbagai cara salah satunya melalui langkah awal pendataan.

Untuk mengetahui bagaimana pemberian ASI eksklusif di Kota Denpasar memberikan dapat dilihat melalui tabel berikut:

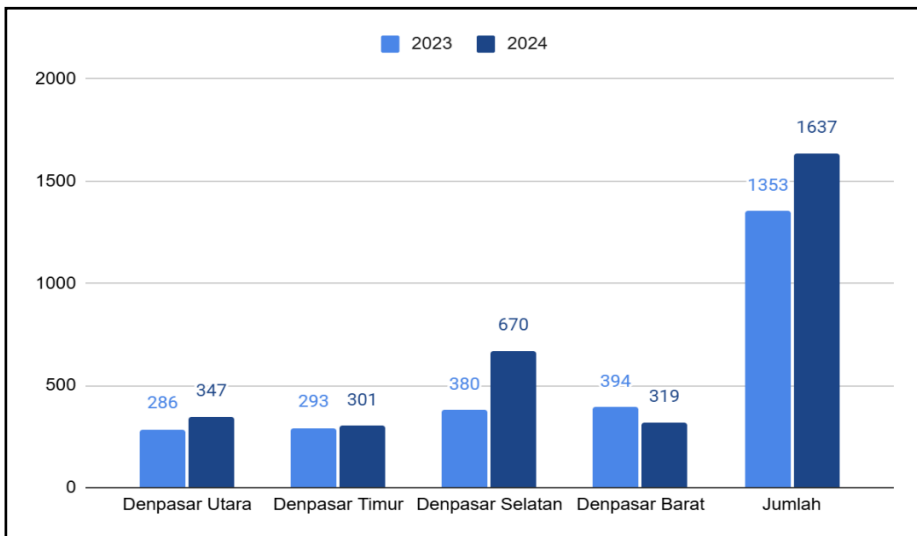
Tabel 5.3. ASI Eksklusif di Kota Denpasar menurut Kecamatan Tahun 2023 dan 2024

No	Kecamatan	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Denpasar Utara	286	347
2.	Denpasar Timur	293	301
3.	Denpasar Selatan	380	670
4.	Denpasar Barat	394	319
Jumlah		1353	1637

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2025

Data di atas memperlihatkan secara kuantitatif ASI eksklusif dari tahun 2023 hingga tahun 2024 terjadi peningkatan. Secara keseluruhan kasus ASI Eksklusif di Kota Denpasar mengalami peningkatan dari 1.353 kasus menjadi 1.637 kasus di tahun 2024 atau meningkat sebesar 20.9 persen.

Apabila diperhatikan berdasarkan wilayah, Kecamatan Denpasar Selatan mengalami peningkatan tertinggi dari 380 menjadi 670 dalam satu tahun. Sebaliknya Denpasar Barat mengalami penurunan dari 394 menjadi 319 kasus pada tahun 2024 dan jika dikontekstualisasi dengan jumlah balita pada tahun 2024 maka hanya 1.637 setar 2.2 persen balita dari total 75.676 balita yang mendapatkan ASI eksklusif.



Gambar 5.5. ASI Eksklusif di Kota Denpasar Menurut Kecamatan Tahun 2023 dan 2024.

Peningkatan secara umum dan penurunan secara khusus di Denpasar Barat menunjukkan fluktuasi pemberian ASI eksklusif di Kota Denpasar. Baik peningkatan serta penurunan kerap dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal Ibu sehingga mempengaruhi pemberian ASI. Faktor kembali ke ranah publik untuk bekerja akibat masa cuti berakhir menjadi alasan paling kuat tantangan pemberian ASI eksklusif. Walaupun teknologi pompa ASI telah berkembang pesat, namun kesesuaian atas jam kerja dan ketersediaan fasilitas ruang laktasi mengakibatkan Ibu menyusui kesulitan melanjutkan pemberian ASI eksklusif. Di lain sisi, peningkatan pemberian ASI eksklusif mengindikasikan bahwa kesadaran akan krusialnya ASI dalam 1000 hari pertama bayi telah terkonstruksi dengan baik di masyarakat. Sehingga penting untuk terus digaungkan agar baik Ibu menyusui, keluarga, dan pemerintah bersinergi menyukkseskan program ASI eksklusif. Kasus ASI eksklusif lebih tinggi disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan pengetahuan dan kesadaran ibu tentang manfaat ASI eksklusif, dukungan dari keluarga dan tenaga kesehatan, serta kebijakan pemerintah yang mendorong pemberian ASI eksklusif.

5.4. Status Gizi di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024

Gizi merupakan zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan tubuh seperti jenis kelamin, umur, dan status kesehatan disebut sebagai gizi seimbang. Empat pilar gizi

seimbang mencakup; (1) Konsumsi aneka ragam pangan dengan proporsi makanan seimbang, (2) Perilaku hidup bersih, (3) Aktivitas fisik teratur, (4) Pantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Pola makanan yang tidak bergizi seimbang berisiko mengakibatkan kekurangan gizi seperti anemia dan kurang berat badan, obesitas, dan lain-lain.

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Dapat pula diartikan sebagai tanda fisik akibat keseimbangan pemasukan dan pengeluaran gizi melalui variabel indikator status gizi. Beberapa status gizi yang harus dicegah antara lain *stunting* yang berarti terjadi kondisi tinggi badan anak berada dibawah standar WHO, *wasting* adalah kondisi berat badan anak yang berkurang dari sebelumnya, dan kelebihan berat badan atau obesitas merupakan tanda pertumbuhan yang tidak normal. Gizi menjadi penting dalam penentu kesehatan terutama perannya dalam tumbuh kembang anak sehingga perlunya perhatian khusus dari orang tua maupun pemerintah dalam status gizi di Indonesia.

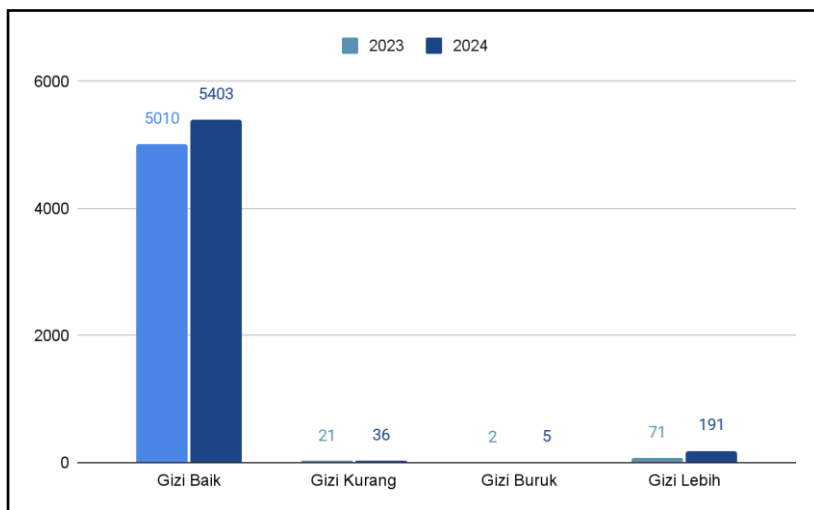
Status gizi individu memiliki pengaruh jangka panjang jika terdapat masalah yang tidak tertangani seperti stunting berdampak pada lemahnya kemampuan kognitif anak. Status gizi anak dapat diketahui melalui penghitungan menggunakan rumus Z-Score dari standar baku antropometri WHO – NCHS salah satunya dengan menggunakan BB/TB dimana Nilai Riil Hasil

Pengukuran (Berat Badan) $\geq$ Nilai Median rumusnya Z-SCORE = Nilai riil – nilai median/ SD upper sedangkan berat badan $<$ Nilai Median rumusnya Z-SCORE = Nilai riil – nilai median/ SD lower. Hasil dari pengukuran dapat dilihat statusnya, Gizi buruk (< -3 SD), Gizi kurang (< -2 SD s/d -3 SD), Gizi normal (-2 s/d 2 SD), Obesitas (> 2 SD) (Rohmawati, 2016). Berdasarkan kegiatan pemantauan status gizi 2024 di Kota Denpasar tertuang dalam tabel 5.4.

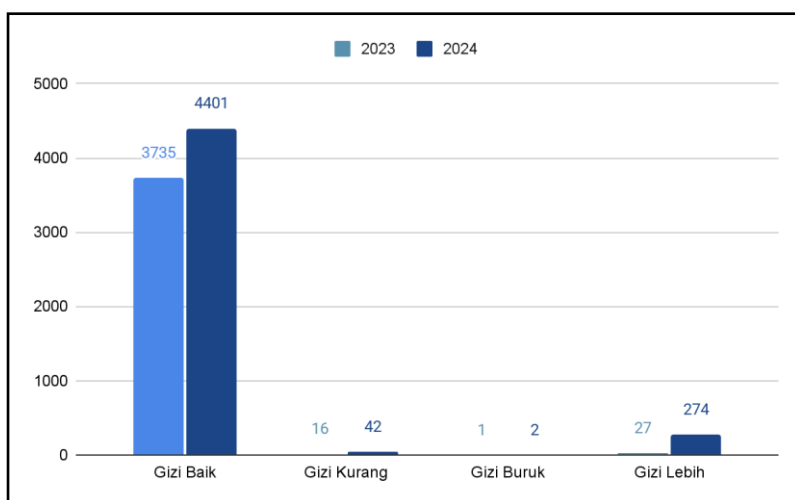
Tabel 5.4. Status Gizi di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024

No	Kecamatan	Status Gizi	2023	2024
1.	Denpasar Utara	Gizi Baik	5010	5403
		Gizi Kurang	21	36
		Gizi Buruk	2	5
		Gizi Lebih	71	191
2.	Denpasar Timur	Gizi Baik	3735	4401
		Gizi Kurang	16	42
		Gizi Buruk	1	2
		Gizi Lebih	27	274
3.	Denpasar Selatan	Gizi Baik	5080	5663
		Gizi Kurang	9	46
		Gizi Buruk	0	1
		Gizi Lebih	41	173
4.	Denpasar Barat	Gizi Baik	3080	4164
		Gizi Kurang	40	43
		Gizi Buruk	1	4
		Gizi Lebih	164	262

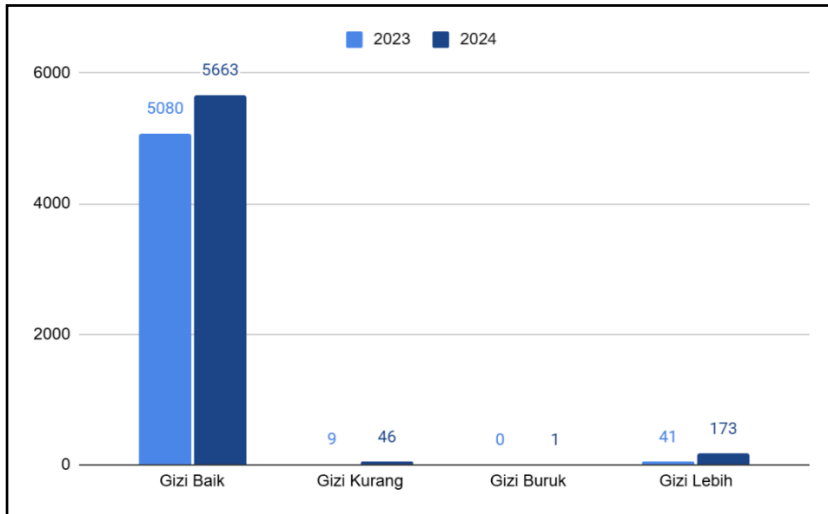
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2025



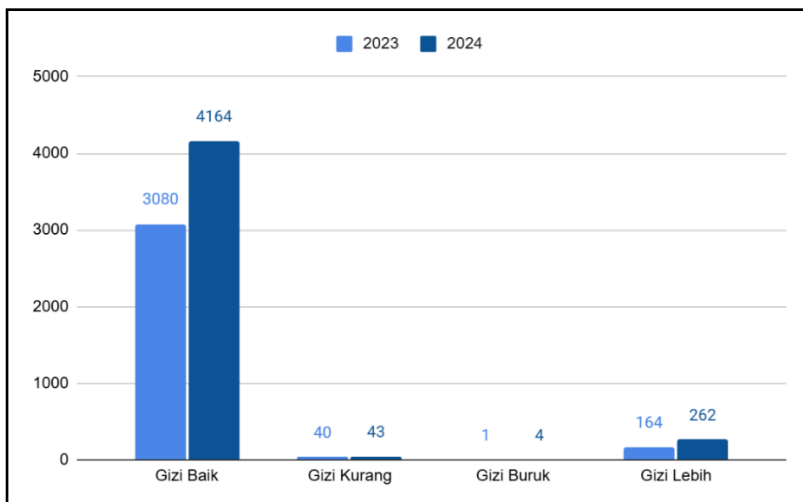
Gambar 5.6 Status Gizi di Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2023 dan 2024



Gambar 5.7 Status Gizi di Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2023 dan 2024



Gambar 5.8 Status Gizi di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2023 dan 2024



Gambar 5.9 Status Gizi di Kecamatan Denpasar Barat tahun 2023 dan 2024

Berdasarkan data statistik pada tabel dan grafik tentang Status Gizi di Kota Denpasar tahun 2023 dan 2024, mengarahkan pemahaman bahwa jumlah status gizi baik mengalami peningkatan di seluruh kecamatan. Peningkatan tertinggi berada di Kecamatan Denpasar Barat, di mana pada tahun 2023 terdapat 3.080 kasus gizi baik sedangkan tahun 2024 meningkat sejumlah 1.084 kasus menjadi 4164 kasus. Denpasar Timur mengalami peningkatan nomor dua dengan total 666 kasus. Kemudian Denpasar Selatan mengalami peningkatan status gizi baik sejumlah 583 kasus. Terakhir Denpasar Timur sejumlah 393 kasus.

Kenaikan atas gizi baik dapat dikatakan sebagai angin segar. Namun, di lain sisi kenaikan pada status gizi kurang, gizi buruk, dan gizi lebih menjadi persoalan krusial. Peningkatan bahkan secara drastis terjadi pada gizi kurang di Kecamatan Denpasar Selatan yakni 37 kasus. Sedangkan di Denpasar Utara terjadi peningkatan sebesar 15 kasus, Denpasar Timur 26 kasus, Denpasar Barat 3 kasus. Dalam konteks gizi buruk, Denpasar Utara dan Denpasar Barat mengalami peningkatan tertinggi yakni 3 kasus. Sedangkan di Denpasar Timur dan Denpasar Selatan terjadi peningkatan sebanyak 1 kasus.

Menariknya peningkatan terhadap status gizi lebih terjadi di seluruh kecamatan dengan tingkat peningkatan cukup signifikan. Kecamatan Denpasar Timur mengalami signifikansi

jumlah peningkatan tertinggi yaitu 247 kasus. Kemudian disusul oleh Kecamatan Denpasar Selatan sebesar 132 kasus, Kecamatan Denpasar Utara sebesar 120 kasus Adapun daerah dengan peningkatan terendah ialah Kecamatan Denpasar Barat yakni 98 kasus.

Persoalan serius berada pada tiga status gizi yaitu gizi kurang, gizi buruk, dan gizi lebih. Gizi kurang dan gizi buruk dapat disebabkan oleh kekurangan makronutrisi dan mikronutrisi dan berisiko pada gangguan pertumbuhan seperti berat badan kurang, perawakan pendek, bahkan gagal tumbuh. Bedanya, kurang gizi sebatas menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak, sedangkan gizi buruk menyebabkan kondisi klinis memprihatinkan seperti busung lapar, kwashiorkor, dan marasmus. Alasan kasus gizi kurang, kemudian berlanjut pada gizi buruk umumnya keterbatasan pemahaman orang tua atas gizi, status sosial ekonomi rendah, persoalan sanitasi, dan memiliki komorbid.

Serupa dengan gizi kurang dan gizi buruk, gizi lebih juga merupakan persoalan gizi tidak seimbang. Gizi lebih adalah keadaan ketidakseimbangan antara konsumsi dan kebutuhan energi yaitu konsumsi berlebih dibandingkan kebutuhan atau pemakaian energi. Jika tidak ditangani dengan serius maka akan terjadi obesitas, diabetes militus, hipertensi, dan gangguan kardiovaskuler. Kompleksitas persoalan di atas tentu menjadikan

pemerintah harus segera melakukan intervensi melalui berbagai program konkret. Hal ini mengingat risiko tinggi yang dialami oleh penderita diakibatkan kekebalan tubuh (sistem imun) rendah sehingga bila menderita penyakit, maka kondisi akan lebih parah dan sulit untuk tumbuh.

5.5. Pojok ASI di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024

Pojok ASI bisa juga dikatakan ruang ASI adalah fasilitas yang menyediakan sarana untuk menyusui dan pemerah ASI, termasuk menyusui bayi secara langsung, pemerah dan menyimpan ASI perah bahkan ada yang menyediakan fasilitas untuk konseling (Gusweni dkk., 2020). Fasilitas ruang ASI menjadi salah satu indikator perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak dalam lingkungan kerja maupun ruang publik. Pemenuhan hak ibu menyusui melalui penyediaan ruang ASI tidak hanya mendukung tumbuh kembang bayi, tetapi juga menjaga produktivitas ibu tanpa harus mengorbankan pemberian ASI eksklusif.

Pentingnya pemberian ASI eksklusif yang belum optimal, terlihat dari masih terbatasnya ruang laktasi di berbagai instansi. Ibu bekerja sering kali tidak memiliki cukup waktu atau keleluasaan pemerah ASI di tempat kerja. Menyikapi hal ini, dalam menunjukkan komitmennya, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu. Tabel 5.5. merupakan data terkini mengenai jumlah Pojok ASI yang ada di Kota Denpasar.

Tabel 5.5. Pojok Asi di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024

NO	Instansi	Tahun	
		2023	2024
1	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara	1	1
2	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara	1	1
3	UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara	1	1
4	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat	1	1
5	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat	1	1
6	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Timur	1	1
7	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Timur	1	1
8	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	1	1
9	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	1	1
10	UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	1	1
11	UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	1	1
12	Dikes Kota Denpasar	1	1
Jumlah		12	12

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2025

Dari tabel 5.5 dapat disimpulkan bahwa tidak ada perubahan jumlah Pojok ASI dari tahun 2023 sampai 2024 sebanyak 12. Di mana semua UPTD Puskesmas di Kota Denpasar memiliki 1 ruang pojok ASI. Apabila dilihat dari kuantitas, ketersediaan di masing-masing instansi telah memenuhi syarat kebijakan. Namun, perlu untuk memperluas jangkauan data mengenai ketersediaan pojok ASI di instansi lainnya, baik sektor pemerintahan, ruang publik, maupun sektor swasta. Pasalnya, implementasi kebijakan pemberian ASI di perusahaan swasta belum berjalan dengan baik akibat keterbatasan peraturan internal, keterbatasan tenaga, sarana khusus, dan alokasi anggaran. Penting bagi pemerintah untuk memastikan tahapan-tahapan penyelenggaraan pojok ASI diupayakan oleh setiap instansi, terutama instansi besar. Data tersebut nantinya akan membantu memperlihatkan kondisi riil keberpihakan dan komitmen dari setiap instansi pada generasi mendatang melalui penyediaan pojok ASI.

5.6. Cakupan Imunisasi Pada Bayi di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024

Pencegahan stunting dapat dilakukan melalui intervensi salah satunya memberikan imunisasi. Imunisasi berasal dari kata “imun” yang berarti kebal atau tahan terhadap penyakit. Imunisasi merupakan upaya untuk memberikan atau meningkatkan

kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Dengan adanya kekebalan ini, seseorang yang terkena penyakit tersebut di kemudian hari tidak akan mengalami sakit berat, melainkan hanya mengalami gejala ringan. Namun, kekebalan ini bersifat spesifik, sehingga tidak serta-merta membuat seseorang kebal terhadap penyakit lainnya.

Program imunisasi terdiri dari imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Imunisasi rutin mencakup imunisasi dasar yang diberikan kepada anak di bawah usia satu tahun untuk melindungi mereka dari berbagai penyakit, seperti hepatitis B, tuberkulosis, polio, difteri, pertusis, tetanus, pneumonia, meningitis akibat bakteri *Haemophilus influenzae* tipe B, serta campak dan rubella. Cakupan imunisasi pada bayi di Kota Denpasar berdasarkan sumber dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar dapat digunakan dalam memantau bayi yang telah memperoleh imunisasi.

Tabel 5.6. Cakupan Imunisasi Pada Bayi di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024

Kecamatan	Bayi Diimunisasi	2023	2024
Denpasar Utara	DPT-HB-Hib3	3853	2594
	Polio 4*	3883	2611
	Campak / MR	3827	2630
	Imunisasi Dasar Lengkap	3722	2576
Denpasar Timur	DPT-HB-Hib3	2921	1788
	Polio 4*	2903	1785
	Campak / MR	2926	1784
	Imunisasi Dasar Lengkap	2825	1761
Denpasar Selatan	DPT-HB-Hib3	5418	3154
	Polio 4*	5393	3223
	Campak / MR	5747	3405
	Imunisasi Dasar Lengkap	5548	3256
Denpasar Barat	DPT-HB-Hib3	4734	3780
	Polio 4*	4784	3860
	Campak / MR	4839	3054
	Imunisasi Dasar Lengkap	4832	3176
Jumlah		68021	44437

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2025

Dari Tabel di atas dapat dilihat cakupan imunisasi bayi di Kota Denpasar tahun 2024 mengalami penurunan. Jika dilihat secara keseluruhan selisih jumlah imunisasi tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan 23.583 dari tahun sebelumnya atau setara 34,7 persen dalam satu tahun. Kecamatan yang mengalami cakupan imunisasi yang paling menurun ada di Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 9.068 selanjutnya Denpasar Barat

5.319 kasus, disusul Denpasar Utara 4.874 dan terakhir penurunan terendah terjadi di Denpasar Timur sebanyak 4.457.

Penting untuk mengetahui penyebab penurunan cakupan imunisasi. Terdapat beberapa alasan umum seperti kurangnya informasi atau motivasi, tempat imunisasi tidak nyaman bagi *caregiver* anak, waktu imunisasi tidak tepat, tidak ada petugas vaksin, masalah keluarga termasuk beban berlebih pada ibu dan penyakit ibu dan anak. Dapat dilihat bahwa ketimpangan gender mengakibatkan tanggung jawab ibu menjadi ganda. Beban ganda merupakan kondisi yang dialami perempuan ketika mengemban tugas sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh dan perawat utama keluarga. Perempuan pencari nafkah dituntut untuk tetap mencari nafkah dan tetap melakukan tugas domestik tanpa bantuan laki-laki. Hal ini dikarenakan konstruksi sosial meletakkan pandangan bahwa tugas domestik tanggung jawab perempuan dan hanya pria lemah yang mengerjakan tugas domestik. Belenggu ini kerap menghambat berbagai elemen penting rumah tangga karena sentralisasi pekerjaan pada perempuan, termasuk imunisasi. Sehingga penting untuk dilakukan sosialisasi kesetaraan gender terutama peran laki-laki di keluarga.

5.7 Kematian Ibu

Disamping pemantauan kesehatan bayi perhatian terhadap kesehatan ibu penting untuk dilakukan karena sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan anak. Kesehatan ibu bukan hanya dilihat pada fase ibu setelah melahirkan namun juga dalam fase hamil, persalinan maupun nifas dan melihat aspek kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi, kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan dan tingkat pelayanan kesehatan, perencanaan kesehatan ibu perlu ditingkatkan dan dianalisis secara aktif karena perempuan memiliki resiko tinggi terhadap kematian dalam fase akan menjadi ibu maupun setelah seperti data dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2015 menunjukkan adanya 359 kasus kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (Mappaware, Muchlis, & Samsualam, 2020).

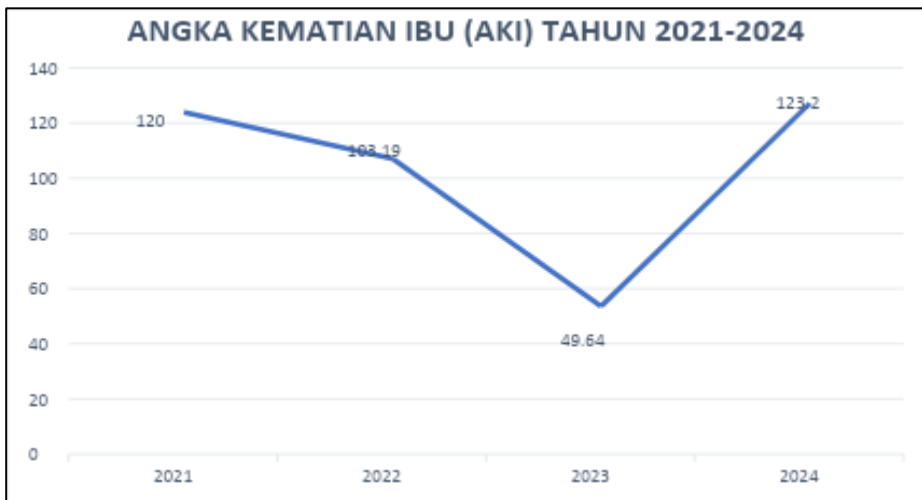
Indikator dalam menghitung Angka Kematian Ibu (AKI) dilakukan dengan membagi jumlah kematian ibu dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup dan hasilnya dikali 100.000 Kelahiran Hidup dan Provinsi Bali dalam kasus ini pada 5 tahun terakhir berada di bawah angka nasional dan dibawah target yang ditetapkan 100 per 100.000 kelahiran hidup, namun setiap tahunnya belum bisa diturunkan secara signifikan dan perhatian perkabupaten dilakukan untuk menyasar secara spesifik dalam upaya meningkatkan angka harapan hidup. Data Angka Kematian

Ibu (AKI) di Denpasar pada tahun 2021 hingga 2024 secara rinci dapat dilihat pada Tabel.5.7.berikut.

Tabel 5.7 Jumlah Angka Kematian Ibu Maternal di Kota Denpasar Tahun 2021-2024.

No	Tahun	Angka Kematian Ibu
1	2021	120
2	2022	103.19
3	2023	49.64
4	2024	123.2
Jumlah		395.13

Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Denpasar



Gambar 5.10 Angka Kematian Ibu di Kecamatan Denpasar Barat tahun 2021-2024

Dari grafik dalam Gambar 5.10 diatas dapat dilihat bahwa Angka Kematian Ibu dari tahun 2021-2024 mengalami penurunan dan angka paling rendah berada di tahun 2023 (49.64/100.000 KH). Namun pada tahun selanjutnya angka melonjak menjadi sebesar 123,2 per 100.000 KH, dimana tahun 2024 terjadi 14 kematian ibu dari 11.361 kelahiran hidup yang terdiri dari 8 kematian ibu hamil dan 6 orang kematian ibu nifas. dan diketahui penyebab kematian ibu terbanyak adalah karena kelainan jantung dan pembuluh darah, gangguan autoimun, dan gangguan hipertensi serta pendarahan.

Fluktuasi angka kematian ibu dari tahun 2021 hingga 2024 penting untuk ditindaklanjuti secara serius. Namun, tindak lanjut harus berlandaskan pada kondisi konkret di lapangan yang bisa diperoleh melalui penelitian mendasar. Beberapa studi menjelaskan bahwa penyebab utama angka kematian ibu adalah faktor langsung dan tidak langsung (WHO, 2025). Faktor langsung berkaitan dengan komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Sedangkan faktor tidak langsung berkaitan dengan penyakit bawaan ibu hamil. Di lain sisi, beberapa faktor krusial lain seperti faktor sosial-ekonomi, lingkungan, dan gaya hidup.

Langkah strategis untuk menekan angka kematian ibu akan mampu ditetapkan paska menemukan jawaban atas latar belakang kejadian tersebut. Melalui kebijakan dan langkah

konkret, stakeholder dapat mengambil tindakan meliputi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, penguatan sistem rujukan, dan pemberdayaan masyarakat. Mengingat AKI dipengaruhi oleh faktor eksternal yakni lingkungan sekitar, maka sosialisasi dan penguatan kesadaran atas antisipasi kematian ibu harus melibatkan orang terdekat ibu khususnya suami atau orang terdekat lainnya. Hal ini menjadi penting guna memperkuat jaringan sosial pendukung untuk menyukseskan agenda menghilangkan angka AKI.

5.8. Angka Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk dijelaskan bahwa UHH adalah perkiraan rata-rata jumlah tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir. Angka derajat kesehatan manusia digunakan untuk menilai keberhasilan suatu program kesehatan maupun ekonomi secara nasional atau global dan harapan hidup menjadi unsur dalam dimensi penilaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tinggi rendahnya UHH dipengaruhi oleh jumlah angka penduduk yang berhasil mencapai usia kritis. Semakin tinggi individu selamat dari tahap mortalitas, semakin tinggi UHH generasi tersebut.

Harapan hidup tidak hanya bergantung pada statistik kematian tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi

seperti daya beli ekonomi masyarakat yang dihitung melalui pengeluaran per kapita, tingkat pendidikan dan kondisi kesehatan yang mampu mendukung panjangnya umur manusia sehingga inilah yang menjadi alasan penting menggali angka harapan hidup penduduk (Rasnino dkk, 2022). UHH dihitung dengan *Age Specific Death Rate* (ASDR) atau penghitungan angka kematian yang dilihat menurut umur namun di Indonesia menggunakan cara tidak langsung yang dikarenakan tidak semua daerah memadai dan mencatat data secara lengkap.

Penghitungan dilakukan dengan mencari rata-rata usia kematian yang terjadi dalam suatu periode dan bentuk penghitungan dapat dinyatakan
$$UHH = (\sum \text{Usia semua kematian}) / (\text{Jumlah kematian}).$$
 Tahapan penting yang harus dilakukan yaitu; data kematian dari seluruh populasi dalam satu tahun Kedua, setiap kasus kematian perlu dicatat secara individual beserta usia saat meninggal. Ketiga, semua usia kematian tersebut kemudian dijumlahkan total usia kematian, tahap terakhir total usia ini dibagi dengan jumlah total kematian yang terjadi untuk memperoleh angka harapan hidup.

Indikator yang menurunkan UHH ada kematian ibu dan bayi (usia 0-1 tahun), kematian balita (usia 1-5 tahun), serta kematian pada usia produktif (15-64 tahun) yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti penyakit menular, penyakit tidak menular, kecelakaan, dan kekerasan dan peningkatan kematian pada usia

lanjut dan turunnya angka kematian usia muda mampu meningkatkan angka UHH. Tabel 5.8. berisikan data angka harapan hidup di Kota Denpasar dari tahun 2021 hingga tahun 2024.

Tabel 5.8 Jumlah Angka Harapan Hidup di Kota Denpasar 2021-2024

No	Tahun	Angka Harapan Hidup
1	2021	74.93
2	2022	75.3
3	2023	75.59
4	2024	75.8



Gambar 5.11 Angka Harapan Hidup di Kota Denpasar tahun 2021-2024

Pada gambar 5.11 dapat kita ketahui angka harapan hidup di wilayah Kota Denpasar dari tahun 2021-2024 terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 tercatat 74,93, kemudian meningkat menjadi 75,3 pada tahun 2022. Peningkatan tersebut berlanjut di tahun 2023 menjadi 75,59 tahun, dan mencapai 75,8 tahun pada tahun 2024.

Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas hidup dan layanan kesehatan, serta semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat. Kenaikan secara konsisten selama empat tahun menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat secara umum berada dalam arah yang positif.

5.9. Jumlah Dokter Umum dan Dokter Spesialis menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar

Sumber daya manusia kesehatan merupakan salah satu komponen kunci dalam sistem pelayanan kesehatan. Keberadaan tenaga medis, termasuk dokter umum, sangat dibutuhkan untuk menjamin akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat. Dokter umum memiliki peran strategis dalam memberikan penanganan awal, melakukan diagnosis, hingga menentukan rujukan ke spesialis jika diperlukan. Oleh karena itu, ketersediaan dokter umum yang

cukup dan kompeten menjadi pondasi penting dalam pelayanan kesehatan tingkat pertama.

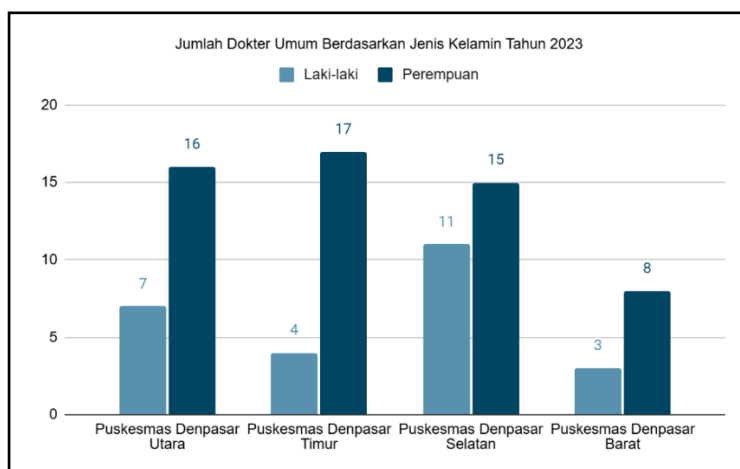
Kebutuhan akan dokter umum terus menjadi perhatian seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan fasilitas kesehatan. Masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesehatan turut mendorong permintaan terhadap layanan medis yang lebih cepat dan menyeluruh. Dalam konteks ini, pemetaan jumlah dokter umum berdasarkan jenis kelamin menjadi penting sebagai bagian dari evaluasi pemerataan tenaga kesehatan. Berdasarkan data tahun 2023 dan 2024, jumlah dokter umum di Kota Denpasar tercatat tetap, tanpa mengalami perubahan berarti pada komposisi dokter laki-laki dan perempuan

Dilihat dari Tabel 5.9, jumlah dokter umum mengalami peningkatan sebesar 25.9 persen. Jumlah dokter laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan satu tahun terakhir ini. Dapat dilihat juga kecamatan dengan jumlah dokter terbanyak berada di Puskesmas Denpasar Selatan sebanyak 44 orang sedangkan Puskesmas Denpasar Barat menjadi yang terendah dimana terdapat 14 dokter. Data menarik juga terlihat dari sebaran dokter umum berdasarkan jenis kelamin di seluruh puskesmas, jumlah dokter perempuan tercatat lebih banyak dibandingkan dokter laki-laki.

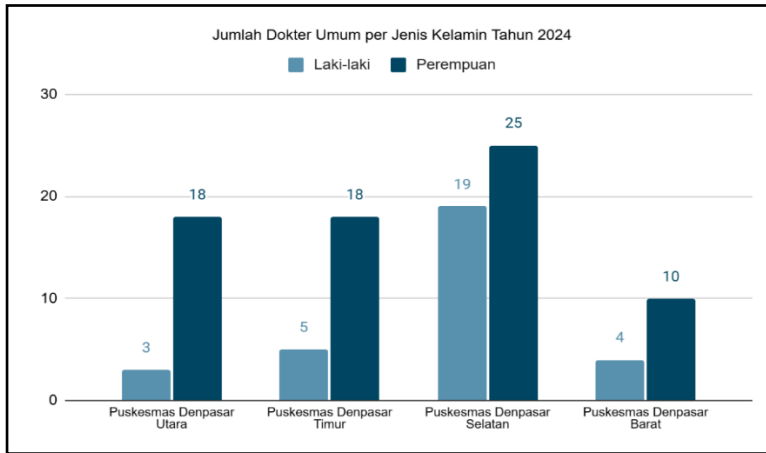
Tabel 5.9. Jumlah Dokter Umum menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024

No	Tempat Tugas	Dokter Umum					
		2023			2024		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Puskesmas Denpasar Utara	7	16	23	3	18	21
2	Puskesmas Denpasar Timur	4	17	21	5	18	23
3	Puskesmas Denpasar Selatan	11	15	26	19	25	44
4	Puskesmas Denpasar Barat	3	8	11	4	10	14
Jumlah		25	56	81	31	71	102

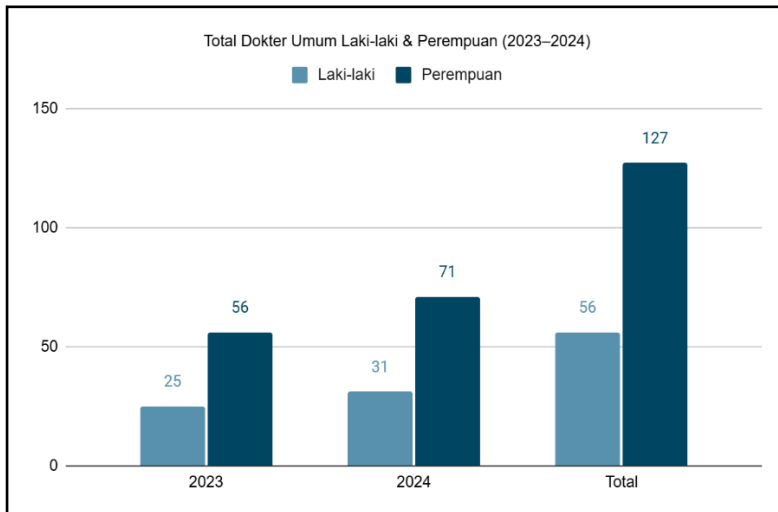
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2025



Gambar 5.12 Jumlah Dokter Umum Berdasarkan Jenis Kelamin pada Masing-Masing Puskesmas Tahun 2023



Gambar 5.13 Jumlah Dokter Umum Berdasarkan Jenis Kelamin pada Masing-Masing Puskesmas Tahun 2024



Gambar 5.14 Jumlah Dokter Umum Laki-laki & Perempuan pada Puskesmas di Kota Denpasar (2023–2024)

Dominasi jumlah dokter umum perempuan menunjukkan bahwa stereotipe sejak 1970-an tentang maskulinitas di dunia medis ambruk. Secara historis, identitas profesional dokter dan struktur organisasi kedokteran telah ditentukan oleh norma maskulin seperti otoritas dan ketegasan. Namun, hadirnya perempuan mendefinisikan budaya baru pada dunia medis terutama mengenai nuansa femin seperti pendekatan pada pasien yang lembut dan mengedepankan perasaan. Dengan kata lain, peningkatan jumlah dokter khususnya dokter perempuan menunjukkan keterbukaan akses terhadap pendidikan tinggi, kesadaran akan pentingnya pendidikan, meleburnya dikotomi gender pada dunia kedokteran, dan ekspansi perempuan di ranah profesional.

Tabel 5.10. Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024

No	Tempat Tugas	Dokter Spesialis		Dokter Umum		Dokter Gigi		Jml
		L	P	L	P	L	P	
1	Puskesmas Denpasar Utara	0	0	3	18	3	10	34
2	Puskesmas Denpasar Timur	0	1	5	18	1	7	32
3	Puskesmas Denpasar Selatan	0	1	19	25	2	13	60
4	Puskesmas Denpasar Barat	0	1	4	10	2	10	27
Sub Total 1		0	3	31	71	8	40	153
1	RSUP Sanglah	103	72	719	743	1	8	1646
2	RSK Mata Ramata	8	20	3	6	0	0	37
3	RSIA Pucuk Permata Hati	9	5	1	2	0	0	17
4	RSUD Wangaya	48	29	16	16	0	3	112
5	RS Tk II Udayana	39	20	9	9	0	3	80
6	RS Manuaba	15	3	4	4	0	2	28
7	RS Mata RSBM	5	9	5	10	0	0	29
8	RS Surya Husada	54	29	7	9	3	4	106
9	RSU Bros	67	43	9	25	3	4	151
10	RS Kasih Ibu	50	28	9	22	3	4	116
11	RS Darma Yadnya	29	12	6	6	0	1	54
12	RS Puri Raharja	55	21	3	16	0	3	98
13	RS Bakti Rahayu	29	17	5	9	0	1	61
14	RSIA Harapan Bunda	7	5	4	1	0	0	17
15	RSGM Fak Kedokteran Mahasaraswati	2	0	1	2	19	47	71
16	RS Prima Medika	70	40	17	13	2	1	143
17	RS Bali Med	79	47	12	17	0	4	159
18	RSIA Puri Bunda	54	25	5	12	0	0	96
19	RS Bhayangkara	27	21	6	14	0	2	70
20	RS Surya Husada Ubung	30	20	5	6	1	4	66
21	RSUD Bali Mandara	38	34	12	37	3	14	138
22	RSIA BUNDA Denpasar	15	15	6	9	0	0	45
23	RS Khusus Bedah Dharma Usadha Sidhi	4	8	0	2	0	0	14
24	RS Ibu dan Anak Bali Royal (Bros Ina)	17	22	3	11	0	3	56
Sub Total 2		854	545	867	1001	35	108	3410
JUMLAH TOTAL (Sub Total 1 dan 2)		854	548	898	1072	43	148	3563

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2025

Dari Tabel 5.10. dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan dokter yang ada di Kota Denpasar untuk Tahun 2024 berjumlah 3.563 orang dokter yang terbagi menjadi dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis. Dari jumlah tersebut dokter yang paling banyak adalah dokter umum yakni 1.970 dokter dengan pembagian 45.6 persen laki-laki dan 54.4 persen orang dokter umum perempuan. Kategori ke-dua terbanyak adalah dokter spesialis yakni 802 dokter dengan pembagian 61.0 persen dokter spesialis laki-laki dan 39.1 persen orang dokter spesialis perempuan. Kategori dokter dengan jumlah terendah adalah dokter gigi yakni 191 dokter, didominasi oleh dokter perempuan yaitu sebesar 77.4 persen dan 22.6 persen sisanya adalah laki-laki.

RSUP Sanglah memiliki paling banyak dokter sebanyak 1646 dokter sedangkan Rumah Sakit Khusus Bedah Dharma Usadha Sidhi menjadi fasilitas kesehatan dengan jumlah dokter terendah yakni sebanyak 14 dokter. Apabila analisis ingin diarahkan pada kualitas layanan kesehatan masyarakat maka data di atas perlu dielaborasi dengan beberapa variabel lain seperti jumlah pasien, kepuasan pasien, dan sarana prasarana penunjang lainnya. Namun, apabila analisis diletakkan pada komposisi dokter berdasarkan jenis kelamin, maka dapat dilihat sebaran data yang cukup menarik. Mayoritas dokter spesialis di

dominasi oleh laki-laki sedangkan dokter umum dan dokter gigi didominasi oleh perempuan.

Dominasi laki-laki pada dokter spesialis sejalan dengan Saraswati (2021) menyatakan bahwa bias gender masih kental untuk spesialisasi kedokteran. Situs kedokteran Amino (2016) turut memiliki hasil penelitian serupa. Di mana pada berdasarkan 900 ribu dokter, hanya empat bidang spesialisasi dengan kisaran jumlah perempuan mencapai 45-65 persen yakni pediatri, ginekologi, dermatologi, dan endokrinologi. Sedangkan 21 spesialisasi lainnya, jumlah perempuan tidak menyentuh angka 40 persen, bahkan untuk ortopedi hanya tujuh persen. Hal ini tentu perlu dikaji lebih lanjut apakah stereotipe pada spesialisasi menjadi alasan data di atas atau terdapat kendala lain seperti masalah ekonomi, sosial budaya, politik, dan sebagainya.

5.10 Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Meskipun air melimpah di bumi, tidak semua air dapat langsung dikonsumsi tanpa pengolahan terlebih dahulu. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023, air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Sementara itu, organisasi kesehatan dunia (WHO) mendefinisikan air bersih

sebagai air yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan minum, keperluan rumah tangga, produksi makanan, atau tujuan rekreasi.

Kualitas air bersih ditentukan oleh beberapa parameter, antara lain tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, serta bebas dari mikroorganisme berbahaya dan logam berat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kualitas air sangat penting dilakukan, baik oleh instansi pemerintah seperti dinas kesehatan maupun oleh penyelenggara layanan air minum. Di Kota Denpasar, upaya penyediaan air bersih bagi penduduk terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu data mengenai akses air bersih sangat penting diketahui seperti pada tabel 5.11 berikut.

Tabel 5.11. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih Tahun 2023 dan 2024

Jenis	2023		2024	
	orang	%	orang	%
Jumlah penduduk terlayani air bersih	342124	47,07	384030	50,50
Jumlah penduduk yang belum terlayani air bersih	384.684	52,93	376500	49,50

Sumber: Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma, 2025

Pada Tabel 5.11. terlihat bahwa secara umum pada tahun 2024 persentase penduduk kota Denpasar yang terlayani akses air bersih dari PDAM meningkat dari 47,07 persen pada tahun 2023 menjadi 50,50 persen pada tahun 2024. Jumlah penduduk yang belum terlayani air bersih pada tahun 2023 sebesar 52,93% menjadi 49,50%.

Persoalan mendasar pada persoalan air bersih karena beberapa hal. Pertama, laju pertumbuhan penduduk perkotaan tinggi sehingga penggunaan lahan tidak memperhatikan konservasi tanah dan air. Kedua, pembangunan di kota kerap tidak mematuhi perbandingan lahan terpakai dan lahan terbuka, sehingga mengganggu proses penyerapan air hujan ke dalam tanah. Ketiga, pertumbuhan penduduk signifikan meningkat dan aktivitas domestik, industri, erosi, dan pertanian. Keempat, eksploitasi tanah yang berlebihan yang dilakukan oleh gedung perkantoran, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan apartemen. Untuk memastikan kebenaran dari faktor penyebab penurunan akses air bersih sesuai data di atas, penting untuk dilakukan kajian lebih lanjut.

5.11. Keluarga Berencana (KB)

Keluarga Berencana (KB) menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui pengendalian jumlah dan jarak kelahiran anak. Program ini memberikan edukasi

dan akses layanan kepada masyarakat untuk merencanakan kehamilan secara sehat dan aman. Selain menekan risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan, KB juga mendukung upaya nasional dalam menurunkan angka kematian ibu. Pelaksanaan program ini mengedepankan hak reproduksi setiap individu untuk menentukan pilihan terbaik bagi keluarganya.

Beragam metode kontrasepsi telah disediakan sebagai sarana pendukung agar masyarakat memiliki pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Jenis alat kontrasepsi jangka panjang seperti IUD dan implan banyak digunakan, sementara metode permanen seperti MOW (Metode Operasi Wanita) dan MOP (Metode Operasi Pria) juga menjadi alternatif bagi pasangan yang tidak ingin menambah keturunan. Pelayanan KB di Kota Denpasar terus diperluas baik melalui fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun kerja sama dengan pihak swasta. Data yang tersedia berikut menyajikan capaian program-program KB di wilayah ini selama dua tahun terakhir sebagai gambaran komitmen dalam mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera.

Pada tabel 5.12 dapat dilihat Persentase Kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran di Kota Denpasar dimana Kesertaan KB keluarga PBI meningkat sebesar 26,72 persen dari tahun 2023 ke tahun 2024. Peningkatan ini merepresentasikan

bahwa kesadaran masyarakat telah meningkat atas pengendalian jumlah anak dan jarak kelahiran anak demi memperhitungkan masa depan keluarga. Penting untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kesadaran masyarakat atas urgensi KB melalui berbagai kegiatan sosialisasi yang kontinyu.

Tabel 5.12. Persentase Kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024

No	JENIS	Tahun	
		2023	2024
1	KB Penerima Bantuan Iuran	6251	7921
Jumlah		6251	7921

Sumber: Dinas P3AP2KB Kota Denpasar, 2025

Tabel 5.13. Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan Tahun 2023 dan 2024 di Kota Denpasar

No	JENIS	Tahun	
		2023	2024
1	KB Pasca Persalinan	526	632
Jumlah		526	632

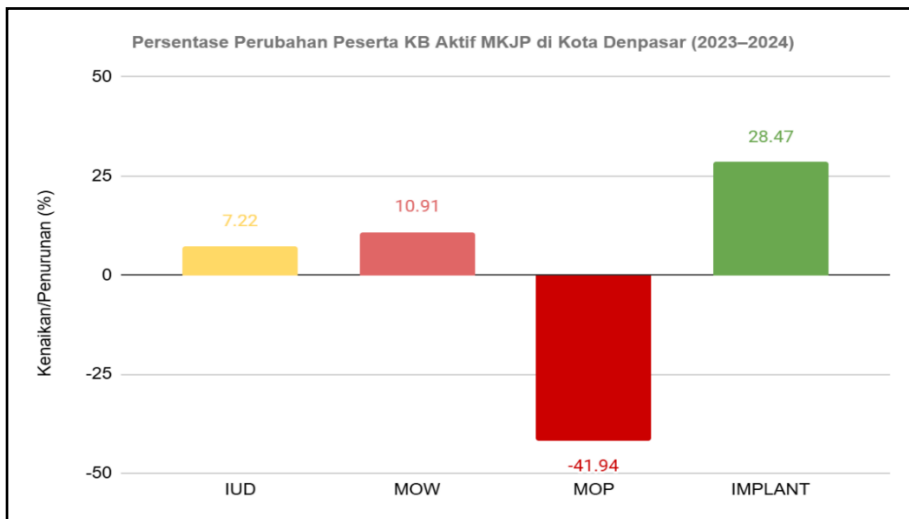
Sumber: Dinas P3AP2KB Kota Denpasar, 2025

Pada Tabel 5.13. pelayanan KB pasca persalinan meningkat sebesar 20,15 persen dari tahun 2023 ke 2024. Selisih dari total kedua tahun tersebut berada pada 106 pelayanan KB Pasca Persalinan. Data di atas memperlihatkan kesadaran perempuan untuk melaksanakan KB meningkat karena manfaat langsung yang dirasakan ibu dan anak. Seperti mencegah kehamilan tidak diinginkan, memberikan waktu pemulihan, mengurangi risiko stunting, meningkatkan kesehatan mental, meningkatkan kualitas keluarga, dan mendukung pendidikan serta karir ibu.

Tabel 5.14. Persentase Peserta KB Aktif Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024

No	KB AKTIF MKJP	Tahun	
		2023	2024
1	IUD	12427	13324
2	MOW	3439	3814
3	MOP	124	72
4	IMPLANT	1461	1877
Jumlah		17451	19087

Sumber: Dinas P3AP2KB Kota Denpasar, 2025

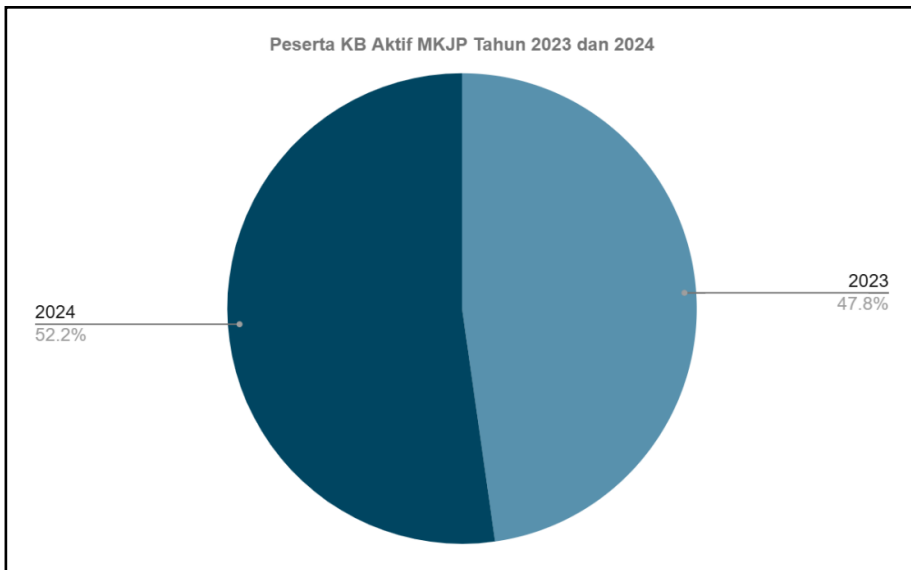


Gambar 5.15 Persentase Perubahan Peserta KB Aktif MKJP Kota Denpasar (2023–2024)

Data ini menggambarkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi jangka panjang dalam upaya pengendalian kelahiran dan berdasarkan pada tabel 5.14 menunjukkan jumlah penggunaan KB Aktif metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Kota Denpasar. Dari 19087 orang perempuan pengguna alat KB, penggunaan kontrasepsi terbanyak adalah pengguna IUD oleh 13.324 orang, diikuti dengan MOW sebanyak 3.814 orang. Alat KB yang paling sedikit digunakan pada tahun 2024 di Kota Denpasar adalah MOP yaitu sebanyak 72 orang saja.

Jenis kontrasepsi yang mengalami peningkatan tertinggi adalah Implan, yaitu sebesar 28,47 persen dibandingkan tahun

sebelumnya, disusul oleh MOW (Metode Operasi Wanita) dengan kenaikan 10,91 persen, dan IUD (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) sebesar 7,22 persen. Sementara itu, terdapat satu jenis kontrasepsi yang justru mengalami penurunan cukup signifikan, yaitu MOP (Metode Operasi Pria) yang turun sebesar 41,94 persen dan pada gambar 5.16 menunjukkan selisih peserta KB tahun 2023 dan 2024 sebanyak 4.4 persen.



Gambar 5.16 Peserta KB Aktif MKJP Tahun 2023 dan 2024

Apabila data di atas ingin dikaji melalui sudut pandang kesadaran masyarakat atas KB tentu telah meningkat. Namun, menjadi menarik ketika data dikaji dalam perspektif gender.

Kenyataan hanya pada KB laki-laki terjadi penurunan jumlah peserta, sedangkan untuk KB perempuan secara keseluruhan meningkat jumlahnya. Hal ini sejalan dengan pandangan kritis bahwa penggunaan kontrasepsi masih dibebankan kepada perempuan. Kedudukan perempuan dalam rumah tangga patriarki menjadi akar dari persoalan dominasi perempuan menggunakan KB. Alasan laki-laki enggan menggunakan KB mayoritas karena efek samping yang ditimbulkan seperti perubahan hormon. Padahal hal tersebut juga dialami perempuan bahkan ketika menstruasi, hamil, bahkan lima tahun pasca melahirkan.

Fakta bahwa kepesertaan laki-laki dalam penggunaan KB menurun merupakan pukulan telak bahwa masyarakat masih membebankan perempuan atas banyak hal. Perlu sosialisasi masif dari stakeholder khususnya pemerintah terkait untuk melakukan penyadaran bahwa laki-laki harus mengambil peran khususnya dalam hal ini KB. Selain materi kesetaraan gender, sosialisasi wajib dilengkapi dengan jenis KB laki-laki dan akses terhadap KB laki-laki. Sehingga terjadi kesinambungan antara upaya perubahan paradigma dan praktik konkret lapangan.

5.12. Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB

Fungsi sektor kesehatan secara berjenjang mulai dari Kemenkes, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota,

Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dalam program KB adalah untuk memastikan terpenuhinya *supply side* dalam pelayanan KB. Dalam konteks fasilitas kesehatan, untuk melaksanakan fungsinya maka sektor kesehatan perlu melakukan upaya pemenuhan atas alat dan sarana sesuai standar untuk melakukan pelayanan KB yang berkualitas. Dimulai dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sampai rujukan.

Fasilitas kesehatan yang melayani KB di Kota Denpasar terdiri atas puskesmas, klinik pratama, klinik utama, rumah sakit umum, dan rumah sakit khusus. Pada tahun 2024 terdapat sebanyak 11 puskesmas, 19 klinik pratama, 3 klinik utama, 15 rumah sakit umum, dan 5 rumah sakit khusus yang memberikan layanan KB. Secara keseluruhan, jumlah fasilitas kesehatan yang melayani program KB di Kota Denpasar mencapai 53 unit dan tampak melalui persentase bahwa Klinik Pratama menjadi fasilitas kesehatan yang melayani KB paling banyak. Data mengenai jumlah fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB di Kota Denpasar Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 5.15.

Tabel 5.15. Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Siap Melayani KB Di Kota Denpasar Tahun 2024

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	11
2	Klinik Pratama	19
3	Klinik Utama	3
4	RS Umum	15
5	RS Khusus	5
	Jumlah	53

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2025

Eksistensi dari fasilitas kesehatan di atas menunjukkan bahwa baik dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga rujukan telah terisi. Hal ini berarti masyarakat telah terfasilitasi diberbagai lini untuk program KB, khususnya puskesmas yang mana dengan jumlah cukup tinggi. Puskesmas menjadi penting sebab menjadi ujung tombak untuk menjaga masyarakat wilayahnya sadar akan hidup sehat dan berbagai program kesehatan.

5.13. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan, baik kepada individu maupun kelompok masyarakat. Pelayanan ini mencakup pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, hingga paliatif, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, ataupun oleh masyarakat yang berperan penting dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat, serta mempercepat upaya penanganan berbagai permasalahan kesehatan.

Berbagai fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Denpasar terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, sejalan dengan upaya meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat. Berdasarkan data Tabel 5.16. tahun 2024, terdapat 15 Rumah Sakit Umum dan 9 Rumah Sakit Khusus yang tersebar di empat kecamatan. Keberadaan rumah sakit ini menjadi pilar penting dalam memberikan pelayanan rujukan serta penanganan kasus-kasus yang membutuhkan perawatan lanjutan. Di sisi lain, meskipun belum tersedia Puskesmas Rawat Inap, keberadaan 11 Puskesmas Non Rawat Inap tetap memainkan peran vital sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Klinik Pratama dan Posyandu juga menunjukkan kontribusi signifikan dalam layanan kesehatan dasar, khususnya bagi ibu dan anak. Tercatat sebanyak 69 Klinik Pratama dan 459 Posyandu yang aktif beroperasi di tahun 2024, dengan penyebaran merata di seluruh kecamatan. Klinik Pratama memberikan layanan medis umum dan beberapa layanan spesifik seperti pemeriksaan kehamilan atau imunisasi, sedangkan Posyandu menjadi garda terdepan dalam pelayanan preventif dan

promotif di tingkat masyarakat. Penambahan jumlah fasilitas ini mencerminkan peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat

Tabel 5.16. Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu menurut Kecamatan Tahun 2023 dan 2024

Kecamatan	Rumah Sakit Umum		Rumah Sakit Khusus		Puskesmas Rawat Inap		Puskesmas Non Rawat Inap		Klinik Pratama		Posyandu	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Denpasar Selatan	2	2	0	0	0	0	4	4	14	19	108	108
Denpasar Timur	2	2	2	2	0	0	2	2	11	15	103	103
Denpasar Barat	6	5	2	4	0	0	2	2	12	16	129	129
Denpasar Utara	6	6	3	3	0	0	3	3	16	19	119	119
Kota Denpasar	16	15	7	9	0	0	11	11	53	69	459	459

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa perubahan jumlah fasilitas kesehatan tidak signifikan. Peningkatan biasanya dilatar belakangi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat akan fasilitas kesehatan. Sedangkan penurunan dikarenakan perubahan status layanan kesehatan, kekurangan tenaga medis, dan sebagainya. Di samping jumlah, kualitas dari layanan kesehatan turut diperhatikan guna memastikan masyarakat mendapat pelayanan kesehatan terbaik.

BAB VI

EKONOMI

Ekonomi berperan sebagai dasar dalam mengatur penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan bagi individu hingga masyarakat luas. Hal ini berkaitan dengan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perekonomian di Indonesia dapat diukur dari besaran Produk Domestik Bruto (PDB). PDB yang meningkat menandakan konsumsi masyarakat juga meningkat sehingga selaras dengan pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Menurut BPS (2025), pertumbuhan PDB pada tahun 2022-2024 mengalami penurunan. Pada tahun 2022 PDB Indonesia sebesar 5,31% lalu mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 5,05%, pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 5,03%. Salah satu penyebab dari menurunnya PDB adalah konsumsi rumah tangga.

Konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh tiap individu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Hal ini dapat berupa kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, hiburan, dan keinginan yang diinginkan oleh tiap individu. Besarnya pendapatan yang dimiliki oleh tiap individu maupun keluarga akan menunjukkan besarnya konsumsi akan

kebutuhan dan keinginan dari tiap individu maupun keluarga tersebut. Namun, dalam proses pemenuhan kebutuhan dan keinginan dari individu maupun keluarga, terdapat ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan.

Pemenuhan ekonomi antara laki-laki dan perempuan masih mengalami ketimpangan. Hal ini sudah terjadi sebelum Indonesia dinyatakan merdeka. Tak hanya di Indonesia, ketimpangan gender dalam pemenuhan ekonomi juga terjadi di negara-negara lain. Ketimpangan gender yang ada dapat disebabkan oleh beberapa hal. Adanya norma sosial dan budaya yang menganggap bahwa pencari nafkah utama hanyalah laki-laki sedangkan perempuan hanya melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga. Tidak meratanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan juga menjadi penyebabnya, masih banyak perempuan yang tidak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan dikarenakan dianggap kurang layak. Dengan ketimpangan pendidikan dan pekerjaan yang didapatkan laki-laki dan perempuan menyebabkan perbedaan pendapatan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan akan cenderung bekerja di sektor informal atau pekerjaan yang memiliki upah rendah. Meskipun laki-laki dan perempuan memiliki pekerjaan, jabatan, kualifikasi, dan daerah yang sama hal ini tidak menutup kemungkinan gaji yang didapatkan berbeda hal ini disebut *gender pay gap*. *Gender pay gap* merupakan perbedaan atau

kesenjangan penghasilan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan gaji yang dialami oleh perempuan juga dapat disebabkan oleh beban ganda. Beban ganda yang dimaksud yaitu perempuan harus bisa mengurus pekerjaan rumah tangga dan bekerja, sehingga karir yang dimiliki wanita sering kali terhambat dikarenakan hal ini. Selain itu, masih adanya diskriminasi dan stereotip terhadap perempuan bahwa perempuan dianggap kurang kompeten dalam bidang tertentu untuk melakukan pekerjaan. Contohnya laki-laki yang tegas akan dianggap sebagai pemimpin namun perempuan yang tegas terkadang akan dianggap emosional. Namun seiring berjalannya waktu, kinerja perempuan tidak lagi bisa dianggap remeh karena banyak perempuan yang ikut menafkahi keluarganya bahkan memiliki lebih tinggi pendapatannya dibandingkan laki-laki yang berada di keluarga tersebut,

Menurut Badan Pusat Statistik (2024), penduduk Indonesia sebanyak 281,6 juta jiwa per Juni 2024, 49,88% diantaranya ialah penduduk perempuan sedangkan penduduk laki-lakinya sebesar 50,12%. Dengan dilakukan pemberdayaan masyarakat sesuai potensi dan cakupannya, diharapkan perekonomian di Indonesia dapat tumbuh lebih baik. Khususnya perempuan yang masih mengalami diskriminasi gender dalam proses pemenuhan kebutuhan ekonomi. Perempuan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian bagi diri nya sendiri dan keluarga. Dengan pola

pemikiran dan perkembangan zaman yang terus maju, sudah banyak yang menyuarakan kesetaraan gender sehingga perempuan dan laki-laki memiliki peran yang aktif dan setara dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Perempuan dengan tugas mengurus rumah tangga juga memiliki peran untuk bekerja sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga.

Perjuangan kesetaraan gender yang terjadi tentu perlu dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah dalam kesetaraan gender dapat berupa kebijakan-kebijakan yang terkait dan program-program yang meningkatkan keterampilan perempuan. Upaya pemerintah dalam memperjuangkan kesetaraan gender berupa Pengarusutamaan Gender (PUG) yang bertujuan sebagai strategi dalam mengintegrasikan perspektif terhadap gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan. PUG ini diatur dalam berbagai pertauran pemerintah. Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) juga mengadakan pelatihan bagi perempuan untuk meningkatkan kemampuan dan peran perempuan. Salah satu daerah yang sudah menerapkan ini yaitu Kota Denpasar.

Kota Denpasar yang merupakan Ibu Kota dari Provinsi Bali juga memperjuangkan kesetaraan gender. Hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) yang menjadi dasar

hukum dalam mengintegrasikan isu gender. Selain itu, pemerintah kota Denpasar juga mengadakan program pelatihan untuk perempuan dalam upaya pemberdayaan perempuan sehingga perempuan dapat berperan aktif dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar.

Untuk mendukung penerapan dasar hukum di Kota Denpasar mengenai kesetaraan gender, pentingnya diadakan program pelatihan bagi perempuan, dan peningkatan ekonomi yang terkhusus di Kota Denpasar. Berikut tabel yang menunjukkan pengaruh pembangunan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja, produktivitas dan pendapatan penduduk yang bekerja dalam sektor yang terlampir. Dengan ini diharapkan tidak berkurangnya kesetaraan gender dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi di Kota Denpasar.

6.1 Kegiatan Utama Penduduk

Kota Denpasar merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, dan pusat pariwisata bagi Provinsi Bali. Sebagai pusat dari Provinsi Bali, Kota Denpasar menghasilkan lapangan kerja yang cukup banyak. Kota Denpasar yang memiliki 4 kecamatan, 16 kelurahan dan 27 desa ini memiliki jumlah penduduk 670.210 jiwa dengan luas wilayah 125,9 km² dan memiliki sebaran penduduk sebesar 5.323,35 jiwa/km².

Dengan jumlah penduduk yang banyak, akan terjadi persaingan tenaga kerja jika tidak diimbangi dengan cukupnya ketersediaan lapangan kerja. Pencari kerja di Denpasar tidak hanya berasal dari Kota Denpasar, pencari kerja bisa berasal dari kabupaten lain yang berada di Bali, pendatang dari luar Bali baik lokal maupun mancanegara. Hal ini semakin meningkatkan tingginya persaingan lapangan kerja. Pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan harus mempunyai kemampuan yang layak untuk mengisi kekosongan lapangan kerja dan dapat bersaing antar pencari kerja. Namun pencari kerja tidak hanya bergantung kepada pekerjaan di perusahaan saja, pencari kerja dapat membangun usahanya sendiri sehingga menguntungkan bagi dirinya dan orang lain. Dengan melakukan usaha sendiri, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Hal ini dilihat dari tenaga ingginya daya konsumsi masyarakat di Kota Denpasar.

6.2 Penduduk Usia 15-59 Tahun Menurut Jenis Kelamin

Penduduk di Indonesia terus mengalami kenaikan. Menurut BPS (2024), jumlah penduduk pertengahan tahun dari tahun 2022 sebanyak 275 ribu jiwa, pada tahun 2023 sebanyak 278 ribu jiwa dan pada tahun 2024 meningkat sebanyak 281 ribu jiwa. Dengan peningkatan penduduk yang terus terjadi

mengakibatkan adanya dampak ganda dari segi menguntungkan dan segi tantangan. Dari segi menguntungkan yaitu adanya potensi bonus demografi berarti struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah usai produktif yaitu seseorang yang berumur 15-59 tahun lebih banyak dibandingkan seseorang yang berusia 0-14 tahun dan seseorang yang berusia 60 tahun +. Namun tantangan yang harus dihadapi yaitu distribusi penduduk yang tidak merata sehingga menyebabkan perekonomian tidak merata. Usia produktif biasanya akan memilih bekerja di kota-kota besar sehingga pertumbuhan ekonomi di kota besar akan semakin tinggi. Berikut merupakan tabel mengenai Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024.

Tabel 6.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024 (ribu jiwa)

Kelompok Umur	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 14 Tahun	79,35	75,58	154,93	78,95	75,32	154,27
15– 59 Tahun	256,38	252,77	509,15	257,75	253,74	511,49
60 Tahun +	42,32	42,98	84,32	44,99	44,83	89,81
Jumlah	378,07	370,33	748,40	381,68	373,88	755,57

Catatan: Hasil Proyeksi Penduduk LF SP2020 (Pertengahan tahun/Juni)
(Data diolah)

Sumber : BPS Kota Denpasar, 2025

Tabel diatas menunjukkan jumlah menyeluruh penduduk di Kota Denpasar yang terbagi menjadi 3 kelompok umur yaitu kelompok umur 0-14 tahun, kelompok umur 15-59 tahun, dan kelompok umur 60 tahun+. Jumlah kelompok umur 0-14 tahun mengalami penurunan sebesar 0,43% yaitu pada tahun 2023 sebanyak 154,93 ribu jiwa dan pada tahun 2024 sebesar 154,27 ribu jiwa. Hal ini dapat disebabkan oleh laju pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kelompok umur 15-59 tahun atau kelompok usia produktif mengalami kenaikan sebesar 0,46% yaitu pada tahun 2023 menunjukkan 509,15 ribu jiwa dan pada tahun 2024 sebesar 511,49 ribu jiwa. Hal ini dapat menunjukkan adanya urbanisasi

dan migrasi masuk dikarenakan Kota Denpasar merupakan pusat ekonomi, pemerintahan dan pariwisata. Pada kelompok umur 60+ juga mengalami kenaikan sebesar 6,5% yaitu pada tahun 2023 sebesar 84,32 dan pada tahun 2024 sebesar 89,81. Hal ini menunjukkan adanya dukungan kebijakan pemerintah dalam kesehatan.

Terkhusus pada kelompok usia produktif yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Menurut jenis kelamin pada kelompok usia produktif mengalami kenaikan yaitu laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,53% sedangkan perempuan mengalami kenaikan 0,38%. Hal ini menjadikan dampak positif bagi Kota Denpasar dengan adanya potensi bonus demografi. Penduduk usia produktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia non produktif dapat meningkatkan pertumbuhan produktifitas masyarakatnya sehingga pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar akan meningkat. Selain itu kelompok usia produktif yang lebih tinggi dibandingkan usia non produktif dapat meringankan beban usia produktif dalam menanggung kebutuhan ekonomi usia non produktif.

6.3 Kegiatan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas

Kelompok usia produktif yaitu usia 15 Tahun keatas memiliki kegiatan yang berbeda-beda. Pada usia ini kegiatan yang dilakukan berupa bekerja, pengangguran, sekolah,

mengurus rumah tangga, dan lainnya. Berikut tabel yang menyajikan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan yang Dilakukan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024.

Tabel 6.2. Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Yang Dilakukan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024

Kegiatan	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Bekerja	234.448	187.934	422.382	234.267	176.775	411.042
Pengangguran	8.860	3.519	12.379	4.681*	4.171*	8.852*
Sekolah	24.520	24.383	48.903	30.316	25.368	55.684
Mengurus Rumah Tangga	21.865	73.585	95.450	26.615	85.950	112.565
Lainnya	9.534	5.864	15.398	7.345*	6.830*	14.175
Jumlah	299.227	295.285	594.512	303.224	299.094	602.318

Catatan : *RSE >25% tetapi ≤50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hati

Sumber : BPS Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan Tabel 6.2, kegiatan yang mendominasi untuk umur 15 tahun keatas adalah kegiatan bekerja. Namun kegiatan ini mengalami penurunan sebesar 2,68%. Berdasarkan jenis kelaminnya, jumlah laki-laki yang bekerja mengalami penurunan sebesar 0,08% dan jumlah perempuan mengalami penurunan sebesar 5,94%. Hal ini dapat disebabkan penduduk melakukan

kegiatan lainnya seperti mengurus rumah tangga dan sekolah yang selaras dengan kenaikan penduduk yang mengurus rumah tangga dan sekolah dari tahun 2023 dan tahun 2024. Sedangkan kegiatan pengangguran mengalami penurunan sebesar 28,49%. Hal ini menunjukkan akan meningkatnya kesadaran penduduk dalam melakukan kegiatan produktif.

Pembagian status pekerjaan menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Denpasar terbagi menjadi 98 pekerjaan dan 1 lainnya. Status pekerjaan terbagi terdiri dari berbagai pekerjaan. Penduduk yang bekerja umumnya penduduk yang berusia produktif dari umur 15-59 tahun. Data mengenai Jumlah Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024 tercantum dalam tabel 6.3.

Berdasarkan data tersebut, pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk kota Denpasar di dominasi oleh karyawan swasta. masih adanya lapangan kerja yang tersedia dari tahun 2023 hingga tahun Pada tahun 2023 jumlah penduduk yang bekerja sebagai karyawan swasta sebanyak 157.797 jiwa lalu meningkat pada tahun 2024 sebanyak 162.443 jiwa. Hal ini menunjukkan 2024. Pekerjaan sebagai karyawan swasta masih didominasi oleh laki-laki. Jumlah laki-laki yang bekerja sebagai karyawan swasta pada tahun 2023 sebanyak 91.681 jiwa namun menurun pada tahun 2024 menjadi 93.778 jiwa. Sedangkan jumlah perempuan

yang menjadi karyawan swasta yang mulanya pada tahun 2023 sebanyak 66.116 jiwa meningkat pada tahun 2024 menjadi 68.665 jiwa. Hal ini menunjukkan peran aktif perempuan untuk eksis di dunia pekerjaan. Hal ini juga menunjukkan upaya positif perusahaan yang sudah mulai menerima karyawan perempuan untuk menjadi pekerjanya. Dengan ini diharapkan berkurangnya ketimpangan gender di antara pencari kerja.

Tabel 6.3 Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024

STATUS	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Belum/Tidak Bekerja	69.725	72.833	66.550	69.590	136.275	142.423
Mengurus Rumah Tangga	3	4	65.991	65.950	65.994	65.954
Pelajar/ Mahasiswa	79.114	77.450	71.706	70.017	150.820	147.467
Pensiunan	5.690	5.637	2.441	2.503	8.131	8.140
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	9.126	8.968	8.621	8.528	17.747	17.496
Tentara Nasional Indonesia (TNI)	1.691	1.716	93	93	1.784	1.809
Kepolisian Ri (Polri)	2.362	2.306	267	269	2.629	2.575
Perdagangan	2.057	2.004	3.001	2.940	5.058	4.944
Petani/Pekebunan	1.835	1.814	1.368	1.363	3.203	3.177
Peternak	103	102	31	36	134	138
Nelayan/Perikanan	530	525	146	139	676	664
Industri	171	169	112	112	283	281

Kontruksi	333	323	70	67	403	390
Transportasi	473	466	33	31	506	497
Karyawan Swasta	91.68 1	93.77 8	66.11 6	68.66 5	157.79 7	162.44 3
Karyawan Bumh	2.272	2.249	1.224	1.233	3.496	3.482
Karyawan Bumh	515	515	271	273	786	788
Karyawan Honorer	1.534	1.553	1.428	1.436	2.962	2.989
Buruh Harian Lepas	4.316	4.338	2.337	2.356	6.653	6.694
Buruh Tani/Perkebunan	789	763	632	612	1.421	1.375
Buruh Nelayan/Perikanan	79	77	12	11	91	88
Nburuh Peternakan	21	20	10	9	31	29
Pembantu Rumah Tangga	18	15	278	269	296	284
Tukang Cukur	54	52	5	5	59	57
Tukang Listrik	176	175	2	2	178	177
Tukang Batu	415	404	13	13	428	417
Tukang Kayu	525	514	9	9	534	523
Tukang Sol Sepatu	14	13	1	1	15	14
Tukang Las/Pandai Besi	114	108	2	2	116	110
Tukang Jahit	322	317	867	846	1.189	1.163
Tukang Gigi	3	3	0	0	3	3
Penata Rias	2	2	115	113	117	115
Penata Busana	8	7	14	13	22	20
Penata Rambut	8	8	70	70	78	78
Mekanik	466	461	1	1	467	462
Seniman	313	316	49	55	362	371
Tabib	10	10	1	1	11	11
Paraji	6	4	3	3	9	7

Perancang Busana	1	1	27	27	28	28
Penterjemah	24	23	9	9	33	32
Imam Masjid	7	7	0	0	7	7
Pendeta	254	257	22	29	276	286
Pastor	6	6	0	0	6	6
Wartawan	94	92	15	17	109	109
Ustadz/Mubaligh	22	22	9	9	31	31
Juru Masak	98	95	21	51	119	146
Promotor Acara	3	3	1	1	4	4
Anggota Dpr Ri	1	1	0	0	1	1
Anggota Dpd Ri	1	1	0	0	1	1
Anggota Bpk	2	1	1	1	3	2
Presien	0	0	0	0	0	0
Wakil Presiden	0	0	0	0	0	0
Anggota Mahkamah Konstitusi	0	0	0	0	0	0
Anggota Kabinet Kementrian	1	1	0	0	1	1
Duta Besar	0	0	0	0	0	0
Gubernur	0	0	0	0	0	0
Wakil Gubernur	0	0	0	0	0	0
Bupati	0	0	0	0	0	0
Wakil Bupati	0	0	0	0	0	0
Walikota	1	1	0	0	1	1
Wakil Walikota	1	1	0	0	1	1
Anggota Dprd Prop.	3	3	0	0	3	3
Anggota Dprd Kab/Kota	15	16	1	1	16	17
Dosen	1.069	1.094	804	829	1.873	1.923
Guru	1.012	1.028	3.141	3.208	4.153	4.236
Pilot	13	17	0	0	13	17

Pengacara	186	191	245	58	431	249
Notaris	108	113	107	116	215	229
Arsitek	417	413	60	60	477	473
Akuntan	21	22	24	27	45	49
Konsultan	128	123	44	45	172	168
Dokter	1.218	1.282	1.336	1.414	2.554	2.696
Bidan	0	0	448	470	448	470
Perawat	124	129	808	843	932	972
Apoteker	54	56	133	140	187	196
Psikiater/Psikolog	8	8	30	32	38	40
Penyiar Televisi	0	0	3	3	3	3
Penyiar Radio	11	10	5	5	16	15
Pelaut	241	239	6	6	247	245
Peneliti	15	15	14	15	29	30
Sopir	1.422	1.399	6	6	1.428	1.405
Pialang	4	4	5	5	9	9
Paranormal	9	9	6	6	15	15
Pedagang	2.913	2.850	6.476	6.355	9.389	9.205
Perangkat Desa	93	96	60	61	153	157
Kepala Desa	12	13	0	0	12	13
Biarawan/ Biarawati	0	0	6	7	6	7
Wiraswasta	45.10 1	45.48 0	26.01 0	26.45 5	71.111	71.935
Anggota Lembaga Tinggi Lainnya	51	51	61	60	112	111
Artis	0	0	0	0	0	0
Atlit	0	0	0	0	0	0
Cheff	1	1	0	0	1	1
Manajer	1	1	0	0	1	1
Tenaga Tata Usaha	0	0	0	0	0	0
Operator	0	0	0	0	0	0

Pekerja Pengolahan Kerajinan	0	0	0	0	0	0
Teknisi	0	0	0	0	0	0
Asisten Ahli	0	0	0	0	0	0
Pekerjaan Lainnya	7	31	4	38	11	69

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, 2025

Kelompok Wanita Tani (KWT) merupakan suatu organisasi perempuan yang terlibat dalam kegiatan pertanian untuk mencapai kepentingan dan tujuan bersama sehingga meningkatkan kesejahteraan anggota KWT melalui pengembangan usaha tani dan pemberdayaan perempuan di bidang pertanian. KWT yang berada di Kota Denpasar dipimpin oleh Kecamatan Denpasar Utara yaitu sebanyak 4 KWT sedangkan kecamatan lainnya yaitu Denpasar Timur, Denpasar Selatan dan Denpasar Barat masing-masing memiliki 3 KWT. Dengan adanya KWT di Kota Denpasar dapat memberdayakan perempuan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh perempuan di Kota Denpasar. Tentu perlu adanya dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah dalam keberlangsungan jalannya KWT yang ada di Kota Denpasar. Berikut merupakan tabel yang menyajikan Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kota Denpasar Tahun 2024.

Tabel 6.4. Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kota Denpasar Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah KWT Tahun 2024
Denpasar Utara	4
Denpasar Timur	3
Denpasar Selatan	3
Denpasar Barat	3
Jumlah	13

Sumber : Dinas Pertanian Kota Denpasar, 2025

6.4 Tenaga Penyuluh Pertanian

Penyuluh pertanian sering kali disebut sebagai *agent of change* atau agen perubahan. Hal ini tentu memiliki alasan tersendiri. Penyuluh pertanian memiliki peran dalam menggerakkan dan memfasilitasi perubahan perilaku, pengetahuan, dan keterampilan petani sehingga produktivitas dan kesejahteraan petani meningkat. Dengan adanya *agent of change* ini dapat mengubah hidup petani dan pertumbuhan pertanian di Indonesia khususnya di Kota Denpasar. Penyuluh pertanian memiliki banyak peran dalam pertanian, penyuluh pertanian dapat menjadi guru, analisator, konsultan, hingga organisator. Berikut merupakan tabel Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024.

Tabel 6.5. Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024

No	Kecamatan	No	Nama	Jenis Kelamin
1	Denpasar Utara	1	Luh Ketut Ari Abadi, S.P.	Perempuan
		2	Rully Fitri Sianti Dewi	Perempuan
		3	I Ketut Budiawan, S.P.	Laki-laki
		4	Ni Luh Erna Wati, S.P.	Perempuan
2	Denpasar Timur	1	Ni Wayan Lilis Sukma Dewi	Perempuan
		2	I Made Dwipayasa, S.P.	Laki-laki
		3	Ir. Luh Mas Ayustini	Perempuan
		4	Drh. Putu Gede Eka Dharmana, S.Kh.	Laki-laki
3	Denpasar Selatan	1	Ni Nyoman Trisna Kartika, S.P.	Perempuan
		2	Drh. Man Hetik, S.Kh.	Perempuan
		3	I Komang Adi Widyastama, S.P.	Laki-laki
		4	Muhammad David Hermawan, S.P.	Laki-laki
4	Denpasar Barat	1	Luh Ketut Ayu Sukarmi, S.P.	Perempuan
		2	Drh. Kadek Nancy Marcolina, S.Kh.	Perempuan
		3	Randini Resmi Anitis, S.P.	Perempuan

Sumber : Dinas Pertanian Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, 10 dari 15 tenaga penyuluh pertanian berjenis kelamin perempuan sedangkan sisanya yaitu 5 orang merupakan penyuluh pertanian berjenis kelamin laki-laki. Hal ini membuktikan bahwa adanya kesetaraan gender sebagai penyuluh pertanian. Tenaga penyuluh pertanian perempuan

dianggap mampu dan setara dengan penyuluh pertanian laki-laki sebagai *agent of change* dalam sektor pertanian. Lembaga pendidikan dan pelatihan pertanian juga memberikan kesempatan yang lebih besar untuk perempuan sebagai penyuluh pertanian sehingga kesenjangan gender di antara penyuluh berkurang. Dengan adanya penyuluh pertanian berjenis kelamin perempuan, diharapkan mampu ikut serta dalam meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi dengan penyuluhan yang efektif dan pendekatan yang lebih baik terkhusus pada petani yang berjenis kelamin perempuan.

6.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator ketenagakerjaan penduduk usia produktif yakni penduduk usia 15 tahun keatas, angkatan kerja pada TPAK merupakan orang yang sudah bekerja dan orang yang sedang mencari pekerjaan. Semakin tinggi tingkat TPAK maka semakin banyak penduduk usia produktif yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Berikut merupakan tabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024.

Tabel 6.6. Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024

Jenis Kelamin	Tahun	
	2023	2024
Laki-laki	81,31%	78,80%
Perempuan	64,84%	60,50%

Sumber : BPS Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan tabel diatas, tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami penurunan. Angkatan kerja berjenis kelamin laki-laki mengalami penurunan sebesar 2,51%. Sedangkan angkatan kerja berjenis kelamin perempuan mengalami penurunan sebesar 4,34%. Kondisi ini dapat menggambarkan ekonomi, sosial, dan kebijakan yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk bekerja. Hal ini juga dapat disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, berpindahnya kegiatan yang dilakukan oleh penduduk usia 15 tahun keatas seperti kembali sekolah hingga keputusan seseorang untuk memilih mengurus rumah tangga dibandingkan bekerja. Oleh karena itu angkatan kerja harus bisa mengupayakan membuat lapangan kerja sendiri bersamaan

melakukan kegiatan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga sehingga dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, orang lain, dan peningkatan ekonomi daerah.

Ditinjau dari Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Denpasar sebesar 2,85% tahun 2023. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase dari angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha. TPT menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur kondisi pasar tenaga kerja dan ekonomi suatu negara atau wilayah.

Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2023 tingkat pengangguran laki-laki sebesar 3,64%, perempuan sebesar 1,84%. Sedangkan pada tahun 2024 laki-laki sebesar 1,94% dan perempuan sebesar 1,62%. Jika TPT laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, artinya persentase laki-laki yang menganggur dan aktif mencari pekerjaan lebih besar dibandingkan perempuan dalam angkatan kerja. Banyak sektor kerja yang didominasi laki-laki (seperti konstruksi, manufaktur) bisa mengalami penurunan permintaan tenaga kerja, sehingga meningkatkan pengangguran.



**Gambar 5.17 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Denpasar
Tahun 2023 dan 2024**

Sumber: BPS Denpasar, 2025

6.6 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Perempuan di Kota Denpasar telah mulai mengambil peran dalam jabatan struktural di berbagai instansi pemerintahan, seperti: kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bidang, dan kepala seksi. Beberapa perempuan juga menjabat sebagai camat, lurah, atau kepala bagian di lingkup Setda Kota Denpasar.

Pemerintah Kota Denpasar telah mendorong program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), dengan melibatkan pejabat perempuan dalam: Forum Musrenbang (Musyawarah

Perencanaan Pembangunan); tim penyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, tim teknis pengarusutamaan gender di OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Namun, implementasinya belum optimal, karena masih terdapat gap kapasitas dan pemahaman teknis di kalangan aparatur pemerintah.

Dilihat dari jumlah perempuan yang bekerja di lembaga pemerintahan, ASN menduduki posisi tertinggi 8.621 orang di tahun 2023 dan 8.528 orang di tahun 2024. Persentase perempuan yang bekerja di lembaga pemerintahan sebesar 4,86% di tahun 2023 meningkat menjadi 5,13% di tahun 2024. Ini menunjukkan keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintahan di Kota Denpasar sudah menunjukkan kemajuan, terutama dalam jabatan fungsional dan teknis. Namun, perlu penguatan lebih lanjut untuk mendorong perempuan masuk dalam posisi strategis dan pengambilan keputusan, melalui kebijakan afirmatif, pelatihan kepemimpinan perempuan, serta budaya organisasi yang inklusif gender.

Tabel 6.7 Jumlah Perempuan yang Bekerja di Lembaga Pemerintahan di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024

No	Perempuan yg bekerja di Lembaga Pemerintah	Tahun	
		2023	2024
1	ASN	8.621	8.528
2	Tentara	93	93
3	Polisi	267	269
4	Anggota BPK	1	1
5	Anggota DPR RI	0	0
6	Hakim	8	12
7	Jaksa	21	12
8	Perangkat desa	60	61
9	Anggota lembaga tinggi	61	60
	Jumlah	9.132	9.036

Tabel: 6.8 Pesentase Perempuan yang Bekerja di Lembaga Pemerintahan di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024

No	Indikator	Tahun	
		2023	2024
1	Jumlah pekerja Perempuan (orang)	187.934	176.775
2	Jumlah pekerja Perempuan di lembaga pemerintahan (orang)	9.132	9.063
3	Persentase Partisipasi Perempuan yang bekerja di Lembaga Pemerintahan(%)	4,86	5,13

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Kantor Pengadilan Denpasar, 2025

6.8 Partisipasi Perempuan di Sektor Swasta

Perempuan berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai posisi, seperti: karyawan di perusahaan swasta, termasuk bidang manufaktur, jasa, perdagangan, dan teknologi; pemilik atau pendiri usaha (wirausahawan/wirausahawati), termasuk UMKM yang didominasi perempuan di berbagai daerah, manajer dan eksekutif, yang mulai menunjukkan peningkatan meskipun masih ada ketimpangan gender pada tingkat pimpinan puncak.

Tabel 6.9 Jumlah Perempuan yang Bekerja di Sektor Swasta

No	Perempuan yg bekerja di Lembaga Swasta	Tahun	
		2023	2024
1	Karyawan Swasta	66.116	68.665
2	Wiraswasta	26.010	26.455
3	Konsultan	44	45
4	Akuntan	24	27
5	Arsitek	60	60
6	Notaris	107	116
7	Pengacara	59	58
8	Pedagang	6.476	6.355
9	Perancang busana	27	21
10	Seniman	49	55
11	Juru masak	51	51
12	Mekanik	1	1
13	Penata rias	115	113
14	Penata busana	14	13
15	Penata rambut	70	70
	Jumlah	99.223	102.105

Sumber: Discapil Kota Denpasar, 2025

Tabel: 6.10. Pesentase Perempuan yang Bekerja di Lembaga Swasta di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024

No	Indikator	Tahun	
		2023	2024
1	Jumlah pekerja Perempuan (orang)	187.934	176.775
2	Jumlah pekerja Perempuan di lembaga swasta (orang)	99.223	102.105
3	Persentase Partisipasi Perempuan yang bekerja di Lembaga Swasta (%)	52,80	57,76

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Kantor Pengadilan Denpasar, 2024

Berdasarkan Tabel 6.9 terlihat bahwa persentase perempuan yang bekerja di sektor swasta mengalami peningkatan sebesar 0,62% dari tahun 2023-2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa proporsi perempuan yang bekerja di sektor swasta lebih besar dibandingkan sektor lain (misalnya sektor publik/pemerintahan), atau dibandingkan dengan laki-laki di sektor yang sama. Penyebab persentase perempuan tinggi di sektor swasta adalah sebagai berikut: lebih banyak peluang di sektor jasa dan industri padat karya, seperti ritel, manufaktur, tekstil, dan administrasi yang banyak mempekerjakan perempuan; fleksibilitas waktu kerja atau sistem kontrak yang

lebih sesuai dengan kebutuhan perempuan, terutama yang merangkap peran domestik; persaingan ketat di sektor pemerintahan dan keterbatasan jumlah posisi tetap yang tersedia; pendidikan dan keterampilan perempuan cocok dengan bidang pekerjaan di sektor swasta (seperti layanan pelanggan, keuangan, dll). Persentase perempuan yang bekerja di lembaga swasta sebesar 52,80% di tahun 2023 menjadi 57,76% di tahun 2024.

6.8 Tenaga Kerja Asing Pendetang

Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah orang yang bukan warga negara Indonesia namun bekerja di Indonesia untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. TKA harus memiliki visa kerja agar bisa bekerja di Indonesia. Dengan adanya TKA di Indonesia diharapkan dapat mengisi kekosongan tenaga kerja terampil dan professional yang belum dapat terisi oleh tenaga kerja Indonesia. Selain itu, dengan TKA diharapkan proses pembangunan dapat lebih cepat dengan didukung teknologi dan peningkatan investasi yang dilakukan oleh tenaga kerja asing. Berikut merupakan tabel Tenaga Kerja Asing Pendetang Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023-2024.

Tabel 6.11 Tenaga Kerja Asing Pendatang Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024

Jenis Kelamin	Tahun	
	2023	2024
Laki-laki	211	523
Perempuan	148	341
Jumlah	359	864

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data tersebut, jumlah tenaga kerja asing dari tahun 2023 ke tahun 2024 meningkat drastis. Pada tahun 2023 hanya ada 359 orang tenaga kerja asing namun pada tahun 2024 meningkat menjadi 864 orang. Jumlah tenaga kerja asing masih didominasi pada tenaga kerja berjenis kelamin laki-laki namun tenaga kerja asing berjenis kelamin perempuan juga mengalami peningkatan sebesar 56%. Hal ini menunjukkan tak hanya perempuan Indonesia yang sadar akan pentingnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan tidak bergantung kepada orang lain, perempuan dari negara asing pun memiliki pemikiran yang sama. Hal ini disebabkan oleh kurangnya motivasi dan kompetensi tenaga kerja lokal untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja sehingga tenaga kerja lokal tidak dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Selain itu peluang investasi yang tinggi

dikarenakan letak startegi Kota Denpasar sebagai pusat ekonomi menyebabkan perusahaan asing tertarik untuk bekerja di Kota Denpasar. Dengan ini perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan yang sudah diatur oleh pemerintah seperti Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/821/HK/2022 yang membentuk tim untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap TKA sehingga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6.9 Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Lingkungan hidup dan kebersihan merupakan kondisi daerah yang terbebas dari kotoran, sampah, debu, hingga pencemaran yang membahayakan bagi masyarakat. Dengan meningkatnya kualitas lingkungan hidup maka meningkat juga kualitas hidup masyarakat. Untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik diperlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat harus sadar akan pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat. Pemerintah sebagai pembuat regulasi dan penggerak programnya harus bisa mengajak dan memberdayakan masyarakat untuk mencapai lingkungan yang bersih. Upaya pemerintah khususnya di Kota Denpasar untuk menjaga lingkungan yang bersih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan meliputi: penanganan sampah, pengurangan

sampah, penataan taman dan penataan pohon perindang yang ada di wilayah Kota Denpasar. Berikut merupakan data mengenai Jumlah Tenaga Kebersihan menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024.

Tabel 6.12. Jumlah Tenaga Kebersihan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024

Jenis Kelamin	Tahun	
	2023	2024
Laki-laki	815	898
Perempuan	560	571
Jumlah	1.375	1.469

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data tersebut, jumlah tenaga kebersihan menurut jenis kelamin di Kota Denpasar meningkat sebanyak 7% dan didominasi oleh laki-laki. Pada tahun 2023 jumlah tenaga kerja laki-laki sebanyak 815 orang dan meningkat menjadi 898 orang pada tahun 2024. Hal ini mengalami kenaikan sebesar 10%. Selaras dengan tenaga kebersihan berjenis kelamin laki-laki, tenaga kebersihan juga mengalami kenaikan. Jumlah tenaga kebersihan mengalami kenaikan sebesar 2%. Pada tahun 2023 yang berjumlah 560 orang perempuan dan pada tahun 2024 menjadi 571 orang. Tenaga kebersihan berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dikarenakan pekerjaan ini membutuhkan kekuatan fisik yang lebih besar. Tenaga kebersihan dibagi menjadi beberapa jabatan.

Petugas kebersihan di Kota Denpasar dibagi menjadi 4 yaitu satgas, mandor, tenaga kebersihan, dan tenaga pertanaman. Pada tabel 6.9 yang berisi jumlah petugas kebersihan menurut jenis kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan peningkatan total keseluruhan. Peningkatan ini sebesar 7,38% dimana pada tahun 2023 jumlah petugas kebersihan sebanyak 1.300 orang dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 1.396 orang. Namun, pada jabatan satgas dan tenaga kebersihan mengalami penurunan jumlah. Pada satgas mengalami penurunan sebesar 4,65% yang semula hanya terdapat tenaga laki-laki sebanyak 43 orang lalu berkurang menjadi 41 orang laki-laki di tahun 2024. Pada jabatan tenaga kebersihan, mengalami total penurunan sebesar 4% yang semula berjumlah 1.257 tenaga kebersihan namun pada tahun 2024 berkurang menjadi 1.206 tenaga kebersihan. Jabatan mandor tidak memiliki petugas kebersihan dari tahun 2023-2024. Sedangkan jabatan tenaga pertanaman yang semula pada tahun 2023 tidak memiliki tenaga kebersihan namun di tahun 2024 sudah memiliki tenaga kebersihan yang didominasi oleh tenaga kebersihan berjenis kelamin laki-laki. Berikut merupakan data mengenai Jumlah Petugas Kebersihan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024.

Tabel 6.13. Jumlah Petugas Kebersihan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024

Jenis Kelamin	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Satgas	43	0	43	41	0	41
Mandor	0	0	0	0	0	0
Tenaga Kebersihan	733	524	1.257	696	510	1.206
Tenaga Pertamanan	0	0	0	123	26	149
Jumlah	776	524	1.300	860	536	1.396

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, 2025

Tabel 6.14. Jumlah Tenaga Kebersihan dan Pertamanan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sektor Taman Kota	13	7	20
2	Sektor Lapangan Lumintang	6	3	9
3	Sektor Puputan Badung	1	10	11
4	Sektor Taman Janggan	3	3	6
5	Sektor Penyiraman	26	0	26
6	Sektor Pembibitan	5	1	6
7	Sektor Perawatan	69	2	71
Jumlah		123	26	149

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data tersebut, jumlah tenaga kebersihan dan pertanaman menurut jenis kelamin di Kota Denpasar pada tahun 2024 didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 123 orang. Tenaga kebersihan dan Pertamanan dibagi menjadi menjadi 7 sektor dan masih di dominasi oleh laki-laki sebagai tenaga kebersihannya kecuali di sektor puputan badung yang didominasi perempuan sebanyak 10 orang. Masih banyaknya didominasi oleh laki-laki dapat disebabkan oleh pekerjaannya yang dianggap lebih berat untuk dilakukan oleh perempuan.

6.10 Petugas Layanan Parkir

Petugas layanan parkir merupakan petugas yang mengelola kendaraan yang parkir di tempat umum dan pelantaran. Pengelolaan petugas layanan parkir di Denpasar diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar No. 11 Tahun 2005 mengenai penyelenggaraan perparkiran. Tabel 6.11. berikut merupakan data mengenai Jumlah Petugas Layanan Parkir Dalam Rumija dan Luar Rumija menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024.

Tabel 6.15. Jumlah Petugas Layanan Parkir Dalam Rumija dan Luar Rumija menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024

Kecamatan	Tahun 2024		
	L	P	Jumlah
Denpasar Utara	107	2	109
Denpasar Timur	106	4	110
Denpasar Selatan	97	2	99
Denpasar Barat	83	5	88
Jumlah	393	13	406

Sumber : Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data diatas, jumlah petugas layanan parkir didominasi oleh laki-laki. Petugas layanan parkir berjenis kelamin laki-laki sebanyak 393 orang sedangkan berbanding terbalik dengan perempuan hanya 13 orang. Hal ini dikarenakan pekerjaan sebagai petugas layanan parkir yang dianggap pekerjaan berat dan tidak lazim dikerjakan oleh perempuan. Namun 13 orang perempuan yang menjadi petugas layanan parkir di Kota Denpasar ini menunjukkan bahwa gender tidak mempengaruhi pekerjaan. 13 orang petugas layanan parkir perempuan ini adalah bukti nyata bahwa perempuan bisa

melakukan pekerjaan yang masih dianggap tidak lazim untuk dikerjakan perempuan. Menurut Elfira (2021), perempuan bekerja sebagai petugas layanan parkir ialah untuk membantu dan menolong suami dalam urusan perekonomian keluarga, ketertarikan ini juga berasal dari anggota keluarganya yaitu suami yang juga berprofesi sebagai petugas layanan parkir.

6.11 Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata

Bali dikenal dengan kekayaan alam nya yang indah. Kalimat ini sangat sering terdengar bagi pelaku wisata. Hal ini juga menjadikan sektor pariwisata di Bali menjadi sektor penggerak ekonomi, tak terkecuali Kota Denpasar. Banyaknya hotel, restoran, dan sarana pariwisata lainnya merupakan salah satu bentuk nyata bahwa pariwisata di Bali menyebabkan pelaku usaha yang lain bergerak dan memenuhi kebutuhan ekonominya. Perkembangan ekonomi melibatkan semua pelaku wisata termasuk pengunjung, penyedia jasa, pemerintah, masyarakat, Lembaga swadaya masyarakat, hingga media. Berikut merupakan tabel Jumlah Tenaga Kerja yang terserap di sektor pariwisata menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024.

Tabel 6.16. Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap di Sektor Pariwisata menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024

Jenis Usaha	2024		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Hotel Bintang	3217	1191	4408
Hotel Non Bintang	1082	573	1655
Pondok Wisata	142	109	251
Villa	324	158	482
Jumlah	4765	2031	6796

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data diatas, tenaga kerja yang terserap di sektor pariwisata masih didominasi oleh laki-laki sebanyak 4765 orang sedangkan perempuan hanya 2031 orang. perbedaan yang cukup besar ini disebabkan kebutuhan tenaga fisik dan tanggung jawab yang lebih besar yang berada di sektor pariwisata. Selain itu masih adanya kesenjangan akses dan peran gender dalam sektor ini. Menurut Teguh (2015), Perempuan di bidang industri pariwisata hanya mendapatkan 10% sampai 15% lebih sedikit dari pada tenaga kerja laki-laki. Namun sebanyak 2031 perempuan yang bekerja di sektor pariwisata membuktikan bahwa perempuan juga mendapatkan hak untuk bekerja di sektor ini meskipun pekerjaan ini membutuhkan kebutuhan fisik dan tanggung jawab yang lebih besar.

Pekerjaan di sektor pariwisata bermacam-macam, dimulai dari *guide*, bagian *kitchen and bar*, hingga penanggung jawab

usaha akomodasi di Kota Denpasar. Berikut merupakan tabel mengenai Jumlah Penanggung Jawab Usaha Akomodasi di Kota Denpasar menurut Jenis Kelamin tahun 2024.

Tabel 6.17 Jumlah Penanggung Jawab Usaha Akomodasi di Kota Denpasar menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

Jenis Usaha	Tahun 2024		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Hotel	61	15	76
Hotel Non Bintang	337	101	438
Pondok Wisata	82	17	99
Villa	115	41	156
Restoran	465	131	596
Rumah Makan	370	69	439
Bar	7	1	8
Jumlah			1.812

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data diatas, penanggung jawab usaha akomodasi masih didominasi oleh laki-laki. Sebanyak 1437 laki-laki menjadi penanggung jawab dalam usaha akomodasi nya sedangkan sebanyak 375 perempuan yang menjadi penanggung

jawab dalam usaha akomodasinya. Hal ini selaras dengan masih didominasikannya tenaga kerja laki-laki di sektor pariwisata.

Sedangkan tenaga kerja yang diserap pada bidang usaha hotel dan restaurant menurut jenis kelamin tahun 2024 juga masih didominasi oleh laki-laki. Sebanyak 173 orang laki-laki yang bekerja di bidang usaha hotel dan restaurant sedangkan terdapat 163 perempuan yang bekerja pada bidang ini. Berikut tabel yang menunjukkan Tenaga Kerja yang Diserap pada Bidang Usaha Hotel dan Restaurant menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

Tabel 6.18. Tenaga Kerja yang Diserap pada Bidang Usaha Hotel dan Restaurant menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

Jenis Usaha	Tahun 2024		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sektor Pariwisata (Hotel dan Restaurant)	173	163	336

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Denpasar, 2025

6.12 Pemilik Usaha Salon Kecantikan

Dewasa ini, penampilan seseorang tidak dapat dianggap sebelah mata. Pasalnya penampilan dapat memberikan kesan

pertama dari seseorang. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk memberikan penampilan terbaiknya khususnya perempuan. Penampilan perempuan khususnya di bagian wajah dan rambut dengan baik akan meningkatkan kepercayaan diri dari perempuan tersebut. Tak hanya perempuan, laki-laki akan mengalami hal yang sama dalam meningkatkan kepercayaan dirinya. Berikut merupakan tabel mengenai Usaha Salon Kecantikan menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024.

Tabel 6.19. Usaha Salon Kecantikan menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	(Orang)	(Orang)	(Orang)
Denpasar Utara	7	36	43
Denpasar Timur	10	60	70
Denpasar Selatan	9	34	43
Denpasar Barat	5	28	33
Jumlah	31	158	189

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data tersebut, perempuan mendominasi usaha ini. Sebanyak 158 orang perempuan memiliki usaha salon kecantikan sedangkan sebanyak 31 orang laki-laki memiliki usaha

ini. Di Denpasar Timur, usaha salon kecantikan sangat diminati oleh masyarakat, hal ini dilihat dari banyaknya mayoritas salon kecantikan dibandingkan wilayah kecamatan lain.

6.13 KK Terdaftar pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) merupakan sistem data yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. DTKS berisi informasi mengenai individu, keluarga, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial dan penerima bantuan. Berikut disajikan tabel mengenai Jumlah KK Terdaftar pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) menurut Rumah Tangga (RT) dan Anggota Rumah Tangga (ART) di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024.

Tabel 6.20 Jumlah KK Terdaftar Pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) menurut Rumah Tangga (RT) dan Anggota Rumah Tangga (ART) di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024

Tahun	RT	ART
2023	60.729	193.523
2024	55.264	159.998
Jumlah	115.993	353.521

Sumber: Dinas Sosial Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data tersebut, jumlah KK yang terdaftar pada DTKS mengalami penurunan. KK Rumah Tangga (RT) yang terdaftar mengalami penurunan sebesar 9%. Sedangkan Anggota Rumah Tangga (ART) juga mengalami penurunan sebesar 17%. Menurunnya jumlah KK yang terdaftar pada DTKS menandakan hal baik yang berarti menurun juga kebutuhan akan kesejahteraan sosial dan penerima bantuan. Masyarakat dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

6.14 Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Pendidikan sangatlah penting bagi pencari kerja. Tingkat pendidikan menjadi salah satu penentu untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi yang lebih baik. Dikelompokkannya jumlah pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikannya dapat melihat mayoritas pencari kerja dan melihat letak kurangnya ketersediaan lapangan kerja. Berikut merupakan tabel mengenai Jumlah Pencari Kerja yang Telah Ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024

Tabel 6.21 Jumlah Penduduk berusia 15 tahun keatas yang bekerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sekolah Dasar ke Bawah	32.304	29.168	61.472
Sekolah Menengah Pertama	24.512	23.016	47.528
Sekolah Menengah Atas	61.176	36.339	97.515
Diploma I/II/III/Akademi	21.614	13.390	35.004
Universitas	54.481	49.360	103.841

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data diatas, mayoritas penduduk bekerja menurut tingkat pendidikan berada di Universitas dengan jumlah 103.841 orang. Dalam hal ini, penduduk yang dominan bekerja merupakan penduduk yang sudah menyelesaikan pendidikan di Universitas. Jumlah penduduk laki-laki bekerja berjenis kelamin laki-laki sebanyak 54.481 dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 49.360. Jumlah penduduk laki-laki bekerja lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan dapat disebabkan oleh peran gender yang menganggap laki-laki sebagai pencari nafkah utama sedangkan perempuan lebih baik mengurus rumah tangga sehingga penduduk berjenis kelamin perempuan yang telah lulus dari universitas tidak langsung masuk atau bertahan di dunia kerja

terlebih lagi jika sudah menikah dan memiliki anak dikarenakan terjadinya pekerjaan yang tidak fleksibel sehingga perempuan tidak dapat memenuhi peran ganda yang dimilikinya.

Tabel 6.22. Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024

No	Lapangan Usaha	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Industri Pengolahan	16.318	22.403	38.721
2	Konstruksi	18.417	1.685*	20.102
3	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	55.772	58.238	114.010
4	Pengangkutan dan Pergudangan	28.716	2.631*	31.347
5	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	39.576	30.939	70.515
6	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	10.855 ²	7.077*	17.932
7	Aktivitas Profesional dan Perusahaan	14.657	5.404*	20.061
8	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13.373	5.643*	19.016
9	Pendidikan	6.583*	15.730	22.313
10	Aktivitas Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.160*	11.130	13.290
11	Aktivitas Jasa Lainnya	18.073	12.958	31.031
	JUMLAH	224.500	173.838	398.338

Catatan : *RSE >25% tetapi ≤50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hati

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jenis lapangan usaha yang dominan berada di Kota Denpasar. Mayoritas penduduk di Kota Denpasar bekerja di sektor usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yaitu sebanyak 114.010 orang. Pekerjaan ini didominasi oleh wanita sebanyak 58.238 orang sedangkan laki-laki sebanyak 55.772 orang. Sektor usaha ini membutuhkan tenaga kerja yang banyak dikarenakan Kota Denpasar merupakan pusat aktivitas ekonomi dan pariwisata sehingga terjadinya peningkatan permintaan akan perdagangan dan layanan perawatan kendaraan.

6.15 UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang memiliki modal usaha maksimal 10 miliar dan omzet usaha maksimal 50 miliar per tahun. Kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu Warung, usaha skala rumahan, pedagang kaki lima, hingga toko kelontong termasuk UMKM. Begitu pun halnya restoran, kafe, apotik, klinik kecantikan, hotel, penginapan, cucian mobil, dan usaha lainnya yang memiliki modal usaha maksimal 10 miliar dan omzet usaha maksimal 50 miliar per tahun masih masuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kecamatan Denpasar Barat memiliki UMKM terbanyak dengan jumlah 10.469 di Kota Denpasar. Pemilik UMKM di dominasi oleh pihak perempuan di setiap kecamatan. Hal ini berarti perempuan lebih tinggi memiliki jiwa wirausaha dibandingkan laki-laki seperti data yang terlihat pada Tabel 6.19 di bawah ini.

Tabel 6.23 Jumlah Pemilik UMKM Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Pemilik UMKM		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Denpasar Utara	4.371	5.342	9.713
2	Denpasar Selatan	3.566	4.360	7.926
3	Denpasar Barat	4.711	5.758	10.469
4	Denpasar Timur	2.133	2.606	4.739

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, 2025

UMKM dapat meningkatkan kebutuhan ekonomi dan menyediakan lapangan kerja bagi orang lain. Berikut merupakan tabel mengenai Jenis Usaha dan Data Jumlah Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin pada UMKM Kota Denpasar 2024.

Tabel 6.24 Jenis Usaha dan Data Jumlah Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin Pada UMKM Kota Denpasar 2024

No	Kecamatan	Jenis Usaha	Jenis Kelamin		
			L	P	Jml
1	Denpasar Utara	1. Kuliner	1.016	1.525	2.541
		2. Industri Kerajinan Tangan	616	924	1.540
		3. Jasa	404	606	1.010
		4. Pertanian	1.414	2.121	3.535
		5. Peternakan	434	653	1.087
2	Denpasar Selatan	1. Kuliner	1.216	1.825	3.041
		2. Industri Kerajinan Tangan	818	1.227	2.045
		3. Jasa	390	587	977
		4. Pertanian	343	516	859
		5. Peternakan	405	608	1.013
3	Denpasar Barat	1. Kuliner	1.503	2.255	3.758
		2. Industri Kerajinan Tangan	1.268	1.902	3.170
		3. Jasa	518	779	1.297
		4. Pertanian	478	718	1.196
		5. Peternakan	419	629	1.048
4	Denpasar Timur	1. Kuliner	652	979	1.631
		2. Industri Kerajinan Tangan	473	710	1.183
		3. Jasa	355	544	899
		4. Pertanian	185	278	463
		5. Peternakan	225	338	563

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data diatas, jumlah UMKM mayoritas terletak di wilayah Denpasar Barat. Hal ini bisa disebabkan oleh kawasan Denpasar Barat yang padat penduduk sehingga banyak masyarakat yang membuka UMKM. Hal ini selaras dengan UMKM kuliner yang mendominasi UMKM lainnya di wilayah Denpasar Barat. Sebanyak 3.758 UMKM Kuliner yang ada di Denpasar Barat. 1.503 laki-laki memiliki usaha ini sedangkan sisanya yaitu 2.255 perempuan memiliki usaha kuliner. Hal ini menunjukkan perempuan dapat menggunakan kemampuannya dengan baik untuk membuka usaha kuliner. Pasalnya perempuan sering dianggap hanya bisa melakukan kegiatan rumah tangga sedangkan memasak adalah bagian dari kegiatan rumah tangga. Dengan keahlian ini perempuan di wilayah Denpasar Barat dapat menunjukkan dan mempergunakan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Tabel 6.25. Upah Minimum Tenaga Kerja di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024

Upah Minimum Kota Denpasar (Rp)	
2023	2024
2.994.646	3.096.823

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, 2025

Upah Tenaga kerja merupakan biaya yang harus diterima para pekerja atas usaha atau pekerjaan yang telah dilakukannya.

Upah Minimum di Kota Denpasar tidak berdasarkan jenis kelamin. Para pengusaha atau lembaga pencari tenaga kerja laki-laki dan perempuan wajib memberikan upah tenaga kerja minimum Rp 2.994.646 untuk Tahun 2023 dan Rp 3.096.823 untuk Tahun 2024. Kenaikan upah berdampak pada peningkatan pendapatan rumah tangga, sehingga menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan rumah tangga.

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan sektor usaha yang meliputi industry dengan skala kecil dan menengah yang memiliki peran dan perekonomian nasional. Jika dibandingkan dengan industry menengah, IKM memiliki jumlah tenaga kerja dan asset yang lebih kecil. Biasanya IKM berbentuk pengolahan makanan, kerajinan, dan lain-lain. Berikut merupakan data mengenai Jumlah Pemilik Industri Kecil dan Menengah menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024.

Tabel 6.26. Jumlah Pemilik Industri Kecil dan Menengah Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024

Jenis Kelamin	Jumlah IKM
Laki-laki	13.142
Perempuan	19.714
Jumlah	32.856

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data tersebut, jumlah industri kecil dan menengah banyak dikelola oleh perempuan sebanyak 19.714 perempuan sedangkan laki-laki hanya 13.142 yang mengelola industri kecil dan menengah. Hal ini dapat disebabkan oleh peran ganda yang dimiliki perempuan. Industri kecil dan menengah dapat dilakukan dengan fleksibel sehingga pelakunya dapat menjalankan usaha di rumah atau lingkungan yang dekat dari rumah sehingga perempuan dapat menjalankan peran gandanya dengan baik.

BAB VII

SEKTOR PUBLIK

Sektor publik merupakan bagian dari perekonomian. Sektor publik memberikan layanan dan barang publik kepada masyarakat. Sektor publik biasanya dikelola oleh lembaga negara. Sektor publik bergerak dibiayai pajak dan pendapatan negara sehingga sektor publik tidak mengharapkan keuntungan melainkan fokus kepada layanan yang diberikan untuk masyarakat. Bidang yang diberikan pelayanan oleh sektor publik dapat berupa kemiliteran, kepolisian, transportasi umum, pendidikan, hingga kesehatan. Pada bab ini akan dibahas mengenai pengklasifikasian menurut jenis kelamin ke dalam eksekutif, legislative, dan yudikatif. Hal ini dikarenakan pada wilayah pemerintahan masih terjadi ketimpangan gender.

Ketimpangan gender tidak hanya terjadi pada kehidupan sehari-hari namun juga dapat terjadi di lingkungan pemerintahan. Meski pada era ini sudah banyak kontribusi perempuan dalam sektor publik namun masih terjadi ketimpangan gender seperti diskriminasi jabatan hingga pelecehan di tempat kerja. Hal ini menandakan arti ketimpangan gender yang lebih luas.

Ketimpangan gender terjadi tidak hanya banyaknya jumlah perempuan yang bekerja namun posisi dan perlakuan terhadap stuktur organisasi juga berpengaruh.

Perempuan dalam struktur organisasi sangatlah berperan. Perempuan dapat memberikan manfaat untuk kualitas pemerintahan dan pembangunan serta adil antar gender. Peningkatan kualitas dan akuntabilitas kinerja dari sektor publik dapat terbantu dengan peran perempuan. Perempuan sering dianggap lebih teliti dalam pengambilan keputusan dibandingkan laki-laki. Peran perempuan dalam sektor publik juga berkaitan dengan regulasi yang dihasilkan, regulasi yang ada sering kali tidak memperhatikan akan hak yang dimiliki perempuan. Dengan ini perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah untuk mengatasi ketimpangan gender yang terjadi di sektor publik atau di wilayah pemerintahan itu sendiri.

Pemerintah menetapkan regulasi mengenai anti diskriminasi dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. Selain itu, pemerintah meningkatkan jumlah perempuan di posisi kepemimpinan yang ada di sektor publik. Hal ini dilakukan karena kepemimpinan perempuan juga dapat mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan menurunkan pelanggaran hak asasi manusia. Selaras dengan kebijakan ini, pemerintah juga menetapkan target minimal keterwakilan perempuan dalam pemilu legislative dan jabatan publik sebesar

30% sehingga tercapai kesetaraan gender untuk mengambil keputusan yang adil.

7.1 Eksekutif

Lembaga eksekutif merupakan Lembaga yang memiliki kekuasaan dan tugas utama untuk melaksanakan undang-undang dan kebijakan yang ada. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden dan wakilnya, Menteri, militer, hingga aparatur sipil negara (ASN). Kinerja dari Lembaga eksekutif sangat mudah terlihat dikarenakan Lembaga ini mendapatkan banyak perhatian dari publik. Terjadinya perubahan ekonomi, sosial dan budaya, serta pendidikan ke arah yang lebih baik menandakan kinerja Lembaga eksekutif yang baik.

7.1.1 ASN Menurut Golongan Kepangkatan

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan warga Indonesia yang bekerja di instansi pemerintahan. ASN terbagi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). ASN berperan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan menjadi pelaksana kebijakan dalam pelayanan publik untuk masyarakat. Hal-hal yang berkaitan dengan ASN diatur dalam UU No 20 Tahun 2023 mengenai ASN. Berikut merupakan tabel mengenai Komposisi ASN Menurut Golongan

Pangkat dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024.

Tabel 7.1. Komposisi ASN Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024

Gol	ASN					
	Tahun 2023			Tahun 2024		
	L	P	L+P (Orang)	L	P	L+P (Orang)
I	23	27	50	19	24	43
II	487	275	762	289	200	489
III	930	1.760	2.690	1.049	1.744	2.793
IV	328	683	1.011	276	547	823
PPPK	0	0	0	0	0	0
IX	326	1.008	1.334	548	1.426	1.974
VII	0	0	0	53	233	286
X	0	0	0	35	116	161
XI	0	0	0	9	7	16
Jumlah	2.094	3.753	5.847	2.288	4.297	6.585

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data diatas, jumlah ASN mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Hal ini dikarenakan pandangan ASN oleh masyarakat merupakan pekerjaan yang memiliki gaji tetap dan ternama sehingga banyak masyarakat yang berlomba-lomba untuk menjadi ASN. ASN terbagi menjadi PNS dan PPPK. PNS terbagi menjadi golongan I-IV. Golongan PNS yang paling banyak berada di golongan III. Kenaikan jumlah

PNS golongan III sebesar 3,83% dan didominasi oleh perempuan. Meskipun didominasi oleh perempuan, terjadi penurunan jumlah perempuan golongan III yang menjadi PNS. PNS berjenis kelamin laki-laki naik sebesar 12,8% sedangkan PNS berjenis kelamin perempuan mengalami penurunan sebesar 0,91%. Selaras dengan PNS, PPPK juga mengalami kenaikan dalam jumlahnya. Jumlah PPPK meningkat sebesar 47,97% dari tahun 2023 hingga tahun 2024. Jumlah PPPK berjenis kelamin laki-laki mengalami kenaikan sebesar 68,1% sedangkan jumlah PPPK berjenis kelamin perempuan juga mengalami kenaikan sebesar 41,5%. Dengan meningkatnya jumlah ASN dari tahun 2023 hingga tahun 2024 menandakan upaya pemerintahan untuk menghindari ketimpangan gender dalam seberlanjutan sektor publik.

7.1.2 Pegawai Non ASN

Pegawai non ASN merupakan pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintahan namun bukan ASN. Pegawai non ASN dapat berupa pegawai honorer dan pegawai Tenaga Harian Lepas (THL). Pegawai honorer mendapatkan penghasilan dari APBN atau APBD sama seperti ASN, namun pegawai honorer belum menjadi pegawai tetap sehingga kebijakan yang diatur tidak sama seperti kebijakan ASN termasuk gaji yang didapatkan. Sedangkan pegawai THL merupakan pegawai yang digunakan harian atau dalam jangka pendek seperti petugas kebersihan,

tukang kebun, dan lainnya. Berikut disajikan tabel mengenai Komposisi Pegawai Non ASN Menurut Jenjang (Honorar dan THL) dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024.

Tabel 7.2. Komposisi Pegawai Non ASN Menurut Jenjang (Honorar dan THL) dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024

Tahun	Pegawai Non ASN		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2023	4.573	3.169	7.742
2024	4.244	2.396	6.640

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data diatas, jumlah pegawai non ASN mengalami penurunan sebesar 14,23%. Sedangkan pegawai non ASN laki-laki mengalami penurunan sebesar 7,19% dan pegawai non ASN perempuan mengalami penurunan sebesar 24,39%. Penurunan ini terjadi karena kebijakan nasional mengenai penataan tenaga non-ASN, pengangkatan pegawai non ASN ke pegawai ASN, hingga penciptaan system pegawai pemerintah yang lebih efisien.

7.1.3 Pegawai yang Mengikuti Diklat

ASN merupakan sumber daya manusia yang dimiliki oleh lembaga pemerintahan. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

(SDM) dilakukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh SDM dalam hal ini ASN sehingga dapat bekerja lebih optimal dan efisien. Salah satu program pemberdayaan SDM adalah Diklat. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan program pemberdayaan SDM untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh ASN. Kegiatan diklat bisa berupa pelatihan kepemimpinan, pelatihan teknis, atau workshop. Berikut merupakan data mengenai Jumlah Pejabat yang Sudah Mengikuti Diklat Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024.

Tabel 7.3. Jumlah Pejabat Yang Sudah Mengikuti Diklat Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024

No	Nama Diklat Pejabat	Tahun					
		2023			2024		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PIM. TK. I	0	0	0	0	0	0
2	PIM. TK. II	17	2	19	21	4	25
3	PIM. TK. III	62	46	108	53	41	94
4	PIM. TK. IV	122	174	296	114	157	271
Jumlah		201	222	423	188	202	390

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data tersebut, diklat yang dilakukan ialah Diklat PIM atau Diklat Kepemimpinan / pelatihan Kepemimpinan

Nasional. Bentuk diklat ini yaitu diselenggarakannya proses belajar-mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jabatan. Diklat ini terbagi menjadi 4 tingkat. Pembagian tingkatan tiap diklat ini sesuai dengan saran dan tujuan yang ingin dicapai dari diadakannya diklat ini. Namun, tujuan utama dari diklat pim tetaplah sama yaitu meningkatkan kualitas kepemimpinan di semua tingkatan pemerintahan sehingga tercapai pelayanan publik yang berkualitas.

Pada data yang telah disajikan, jumlah pegawai yang mengikuti diklat di tiap tingkatannya mengalami penurunan terkecuali di tingkat II. Pada PIM. TK. II mengalami peningkatan jumlah pejabat yang sudah mengikuti diklat sebesar 31,6%. Untuk PIM.TK.III mengalami penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar 12,96%. begitu pula dengan PIM. TK. IV mengalami penurunan sebesar 8,45%. Hal ini bisa disebabkan oleh prioritas anggaran yang berubah, hasil evaluasi efektivitas diklat yang kurang, hingga perubahan kebijakan yang ada.

Menurunnya jumlah pejabat yang pernah mengikuti diklat ternyata juga sebanding dengan proporsi ASN yang pernah mengikuti diklat mengalami penurunan. Berikut disajikan data mengenai Proporsi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang Pernah Mengikuti Diklat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023 dan 2024.

Tabel 7.4. Proporsi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang Pernah Mengikuti Diklat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023 dan 2024

Tahun	ASN		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2023	189	420	609
2024	186	418	604

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data tersebut, jumlah ASN yang mengikuti diklat mengalami penurunan yaitu 0,82%. Pada jenis kelamin laki-laki mengalami penurunan sebesar 1,59% dan perempuan mengalami penurunan sebesar 0,48%. Hal ini terjadi dengan alasan sama seperti penurunan jumlah pejabat dalam mengikuti diklat PIM. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa mengatur anggaran dan menentukan prioritas dalam penggunaan anggaran.

7.1.4 ASN Berdasarkan Unit Kerja

ASN berdasarkan unit kerja terbagi menjadi 4 yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Denpasar, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama. SKPD berfungsi sebagai penanggung jawab terhadap pemerintah Kota Denpasar dalam melaksanakan tugasnya. SKPD memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya seperti dinas kesehatan,

dinas pendidikan, dinas pertanian, dan dinas lainnya. Sedangkan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama merupakan jenjang pendidikan di Indonesia. Berikut disajikan tabel mengenai Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin dan Unit Kerja di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024.

Tabel 7.5. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin dan Unit Kerja di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024

No	Unit Kerja	2023			2024		
		L	P	Jmlh	L	P	Jmlh
1	SKPD Kota Denpasar	1.343	1.673	3.016	1.452	2.063	3.515
2	Taman Kanak-kanak	0	33	33	0	22	22
3	Sekolah Dasar	541	1.645	2.186	613	1.732	2.345
4	Sekolah Menengah Pertama	210	402	612	223	480	703
Jumlah		2.094	3.753	5.847	2.288	4.297	6.585

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data tersebut, jumlah ASN berdasarkan unit kerja mengalami kenaikan dari tahun 2023 hingga tahun 2024. Khususnya ASN berjenis kelamin perempuan, pada unit kerja Taman Kanak-kanak mengalami penurunan sebesar 33%.

Namun pada unit kerja ini tidak adanya ASN berjenis kelamin laki-laki. Hal ini merupakan salah satu ketimpangan gender yang terjadi karena unit kerja taman kanak-kanak yang berisi anak berusia 4-6 tahun dan ini selaras dengan peran ganda perempuan di rumah tangganya dalam mengurus anak.

Sedangkan ASN berjenis kelamin perempuan mengalami kenaikan pada unit kerja yang lain. Pada unit kerja SKPD, ASN perempuan mengalami kenaikan sebesar 23,31%, unit kerja Sekolah Dasar mengalami kenaikan sebesar 5,29%, dan unit kerja Sekolah Menengah Pertama mengalami kenaikan sebesar 19,40%. Hal ini menunjukkan peran aktif perempuan dalam unit kerja pemerintahan.

7.1.5 ASN Menurut Eselon

ASN memiliki eselon atau tingkatan jabatan structural dalam pemerintahan. Eselon menunjukkan level tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki oleh ASN. Eselon terbagi menjadi tujuh yaitu eselon II.a, II.b, III.a, III.b, IV.a, IV.b, Non Eselon. Berikut merupakan data mengenai Jumlah Pejabat Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024.

Tabel 7.6. Jumlah Pejabat Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024

No	Eselon	Tahun					
		2023			2024		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	II.a	1	0	1	1	0	1
2	II.b	30	8	38	29	8	37
3	III.a	29	25	54	27	22	49
4	III.b	64	55	119	57	51	108
5	IV.a	74	66	140	71	64	135
6	IV.b	44	55	99	40	56	96
7	Non Eselon	1852	3544	5396	2063	4096	6159
Jumlah		2094	3753	5847	2288	4297	6585

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data tersebut, eselon berdasarkan tingkatannya mengalami penurunan berbeda dengan non eselon yang mengalami kenaikan. Non eselon mengalami kenaikan sebesar 14,13% dengan rincian pejabat non eselon berjenis kelamin laki-laki mengalami peningkatan sebesar 11,39% dan yang berjenis kelamin perempuan meningkat sebesar 15,57%. Non eselon ini merupakan jabatan yang tidak memiliki tingkatan structural seperti guru, dosen, peneliti, dan dokter. Dengan ini jumlah perempuan yang menjadi guru, dosen, peneliti, dan dokter lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki, hal ini sudah menjadi bukti nyata bahwa perempuan dapat berperan aktif dalam pekerjaannya.

Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kota Denpasar terbesar di pangkat PPPK tidak memiliki

pangkat. Pada tahun 2023 sebanyak 1008 perempuan atau sebesar 26,86% sedangkan pada tahun 2024 meningkat 14,61% menjadi 1782 atau sebesar 41,47%. PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tidak memiliki pangkat dan golongan. PPPK diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB No 72 Tahun 2020. Jenis PPPK biasanya bekerja sebagai guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Sedangkan partisipasi perempuan paling kecil di lembaga pemerintahan yaitu berpangkat pembina utama dan mengalami penurunan dari tahun 2023 hingga 2024. Pada tahun 2023 terdapat 3 perempuan yang berpangkat pembina utama sedangkan pada tahun 2024 terdapat 2 perempuan yang menjadi pembina utama. Pangkat ini merupakan pangkat tertinggi sebagai PNS di Indonesia. Sedikitnya partisipasi perempuan dalam pangkat ini menunjukkan terjadinya ketimpangan gender dikarenakan pola karier, budaya organisasi, dan hambatan struktural yang membuat perempuan sulit naik ke posisi puncak. Penjelasan ini berdasarkan tabel 7.7 yang disajikan dibawah ini.

Tabel 7.7. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024

No	Pangkat	Tahun			
		2023		2024	
		Perempuan	(%)	Perempuan	(%)
1	Juru Tk.I	14	0,37%	13	0,30%
2	Juru.	13	0,35%	11	0,26%
3	Pembina	209	5,57%	162	3,77%
4	Pembina Tk.I	293	7,81%	219	5,10%
5	Pembina Utama	3	0,08%	2	0,05%
6	Pembina Utama Madya	16	0,43%	9	0,21%
7	Pembina Utama Muda	162	4,32%	155	3,61%
8	Penata	355	9,46%	350	8,15%
9	Penata Muda	388	10,34%	210	4,89%
10	Penata Muda Tk.I	404	10,76%	574	13,36%
11	Penata Tk.I	613	16,33%	610	14,20%
12	Pengatur	66	1,76%	44	1,02%
13	Pengatur Muda	16	0,43%	15	0,35%
14	Pengatur Muda Tk.I	19	0,51%	16	0,37%
15	Pengatur Tk.I	174	4,64%	125	2,91%
16	(PPPK tidak memiliki pangkat)	1008	26,86%	1782	41,47%
Jumlah		3753	100%	4297	100%

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2025

7.2 Legislatif

Lembaga legislatif merupakan Lembaga yang memiliki tugas membuat undang-undang dan mengawasi kinerja dari Lembaga eksekutif. Lembaga legislative berupa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD),

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilihan anggota dewan DPR, DPD, DPRD dilakukan setiap 5 tahun sekali melalui pemilu. Pemilihan anggota DPR dengan system pemilih langsung memilih calon dan tersedia 580 kursi. Pemilihan anggota DPD dengan setiap provinsi memiliki 4 anggota DPD. Pemilihan anggota DPRD melalui pemilih memilih langsung calon.

7.2.1 Keanggotaan DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. Berikut disajikan tabel mengenai Proporsi Keanggotaan DPRD Menurut Partai Periode 2024-2029 dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar.

Tabel 7.8. Proporsi Keanggotaan DPRD Menurut Partai Periode 2024-2029 dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar

No	Partai	2024-2029		
		L	P	Jumlah
1	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	8	1	9
2	Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan	19	3	22
3	Partai Golongan Karya (Golkar)	7	-	7
4	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	1	-	1
5	Partai Gelora	1	-	1
6	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	3	-	3
7	Partai Demokrat	2	-	2
Jumlah		41	4	45

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data diatas, anggota DPRD didominasi oleh anggota berjenis kelamin laki-laki, hanya Partai Gerindra dan Partai PDI Perjuangan yang memiliki anggota DPRD berjenis kelamin perempuan. Hal ini menunjukkan masih adanya budaya patriarki dan stereotip gender oleh pandangan masyarakat dikarenakan anggota DPRD dipilih langsung oleh masyarakat selama 5 tahun sekali dalam pemilu. Masih banyak pandangan mengenai dunia politik adalah dunia laki-laki. Meskipun pemerintah memberikan kuota minimal 30% merupakan perwakilan perempuan dari masing-masing partai, kebijakan ini berlaku saat pencalonan calon anggota dan tidak ada jaminan

bahwa sudah pasti terpilih karena tetap pemilihan anggota DPRD berada di tangan rakyat.

7.2.2 Partai Politik

Partai politik ialah organisasi yang dibentuk secara sukarela untuk mencapai tujuan yang dimiliki oleh partai tersebut. Dibentuknya partai politik memiliki dasar memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota dan masyarakat serta memelihara keutuhan negara. Berikut merupakan tabel mengenai Jumlah Pimpinan Partai Politik (Parpol) Menurut Nama Partai dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024.

Tabel 7.9. Jumlah Pengurus Partai Politik (Parpol) Menurut Nama Partai dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024

No	Partai	2024		
		L	P	Jumlah
1	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	19	8	27
2	Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan	11	8	19
3	Partai Golongan Karya (Golkar)	36	19	55
4	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	24	12	36
5	Partai Gelora	2	1	3
6	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	3	3	6
7	Partai Demokrat	60	30	90
Jumlah		155	81	236

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2025

Berdasarkan data diatas, jumlah pengurus parpol masih didominasi oleh laki-laki. Laki-laki dianggap mampu mengurus sebuah partai dikarenakan citra anggota yang didalam partai politik akan diikuti oleh citra partai. Hal ini juga dapat disebabkan oleh keterlibatan politik praktis. Politik praktis adalah tindakan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan serta memengaruhi kebijakan publik. Dengan ini politik praktis membutuhkan waktu dan komitmen yang besar dan mungkin akan sulit dipenuhi oleh perempuan karna beban ganda yang dimiliki.

7.2.3 Panitia Pemilihan Kecamatan

Dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan serentak itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dibantu oleh struktur kelembagaan di bawahnya yang bersifat hierarkis, yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kemudian untuk mendukung tugas KPU pada tingkatan lebih kecil yaitu kecamatan, kelurahan/desa, sampai dengan tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPU Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk membentuk Badan *Adhoc* yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang

masingmasing memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan. Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). PPK Mempunyai tugas melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan KPU Kabupaten/Kota dan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut merupakan data mengenai Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024.

Tabel 7.10. Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah PPK (orang)		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Denpasar Barat	4	1	5
2	Denpasar Utara	5	0	5
3	Denpasar Timur	4	1	5
4	Denpasar Selatan	5	0	5
Jumlah		18	2	20

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data tersebut, jumlah panitia pemilihan kecamatan didominasi oleh laki-laki sebanyak 18 orang dari 20 orang. Panitia berjenis kelamin perempuan hanya ada di wilayah Denpasar Barat dan Denpasar Timur dengan masing-masing memiliki 1 orang panitia perempuan. Peran perempuan sebagai panitia pemilihan kecamatan masih lah rendah, walaupun pada proses pembentukan/perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan serentak tahun 2024 dilakukan secara terbuka, transparan, dan bertanggungjawab baik dari proses sosialisasi pendaftaran di empat kecamatan dan 43 Desa/Kelurahan di Kota Denpasar. Hal ini dapat disebabkan minat untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) masih kurang dan masa pendaftaran yang terlalu singkat.

7.2.4 Panitia Pemungutan Suara

Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain. PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain. PPS berkedudukan di kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain. Berikut merupakan data mengenai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 – 2024.

Tabel 7.11. Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 – 2024

No	Kecamatan	Jumlah PPS (orang)		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Denpasar Barat	28	5	33
2	Denpasar Utara	25	5	30
3	Denpasar Timur	25	8	33
4	Denpasar Selatan	27	6	33
Jumlah		105	24	129

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kota Denpasar pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 masih didominasi oleh laki-laki. Anggota PPS berjenis kelamin laki-laki berjumlah 105 dari 129 anggota PPS. Sedangkan sisanya yaitu 24 orang merupakan anggota PPS berjenis kelamin laki-laki. Kembali terjadi ketimpangan gender sebagai anggota PPS. Adapun hambatan dalam upaya mengoptimalkan peran perempuan untuk menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara dikarenakan minat untuk menjadi anggota PPS kurang menarik, sehingga terjadinya disparitas gender karena sedikitnya perempuan yang berpartisipasi untuk menjadi anggota PPS.

7.2.5 Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah Lembaga negara yang memiliki tugas mengawasi proses tahapan pemilu serta menerima dan menyelesaikan laporan pelanggaran pemilu. Anggota bawaslu dipilih melalui proses seleksi oleh tim seleksi. Calon anggota bawaslu resmi menjadi anggota bawaslu setelah memenuhi hasil uji kelayakan yang dilakukan dalam proses seleksi. Berikut merupakan data mengenai Jumlah Anggota Bawaslu, Pileg, Pilpres, dan Pilkada Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024.

Tabel 7.12. Jumlah Anggota Bawaslu, Pileg, Pilpres dan Pilkada Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024

No	Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Denpasar	3	2	5
Jumlah		3	2	5

Sumber : Bawaslu Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data diatas, anggota bawaslu berjumlah5. Hal ini dikarenakan anggota bawaslu kabupaten/kota terdiri dari 3-5 orang. Anggota Bawaslu berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan yang berjenis kelamin perempuan.

Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan memiliki tingkat tugas, dan tanggung jawab yang berbeda. Bawaslu bersifat tetap dan bertugas menyusun kebijakan pengawasn pemilu. Sedangkan Pengawas Tingkat Kecamatan (Panwascam) bersifat sementara dan bertugas untuk mengawasi tahapan pemilu di Tingkat Kecamatan sedangkan Pengawas Desa Kelurahan (PKD) terdapat di desa dan ditetapkan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan/ Panwascam). Berikut merupakan data mengenai Jumlah Anggota Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan (Panwascam) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024.

Tabel 7.13. Jumlah Anggota Bawaslu dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024

No	Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Denpasar Utara PKD	3	0	3
2	Denpasar Timur PKD	3	0	3
3	Denpasar Selatan PKD	1	2	3
4	Denpasar Barat PKD	1	2	3
Jumlah		8	4	12

Sumber : Bawaslu Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data diatas, jumlah anggota Panwascam didominasi oleh laki-laki terutama di wilayah Denpasar Utara dan Denpasar Timur. Wilayah Denpasar Selatan dan Denpasar Barat masing-masing memiliki 2 anggota Panwascam berjenis kelamin perempuan. Hal ini dapat disebabkan oleh minat masyarakat dimasing-masing wilayah dalam ikut berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu berbeda beda. Penyelenggara pemilu memiliki kesibukan yang cukup tinggi khususnya menjelang dan selama tahapan pemilu hingga berakhirnya tahapan pemilu.

7.3 Yudikatif

Yudikatif merupakan lembaga atau badan negara yang memiliki tugas untuk mengawal dan memantau pelaksanaan

perundang-undangan di Indonesia. Sehingga peran yang dimiliki oleh lembaga ini ialah mengadili perkara, menegakkan hukum, dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Lembaga yudikatif termasuk ke dalam trias politika atau tiga pilar kekuasaan negara bersamaan dengan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Lembaga ini terdiri dari Mahkamah Agung (MA), pengadilan tinggi, pengadilan negeri, dan pengadilan khusus. Dengan adanya lembaga yudikatif diharapkan dapat menjaga supremasi hukum, keadilan, dan keseimbangan kekuasaan dalam negara. Berikut merupakan data mengenai Jumlah Penegak Hukum menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024.

Tabel 7.14. Jumlah Penegak Hukum Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024

No	Profesi	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki-Laki	(%)	Perempuan	(%)	
1	Hakim	10	45,45%	12	54,55%	22
2	Jaksa	12	36,36%	21	63,64%	33
3	Polisi	2.306	89,55%	269	10,45%	2.575
4	Advokat	761	73,67%	272	26,33%	1.033
5	Notaris	113	49,35%	116	50,65%	229
Jumlah		3.202		690		3.892

Sumber : Kantor Kehakiman, Kejaksaan, Polresta, Peradi Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data tersebut, penegak hukum terdiri lima profesi yaitu hakim, jaksa, polisi, advokat, dan notaris. Tabel 7.13

menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan dari jumlah penegak hukum berjenis kelamin laki-laki dan penegak hukum berjenis kelamin perempuan. Penegak hukum dari lima profesi yang tercantum masih didominasi dengan penegak hukum berjenis kelamin laki-laki. Jumlah penegak hukum berjenis kelamin laki-laki sebanyak 3202 orang dari total jumlah 3982 orang atau dapat dikatakan jumlah penegak hukum berjenis kelamin laki-laki sebanyak 82,27% dari jumlah penegak hukum. Sedangkan jumlah penegak hukum berjenis kelamin perempuan hanya 17,73%. Hal ini tentu mengakibatkan kesenjangan gender sebagai penegak hukum. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan partisipasi perempuan khususnya sebagai penegak hukum.

BAB VIII

LAIN-LAIN

8.1 Kekerasan

Sejak lahirnya manusia di bumi, manusia membawa hak-hak yang melekat dalam hidupnya. Dengan ini manusia dengan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dapat dipisahkan. Hak Asasi Manusia (HAM) menurut UU No. 39 Tahun 1999 merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta merupakan anugerah Tuhan yang wajib dan dihormati oleh negara, hukum, pemerintah dan semua orang demi perlindungan kehormatan dan martabat manusia. Dengan kata lain HAM merupakan kesetaraan antar manusia agar seseorang mendapatkan hak yang sama dan layak. HAM menciptakan perasaan saling menghargai antar sesama manusia. Atas dasar HAM, seseorang dapat melakukan tindakan yang dilandasi dengan kesadaran dan tanggung jawab bahwa hak orang lain juga tidak dapat dilanggar. Menurut Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM), kejahatan yang termasuk dalam pelanggaran HAM berat

yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap manusia. Kejahatan genosida merupakan tindakan pembantaian besar-besaran terhadap seluruh atau sebagian dari kelompok bangsa, ras, agama, atau etnis tertentu. Kejahatan terhadap manusia merupakan tindakan yang ditujukan secara langsung kepada manusia. Kejahatan terhadap manusia dapat berupa pembunuhan, perbudakan dan perdagangan manusia, hingga kekerasan.

Kekerasan dapat terjadi dimana saja, oleh siapa saja, dan kapan saja. Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan struktural, kekerasan ekonomi, kekerasan spiritual, kekerasan seksual, dan kekerasan cyber. Berikut merupakan data mengenai Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024.

Tabel 8.1. Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024

Korban Kekerasan	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
2023	221	123	344
2024	251	75	326

Sumber : UPTD PPA Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data tersebut, jumlah kekerasan menurun sebesar 3% yang disebabkan oleh jumlah laki-laki menurun dari tahun 2023 hingga 2024. Namun pada jumlah perempuan mengalami kenaikan. Jumlah kekerasan pada perempuan naik sebesar 15.56%. Hal ini dapat disebabkan oleh ketergantungan ekonomi yang dialami perempuan sehingga dapat bertahan akan terjadinya kekerasan. Selain itu, hal ini dapat disebabkan oleh budaya patriarki yang masih ada di lingkungan masyarakat (Hasanah, 2013). Budaya patriarki merupakan sistem yang berada di lingkungan masyarakat bahwasanya laki-laki merupakan pemegang kekuasaan dan mendominasi dalam peran yang ada di masyarakat. Pernyataan ini selaras dengan persentase korban kekerasan menurut jenis kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024. Berikut disajikan data mengenai Persentase Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024.

Tabel 8.2. Persentase Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024

Tahun	Laki-laki	Perempuan
2023	2,3%	39%
2024	0%	48%

Sumber : UPTD PPA Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data diatas, persentase korban kekerasan pada laki-laki mengalami penurunan. Pada tahun 2023 sebanyak 2,3% namun pada tahun 2024 tidak ada korban kekerasan kepada lelaki. Hal ini berbanding terbalik dengan persentase kekerasan kepada perempuan yang meningkat 9%. Pada tahun 2023 yang mulanya 39% meningkat menjadi 48% pada tahun 2024. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.3. Bentuk-bentuk Kekerasan di Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023 dan 2024

Bentuk Kekerasan	2023					2024				
	L	AL	P	AP	L+P	L	AL	P	AP	L+P
Fisik	0	5	23	4	32	0	1	24	4	29
Fisik Lainnya	0	4	5	3	12	0	9	10	3	22
Psikis	0	9	36	4	49	0	6	46	12	64
Psikis Lainnya	0	15	6	4	25	0	6	17	10	33
Seksual	0	1	3	4	8	0	0	6	5	11
Seksual Lainnya	0	13	2	15	30	0	2	5	20	27
Penelantaran	0	11	16	13	40	0	6	3	6	15
TTPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABH	0	0	0	0	0	0	13	0	3	16

Perkawinan	0	1	1	0	2	0	1	0	2	3
Anak										
Perebutan	0	19	0	13	32	0	8	0	10	18
Kuasa Asuh										
Anak										
Kasus	8	37	44	25	114	0	23	45	20	88
Lainnya										
Total	8	115	136	85	344	0	75	156	95	326

Sumber : UPTD PPA Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan Tabel 8.3 mengenai bentuk-bentuk kekerasan di Kota Denpasar menurut jenis kelamin tahun 2023 dan 2024, bentuk kekerasan yang biasa terjadi sebanyak 11 bentuk kekerasan. Pada perempuan yang paling banyak terjadi di bentuk kekerasan psikis yang meningkat sebesar 15,56% yakni pada tahun 2023 sebanyak 36 orang mengalami kekerasan psikis dan pada tahun 2024 sebanyak 46 orang mengalami kekerasan psikis. Kekerasan psikis akan menyerang emosional dari korban tanpa melibatkan kontak fisik seperti ucapan atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku sehingga korban merasakan rasa takut dan tidak berdaya. Sedangkan kasus yang sering terjadi pada anak perempuan yaitu kekerasan berbentuk seksual lainnya. Hal ini meningkat sebesar 10,47% yaitu pada tahun 2023 sebanyak 15 orang anak mengalami kekerasan ini dan meningkat pada tahun 2024 sebanyak 20 orang. Kekerasan seksual lainnya

dapat berupa menyentuh bagian tubuh yang sensitive, eksploitasi seksual secara online, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan kepada anak perempuan dapat disebabkan oleh faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor nilai, dan faktor individu (Setiani et. al, 2017).

Kekerasan bisa terjadi dimana saja tak terkecuali di dalam rumah tangga. Sepasang suami istri dapat menghadirkan konflik yang mengakibatkan kesalah pahaman antar suami istri hingga antar anggota keluarga. Dengan kesalah pahaman yang tak berujung dapat menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Perilaku kekerasan atau suatu tindak kekerasan merupakan ungkapan perasaan dengan melakukan tindakan yang keliar karena hilangnya kntrol diri akibat adanya stressor yang menjadi permasalahan secara fisik maupun psikologi yang mengakibatkan bahaya terhadap diri sendiri, individu lain maupun lingkungan (Alimi et. al, 2021). Jumlah KDRT yang terjadi di Kota Denpasar cukup banyak terjadi yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.4. Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024 **SEKTOR PUB**

Jenis KDRT	2023	2024
KDRT (Fisik)	44	51
KDRT (Psikis)	74	97
KDRT (Seksual)	38	38
KDRT (Penelantaran)	40	15
Jumlah	196	201

Sumber : UPTD PPA Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data tersebut, jumlah KDRT yang terjadi di Kota Denpasar mengalami peningkatan sebesar 3%. Pada KDRT berbentuk fisik mengalami kenaikan sebesar 16% yaitu pada tahun 2023 terdapat 44 kasus KDRT fisik dan meningkat menjadi 51 kasus pada tahun 2024. Pada KDRT berbentuk psikis juga mengalami kenaikan sebesar 31% yaitu pada tahun 2023 sebanyak 74 kasus terjadi dan meningkat menjadi 97 kasus pada tahun 2024. Pada KDRT seksual tidak terjadi peningkatan maupun penurunan pada tahun 2023 hingga tahun 2024. Pada KDRT penelantaran terjadi penurunan sebesar 63% yaitu yang awalnya sebanyak 40 kasus menurun menjadi 15 kasus. KDRT ini dapat disebabkan atas dorongan internal dan eksternal. Dorongan internal yang terjadi dapat berupa adanya stressor

yang dihadapi dengan perilaku agresif akibat kurangnya kemampuan *coping stress* sedangkan dorongan eksternal dapat terjadi karena adanya budaya patriarki yang diyakini masyarakat (Alimi et. al, 2021). Oleh karena itu, perlu adanya kesiapan yang matang antara laki-laki dan perempuan sebelum melanjutkan ke dalam rumah tangga. Berikut disajikan tabel mengenai Jumlah Perempuan Pernah Nikah Usia 15-49 Tahun Berstatus Nikah Menurut Alat/Cara KB yang Digunakan.

Tabel 8.5. Jumlah Perempuan Pernah Nikah Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Nikah Menurut Alat/Cara KB yang Digunakan

Alat/Cara KB yang Digunakan	2024
MOW/Tubektomi dan MOP/Vasektomi	3.350
AKDR/IUD/Spiral	12.011
Suntikan KB	8.404
MOP	71
Pil KB	2.257
Kondom/Karet KB	2.388
IMPLAN	771
MAL	73
Total	29.325

Sumber : Dinas DP3AP2KB Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data tersebut, alat/cara KB yang paling banyak digunakan oleh perempuan yang berstatus menikah usia 15-49 tahun adalah AKDR/IUD/Spiral. AKDR/IUD/Spiral merupakan metode kontrasepsi jangka Panjang yang dipasang didalam Rahim untuk mencegah kehamilan. Terdapat 12.011 perempuan yang menggunakan metode ini untuk mencegah kehamilannya. Menurut PP No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, penyediaan alat kontrasepsi bagi anak perempuan dan remaja terutama korban kekerasan seksual dan anak yang mendapatkan dispensasi kawin (belum berumur 19 tahun) sangat penting mencegah kehamilan tidak diinginkan yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Menurut Amanda et. al (2024), korban kekerasan seksual dapat diberikan penanganan berupa penerimaan aduan kasus, penjangkaun korban, pengolahan kasus, mediasi, pendampingan medis, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, dan pemulihan psikis dan trauma. Penggunaan alat/cara KB merupakan salah satu bentuk pendampingan medis terhadap korban kekerasan seksual. Selaras dengan strategi yang digunakan, berikut merupakan tabel mengenai Jumlah Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penangan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Tahun 2023 dan 2024.

Tabel 8.6. Jumlah Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Tahun 2023 dan 2024

Korban Kekerasan	Tahun	
	2023	2024
Perempuan	135	156
Anak Perempuan	86	95
Anak Laki-laki	115	75
Jumlah	344	326

Sumber UPTD PPA Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data tersebut, korban kekerasan yang mendapatkan penanganan meningkat pada korban kekerasan perempuan dan anak perempuan dikarenakan jumlah korban kekerasan pada perempuan dan anak perempuan meningkat seperti yang sudah dijelaskan pada Tabel 8.6. Dengan adanya penanganan yang dilakukan oleh petugas terlatih diharapkan korban kekerasan merasa terlindungi atas kekerasan yang dialami. Terlebih lagi terhadap anak-anak yang berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan sehingga korban mendapatkan pendampingan khusus untuk melewati trauma yang dialaminya. Berikut merupakan tabel mengenai Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani oleh DINAS P3A Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024.

Tabel 8.7. Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani oleh Dinas P3A Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024

Tahun	Anak Laki-laki	Anak Perempuan
2023	33%	25%
2024	23%	29%

Sumber: UPTD PPA Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data tersebut, jumlah kekerasan pada anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan anak perempuan pada tahun 2023. Namun jumlah kekerasan anak laki-laki mengalami penurunan sebesar 10% menjadi 23%. Sedangkan anak perempuan mengalami kenaikan sebesar 4% menjadi 29%. Dengan adanya pendampingan oleh dinas P3A, anak korban kekerasan dapat merasakan aman, terlindungi, pendampingan, dan arahan lebih lanjut untuk hidupnya.

Menurut UU No. 21 tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan manusia tidak hanya sekedar menjual orang, tetapi mencakup berbagai tindakan yang memaksakan dan mengeksploitasi seseorang dengan cara-cara yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Berikut disajikan tabel mengenai Jumlah Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO) menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024.

Tabel 8.8. Jumlah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024

Tahun	Anak Perempuan	Anak Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0

Sumber : UPTD PPA Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data tersebut, jumlah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak terjadi pada tahun 2023 dan 2024 pada jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Hal ini harus bisa dipertahankan khususnya Kota Denpasar untuk menghargai HAM setiap manusia.

8.2 Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)

Gelandangan merupakan seseorang yang tidak memiliki tempat tinggal dan tidak memiliki pekerjaan tetap dan berdiam di tempat umum sehingga tidak sesuai dengan norma kehidupan di

dalam masyarakat. Pengemis merupakan seseorang yang mendapatkan penghasilan dengan cara berharap mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) sering kali meresahkan masyarakat lainnya karena Gepeng menggunakan fasilitas umum tidak semestinya seperti tinggal tetap di taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, dan sebagainya.

Faktor penyebab dari adanya gepeng dapat disebabkan oleh masalah kemiskinan, pendidikan, keterampilan kerja, hingga masalah sosial budaya. Dengan adanya Gepeng tentu akan berdampak pada masalah lingkungan khususnya tata ruang daerah, masalah kependudukan, masalah keamanan dan ketertiban, masalah kriminalitas. Untuk itu perlu adanya bantuan pemerintah dalam menangani kasus gepeng yang ada di Kota Denpasar. Berikut merupakan data mengenai Jumlah Gepeng Menurut Jenis Kelamin yang Terjaring dan Telah Dibina Dipulangkan ke Daerah Asal Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024.

Tabel 8.9. Jumlah Gepeng Menurut Jenis Kelamin yang Terjaring dan Telah Dibina Dipulangkan ke Daerah Asal Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

Kelompok Umur	2024		
	L	P	Jmlh
0-4 Tahun	3	9	12
5-9 Tahun	2	2	4
10-14 Tahun	4	4	8
15-18 Tahun	19	7	26
19 Tahun Keatas	182	48	230
Jumlah	210	70	280

Sumber : Dinas Sosial Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data tersebut, Gepeng yang sudah dipulangkan dominan berusia 19 tahun keatas dengan mayoritas berjenis kelamin laki-laki. Jumlah gepeng berusia 19 tahun keatas sebanyak 230 orang dengan laki-laki berjumlah 210 orang dan perempuan sejumlah 70 orang. Dominannya jumlah laki-laki sebagai gepeng di Kota Denpasar dapat disebabkan oleh peran dan stigma masyarakat terhadap laki-laki sebagai pencari nafkah utama, dengan ini laki-laki akan mencari segala cara untuk memenuhi hal tersebut tak terkecuali menjadi gepeng. Dengan ini Dinas Sosial Kota Denpasar bekerja sama dengan pihak pemerintah dan swasta untuk penertiban gepeng hingga

pemulangan gepeng yang telah dibina dan dipulangkan ke daerah asalnya.

8.3 Lansia (Lanjut Usia) Terlantar PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)

Menurut BPS (2025), jumlah penduduk lansia pada tahun 2024 sebanyak 670,4 ribu jiwa dari total penduduk di Bali sebesar 4.461,3 ribu jiwa. Sebanyak 15% merupakan penduduk lansia yang ada di Bali. Menurut WHO, jumlah lansia >7% menandakan daerah tersebut memasuki *ageing population* yaitu wilayah tersebut mengalami perubahan demografis karena jumlah lansia meningkat dibandingkan penduduk usia muda. Hal ini menunjukkan tingginya harapan hidup di Bali namun dapat menimbulkan tantangan sosial dan ekonomi. Menurut Putri et. al (2022), untuk menghadapi tingginya jumlah lansia pemerintah harus memberikan upaya peningkatan pemberdayaan penduduk lansia dan meningkatkan peluang lansia untuk tetap produktif. Berikut disajikan tabel mengenai Jumlah Lansia Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024.

Tabel 8.10. Jumlah Lansia terlantar Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024

NO	Kecamatan	Usia 60 Tahun		Total
		L	P	
1	Denpasar Utara	49	88	137
2	Denpasar Timur	29	53	82
3	Denpasar Selatan	20	24	44
4	Denpasar Barat	3	12	15
Jumlah		101	177	278

Sumber: Dinas Sosial Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data tersebut, jumlah lansia terbanyak berada di wilayah Denpasar Utara sebanyak 137 orang dibandingkan wilayah lainnya. Oleh karena itu pemerintah di sekitar Denpasar Utara perlu adanya peningkatan pemberdayaan lansia agar tetap produktif tak terkecuali hal ini dapat dilakukan oleh wilayah lainnya yang berada di Kota Denpasar.

8.4 Lembaga Adat Perempuan

Perempuan Bali memiliki peran penting dalam kehidupan adat, baik dalam lingkup keluarga, desa, maupun dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Mereka terlibat dalam berbagai upacara adat, pengelolaan kegiatan sosial, serta pelestarian budaya.

Di Bali, terdapat beberapa lembaga adat perempuan, salah satunya adalah Pasikian Paiketan Krama Istri Desa Adat di Bali (PAKIS Bali), yang merupakan bagian dari Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali. PAKIS Bali berfungsi untuk mendukung tugas-tugas MDA, khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan perempuan dan kehidupan adat di desa.

Krama istri merupakan sebutan untuk perkumpulan perempuan di desa adat. Mereka memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlangsungan desa adat, termasuk dalam kegiatan upacara adat, gotong royong, dan pelestarian budaya.

PAKIS Bali dan peran Krama Istri, memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan adat dan budaya Bali, serta memberikan wadah bagi perempuan untuk berkontribusi dalam kehidupan masyarakat adat.

**Tabel 8.11 Lembaga Adat Perempuan di Kota Denpasar
Tahun 2024**

No	Nama Lembaga Adat	Jumlah Anggota (orang)
1	Paiketan Krama Istri Desa Adat Peninjoan	19
2	Paiketan Krama Istri Desa Adat Penatih Puri	13
3	Paiketan Krama Istri Desa Adat Jenah	3
4	Paiketan Krama Istri Desa Adat Panjer	27
5	Paiketan Krama Istri Desa Adat Denpasar	18
6	Paiketan Krama Istri Desa Adat Penyaringan	4
7	Paiketan Krama Istri Desa Adat Kedua	27
8	Paiketan Krama Istri Desa Adat Cengkilung	3
9	Paiketan Krama Istri Desa Adat Kepaon	13
10	Paiketan Krama Istri Desa Adat Padangsembian	16
11	Paiketan Krama Istri Desa Adat Ubung	16
12	Paiketan Krama Istri Desa Adat Lap-lap	27
13	Paiketan Krama Istri Desa Adat Sumerta	14
14	Paiketan Krama Istri Desa Adat Tanjung Bungkak	21
15	Paiketan Krama Istri Desa Adat Pedungan	32
16	Paiketan Krama Istri Desa Adat Sanur	12
17	Paiketan Krama Istri Desa Adat Poh Gading	13
18	Paiketan Krama Istri Desa Adat Taman Poh Manis	27
19	Paiketan Krama Istri Desa Adat Bekul	27
20	Paiketan Krama Istri Desa Adat Peraupan	11
21	Paiketan Krama Istri Desa Adat Intaran	6
22	Paiketan Krama Istri Desa Adat Tambawu	15
23	Paiketan Krama Istri Desa Adat Anggabaya	12
	Jumlah	376

Sumber: Majelis Desa Adat Provinsi Bali, 2025

Jumlah lembaga adat perempuan di Kota Denpasar pada tahun 2024 adalah 23 Paiketan dengan jumlah anggota 376 orang. Semakin banyak lembaga adat yang dibentuk oleh atau untuk perempuan (seperti Paiketan Krama Istri) menunjukkan adanya pengakuan resmi bahwa perempuan adat memiliki peran unik dan esensial dalam pemeliharaan nilai, pelestarian budaya, dan kesejahteraan komunitas. Dengan bertambahnya lembaga perempuan, struktur pemerintahan adat menjadi lebih inklusif dan responsif gender. Ini mendukung pelaksanaan prinsip *Vasudhaiva Kutumbakam* (semesta, bersaudara) yang saat ini semakin diintegrasikan, termasuk di forum pasangkepan yang mengatur kebijakan adat desa.

BAB IX

PENUTUP

9.1 Simpulan

Beberapa simpulan dari Profil Statistik Gender Kota Denpasar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. TPAK Kota Denpasar mengalami penurunan dari tahun 2022-2024 baik laki-laki dan perempuan. TPAK perempuan lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki. Kondisi ini menunjukkan terdapat kesenjangan gender dalam partisipasi ekonomi, yang menunjukkan bahwa perempuan belum sepenuhnya mendapatkan atau memanfaatkan kesempatan untuk bekerja seperti laki-laki.
2. Pada tahun 2024 IDG Kota Denpasar menurun menjadi 67,4% dan berada dibawah IDG nasional dan Provinsi Bali. Ini menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan perempuan di bidang strategis (politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan) di Kota Denpasar masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Bali maupun Indonesia secara nasional.
3. IPG kota Denpasar dari tahun 2020-2024 memiliki nilai lebih tinggi diatas IPG nasional dan Provinsi Bali. IPG Kota Denpasar yang lebih tinggi menunjukkan bahwa

perempuan di Denpasar menikmati hasil pembangunan secara lebih setara dengan laki-laki, serta berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan perempuan di rata-rata nasional dan provinsi Bali.

4. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Denpasar pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,200, yang berarti terdapat ketimpangan gender sebesar 20% dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Bali yang berada di angka 0,183. Kondisi ini menunjukkan bahwa Denpasar memiliki tingkat ketimpangan gender yang lebih kecil, sehingga kesetaraan gender di kota ini relatif lebih baik dan lebih merata.
5. Pada tahun 2024 rata-rata APM (Angka Partisipasi Murni) di Kota Denpasar mencapai angka 97.45 persen, dengan rata-rata target sebesar 89 persen dan realisasi menyentuh angka 86.75 persen.
6. Pada tahun 2024 rata-rata APK (Angka Partisipasi Kasar) di Kota Denpasar mencapai angka 100.50 persen dengan target rata-rata yakni 98.75 persen dan realisasi yakni 99.14 persen.
7. Data mengenai anak putus sekolah secara kuantitatif menunjukkan angka relatif kecil.

8. Data kuantitatif menunjukkan bahwa secara akumulatif kelahiran bayi laki-laki dan perempuan pada tahun 2023 berjumlah 18.180 jiwa mengalami penurunan di tahun berikutnya menjadi 11.419 jiwa atau terjadi penurunan jumlah kelahiran sebesar 37,2 persen. Penurunan kelahiran pada tahun 2024 terbanyak terjadi pada bayi perempuan yang menurun sebesar 38,68 persen dan kelahiran bayi berjenis kelamin laki-laki juga menurun sebesar 35,72 persen.
9. Terjadi penurunan jumlah balita di Kota Denpasar pada tahun 2024 sebesar 34,73 persen. Sejalan dengan angka kelahiran bayi, jumlah balita dengan jenis kelamin laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan. Pada tahun 2023 jumlah balita laki-laki 38.563 balita dan perempuan 37.113 balita. Sedangkan pada tahun 2024 jumlah balita laki-laki 25.605 balita dan perempuan 23.789 balita.
10. Secara keseluruhan kasus ASI Eksklusif di Kota Denpasar mengalami peningkatan dari 1.353 kasus menjadi 1.637 kasus di tahun 2024 atau meningkat sebesar 20.9 persen. Secara keseluruhan kasus ASI Eksklusif di Kota Denpasar mengalami peningkatan dari 1.353 kasus menjadi 1.637 kasus di tahun 2024 atau meningkat sebesar 20.9 persen.

11. Status Gizi di Kota Denpasar tahun 2023 dan 2024, mengarahkan pemahaman bahwa jumlah status gizi baik mengalami peningkatan di seluruh kecamatan. Peningkatan tertinggi berada di Kecamatan Denpasar Barat, di mana pada tahun 2023 terdapat 3.080 kasus gizi baik sedangkan tahun 2024 meningkat sejumlah 1.084 kasus menjadi 4164 kasus. Denpasar Timur mengalami peningkatan nomor dua dengan total 666 kasus. Kemudian Denpasar Selatan mengalami peningkatan status gizi baik sejumlah 583 kasus. Terakhir Denpasar Timur sejumlah 393 kasus.
12. Jika dilihat secara keseluruhan selisih jumlah imunisasi tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan 23.583 dari tahun sebelumnya atau setara 34,7 persen dalam satu tahun. Kecamatan yang mengalami cakupan imunisasi yang paling menurun ada di Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 9.068 selanjutnya Denpasar Barat 5.319 kasus, disusul Denpasar Utara 4.874 dan terakhir penurunan terendah terjadi di Denpasar Timur sebanyak 4.457.
13. Jumlah dokter umum mengalami peningkatan sebesar 25.9 persen. Jumlah dokter laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan satu tahun terakhir ini.
14. Dilihat dari persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran di Kota Denpasar dimana Kesertaan KB

keluarga PBI meningkat sebesar 26,72 persen dari tahun 2023 ke tahun 2024. Peningkatan ini merepresentasikan bahwa kesadaran masyarakat telah meningkat atas pengendalian jumlah anak dan jarak kelahiran anak demi memperhitungkan masa depan keluarga. Penting untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kesadaran masyarakat atas urgensi KB melalui berbagai kegiatan sosialisasi yang kontinyu.

15. Pada kelompok usia produktif yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Menurut jenis kelamin pada kelompok usia produktif mengalami kenaikan yaitu laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,53% sedangkan perempuan mengalami kenaikan 0,38%.
16. Jumlah kelompok umur 0-14 tahun mengalami penurunan sebesar 0,43% yaitu pada tahun 2023 sebanyak 154,93 dan pada tahun 2024 sebesar 154, 27.
17. Pada tahun 2023 jumlah penduduk yang bekerja sebagai karyawan swasta sebanyak 157.797 jiwa lalu meningkat pada tahun 2024 sebanyak 162.443 jiwa.
18. KWT yang berada di Kota Denpasar dipimpin oleh Kecamatan Denpasar Utara yaitu sebanyak 4 KWT sedangkan kecamatan lainnya yaitu Denpasar Timur, Denpasar Selatan dan Denpasar Barat masing-masing memiliki 3 KWT.

- 19.10 dari 15 tenaga penyuluh pertanian berjenis kelamin perempuan sedangkan sisanya yaitu 5 orang merupakan penyuluh pertanian berjenis kelamin laki-laki.
20. Pada tahun 2023 tingkat pengangguran laki-laki sebesar 3,64%, perempuan sebesar 1,84%. Sedangkan pada tahun 2024 laki-laki sebesar 1,94% dan perempuan sebesar 1,62%.
21. Pada tahun 2023 hanya ada 359 orang tenaga kerja asing namun pada tahun 2024 meningkat menjadi 864 orang. Jumlah tenaga kerja asing masih didominasi pada tenaga kerja berjenis kelamin laki-laki namun tenaga kerja asing berjenis kelamin perempuan juga mengalami peningkatan sebesar 56%.
22. Jumlah tenaga kebersihan mengalami kenaikan sebesar 2%. Pada tahun 2023 yang berjumlah 560 orang perempuan dan pada tahun 2024 menjadi 571 orang. Tenaga kebersihan berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dikarenakan pekerjaan ini membutuhkan kekuatan fisik yang lebih besar.
23. Tenaga kerja yang terserap di sektor pariwisata masih didominasi oleh laki-laki sebanyak 4765 orang sedangkan perempuan hanya 2031 orang. Perbedaan yang cukup besar ini disebabkan kebutuhan tenaga fisik dan tanggung jawab yang lebih besar yang berada di sektor pariwisata.

24. Jumlah KK yang terdaftar pada DTKS mengalami penurunan. KK Rumah Tangga (RT) yang terdaftar mengalami penurunan sebesar 9%. Sedangkan Anggota Rumah Tangga (ART) juga mengalami penurunan sebesar 17%. Menurunnya jumlah KK yang terdaftar pada DTKS menandakan hal baik yang berarti menurun juga kebutuhan akan kesejahteraan sosial dan penerima bantuan.
25. Menurut jenis kelamin pada kelompok usia produktif mengalami kenaikan yaitu laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,53% sedangkan perempuan mengalami kenaikan 0,38%. Hal ini menjadikan dampak positif bagi Kota Denpasar dengan adanya potensi bonus demografi.
26. Dilihat dari jumlah perempuan yang bekerja di lembaga pemerintahan, ASN menduduki posisi tertinggi 8.621 orang di tahun 2023 dan 8.528 orang di tahun 2024. Persentase perempuan yang bekerja di lembaga pemerintahan sebesar 4,86% di tahun 2023 meningkat menjadi 5,13% di tahun 2024.
27. Jumlah industri kecil dan menengah banyak dikelola oleh perempuan sebanyak 19.714 perempuan sedangkan laki-laki hanya 13.142 yang mengelola industri kecil dan menengah. Hal ini dapat disebabkan oleh peran ganda yang dimiliki perempuan. Industri kecil dan menengah

dapat dilakukan dengan fleksibel sehingga pelakunya dapat menjalankan usaha dirumah atau lingkungan yang dekat dari rumah sehingga perempuan dapat menjalankan peran gandanya dengan baik.

28. Jumlah ASN mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Hal ini dikarenakan pandangan ASN oleh masyarakat merupakan pekerjaan yang memiliki gaji tetap dan ternama sehingga banyak masyarakat yang berlomba-lomba untuk menjadi ASN.
29. Jumlah ASN yang mengikuti diklat mengalami penurunan yaitu 0,82%. Pada jenis kelamin laki-laki mengalami penurunan sebesar 1,59% dan perempuan mengalami penurunan sebesar 0,48%. Hal ini terjadi dengan alasan sama seperti penurunan jumlah pejabat dalam mengikuti diklat PIM. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa mengatur anggaran dan menentukan prioritas dalam penggunaan anggaran.
30. Jumlah pimpinan parpol masih didominasi oleh laki-laki. Laki-laki dianggap mampu memimpin sebuah partai dikarenakan citra pemimpin akan diikuti oleh citra partai. Hal ini juga dapat disebabkan oleh keterlibatan politik praktis.
31. Jumlah panitia pemilihan kecamatan didominasi oleh laki-laki sebanyak 18 orang dari 20 orang. Panitia berjenis

kelamin perempuan hanya ada di wilayah Denpasar Barat dan Denpasar Timur dengan masing-masing memiliki 1 orang panitia perempuan.

32. Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kota Denpasar terbesar di pangkat PPPK tidak memiliki pangkat. Pada tahun 2023 sebanyak 1008 perempuan atau sebesar 26,86% sedangkan pada tahun 2024 meningkat 14,61% menjadi 1782 atau sebesar 41,47%.
33. Persentase korban kekerasan pada laki-laki mengalami penurunan. Pada tahun 2023 sebanyak 2,3% namun pada tahun 2024 tidak ada korban kekerasan kepada lelaki. Hal ini berbanding terbalik dengan persentase kekerasan kepada perempuan yang meningkat 9%. Pada tahun 2023 yang mulanya 39% meningkat menjadi 48% pada tahun 2024.
34. Jumlah KDRT yang terjadi di Kota Denpasar mengalami peningkatan sebesar 3%.
35. Alat/cara KB yang paling banyak digunakan oleh perempuan yang berstatus nikah usia 15-49 tahun adalah AKDR/IUD/spiral.
36. Jumlah kekerasan anak laki-laki mengalami penurunan sebesar 10% menjadi 23%. Sedangkan anak perempuan mengalami kenaikan sebesar 4% menjadi 29%. Dengan adanya pendampingan oleh dinas P3A, anak korban

kekerasan dapat merasakan aman, terlindungi, pendampingan, dan arahan lebih lanjut untuk hidupnya.

37. Jumlah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak terjadi pada tahun 2023 dan 2024 pada jenis kelamin laki-laki maupun perempuan.
38. Jumlah gepeng berusia 19 tahun keatas sebanyak 230 orang dengan laki-laki berjumlah 210 orang dan perempuan sejumlah 70 orang. Dominannya jumlah laki-laki sebagai gepeng di Kota Denpasar dapat disebabkan oleh peran dan stigma masyarakat terhadap laki-laki sebagai pencari nafkah utama.
39. Jumlah lansia terbanyak berada di wilayah Denpasar Utara sebanyak 137 orang dibandingkan wilayah lainnya. Oleh karena itu pemerintah di sekitar Denpasar Utara perlu adanya peningkatan pemberdayaan lansia agar tetap produktif tak terkecuali hal ini dapat dilakukan oleh wilayah lainnya yang berada di Kota Denpasar.
40. Jumlah lembaga adat perempuan di Kota Denpasar pada tahun 2024 adalah 23 Paiketan dengan jumlah anggota 376 orang. Semakin banyak lembaga adat yang dibentuk oleh atau untuk perempuan (seperti Paiketan Krama Istri) menunjukkan adanya pengakuan resmi bahwa perempuan adat memiliki peran unik dan esensial dalam pemeliharaan nilai, pelestarian budaya, dan kesejahteraan komunitas.

9.2 Saran

Profil Statistik Gender Kota Denpasar memerlukan data yang terupdate untuk masing-masing sektor. Perlu dilakukan pemilahan data di setiap unit/OPD dan instansi pemerintah lainnya secara rutin dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, G. (2022, Mei 21). *Pendidikan Anak Usia Dini Didominasi Perempuan, Mengapa?* Kompasiana https://www.kompasiana.com/gema_akbar/6288e6ef158347161428bdd2/pendidikan-anak-usia-dini-didominasi-perempuan-mengapa
- Antara News. (2022, Desember 19). KPU Denpasar: Tidak ada PPK perempuan di Denpasar Selatan. Diakses dari: <https://www.antaranews.com/berita/3332706/kpu-denpasar-tidak-ada-ppk-perempuan-di-denpasar-selatan>
- Arivia, G. (2006). *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Kompas.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Keadaan Ketenagakerjaan di Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Profil Perempuan Indonesia*. BPS.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024). *Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen), 2022-2024*. Diakses dari: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY0Izl%3D/keterlibatan-perempuan-di-parlemen>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2024). *Komposisi Anggota DPRD Provinsi Bali Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin, 2024*. Diakses dari: <https://bali.bps.go.id/id/statisticstable/1/MTA2IzE%3D/komposisi-anggota-dprd-provinsi-bali-menurut-partai-politik-dan-jenis-kelamin--2024.html>
- Bakker, L. (2015). "Gender and Customary Authority in Indonesia: A Literature Review." *The Asia Foundation Working Paper Series*.

- Berlian, N. (2011). Faktor Faktor yang Terkait dengan Rendahnya Pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 17(1), 43-45.
- Bhasin, Kamla. (2003). *Understanding Gender*. New Delhi: Women Unlimited.
- Blau, F. D., & Kahn, L. M. (2017). *The Gender Wage Gap: Extent, Trends, and Explanations*. *Journal of Economic Literature*, 55(3), 789–865
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2021). *Statistik Gender Indonesia 2021*. Jakarta: BPS
- Bredenkamp, S., & Copple, C. (Eds.). (1997). *Developmentally Appropriate Practice in Early Childhood Programs* (Rev. Ed.). Washington, DC: National Association for the Education of Young Children.
- Butler, J. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Routledge.
- Connell, R. W. (2009). *Gender: In World Perspective*. Polity Press.
- Dalyono (2010). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- DetikBali. (2024, Maret 13). Daftar 45 Anggota DPRD Kota Denpasar Terpilih 2024-2029, PDIP Kuasai 22 Kursi. Diakses dari: <https://www.detik.com/bali/berita/d-7239972/daftar-45-anggota-dprd-kota-denpasar-terpilih-2024-2029-pdip-kuasai-22-kursi>
- Dinas Kesehatan Kota Semarang. (2024). Pentingnya kenali risiko stunting. <https://dinkes.semarangkota.go.id/content/post/295>
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar. (2022). *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Jabatan Publik di Kota Denpasar*. Denpasar: DP3AP2KB. Tersedia di: https://www.kb.denpasarkota.go.id/public/uploads/download/download_242810021019_partisipasi-perempuan-dalam-politik-dan-jabatan-publik-di-kota-denpasar-2022.pdf

- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar. (2024). Profil Statistik Gender Kota Denpasar Tahun 2024. Denpasar: DP3AP2KB. Tersedia di: https://www.kb.denpasarkota.go.id/public/uploads/download/download_242210091042_statistik-gender-kota-denpasar-tahun-2024.pdf
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar. (2021). Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Denpasar. Denpasar: DPUPR Kota Denpasar.
- Fakih, Mansour. (2008). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farah, M., & Prasetyo, A. (2014). Faktor Penyebab Putus Sekolah dan Dampak
- Febriyeni, C. (2023). *Stunting* (1st ed.). PUSTAKA AKSARA <http://elibrary.almaata.ac.id/4326/1/Ebook%20Stunting.pdf>
- IMUNISASI (2nd ed.). (2015).
- Goldin, C. (2006). *The Quiet Revolution: The Women's Labor Force Participation in the Twentieth Century*. American Economic Review, 96(2), 1–21.
- Gusweni, M., Agustina, & Taufik. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Layanan Ruang Menyusui Di Kota Banda Aceh. Jurnal Transformasi Administrasi, 10(1), 34–53. <https://doi.org/10.56196/jta.v10i1.151>
- International Labour Organization (ILO). (2022). *World Employment and Social Outlook: Trends for Women 2022*. International Labour Organization
- International Labour Organization (ILO). (2023). Women in the Labour Market: Trends and Challenges. ILO.
- Juliani, W. I., & Widodo, H. (2019, November 30). Integrasi Empat Pilar Pendidikan (UNESCO) Melalui Pendidikan Holistik Berbasis Karakter di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 65–74. <https://doi.org/10.22236/jpi.v10i2.3678>

- Kabeer, Naila. (2005). *Gender Equality and Women's Empowerment: A Critical Analysis of the Third Millennium Development Goal*. London: Routledge.
- Kartini, A., Suhartono, & Subagio, H. W. (2016). Kejadian Stunting dan Kematangan Usia Tulang Pada Anak Usia Sekolah Dasar di Daerah Pertanian Kabupaten Brebes. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(2).
- Karwati & Priansa. (2014). *Manajemen Kelas*. Bandung: Alfabeta
- Kementerian Kesehatan RI. (2014). *Buku Ajar Imunisasi*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Kesetaraan Gender*. Kementerian PPPA RI.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). Perempuan Miliki Hak dan Peran yang Sama. Diakses dari: <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12167/perempuan-miliki-hak-dan-peran-yang-sama>
- Majelis Desa Adat Kota Denpasar. (2024). Paiketan Krama Istri Majelis Desa Adat Lakukan Kolaborasi dengan LBH APIK Bali. RRI. <https://rri.co.id/daerah/1504524/paiketan-krama-istri-majelis-desa-adat-lakukan-kolaborasi-dengan-lbh-apik-bali>
- Majelis Desa Adat Kota Denpasar. (2023). Pesangkepan Diperluas: Tajamkan Penguatan Lembaga Adat dalam Mendukung Pembangunan. CyberTokoh. <https://www.cybertokoh.com/news/105413227880/tajamkan-penguatan-lembaga-adat-dalam-mendukung-pembangunan-mda-kota-denpasar-lakukan-pesangkepan-diperluas>
- McKinsey Global Institute. (2022). *The Future of Work and Gender Equality*. McKinsey & Company.
- Negatifnya Bagi Anak (Studi Kasus di Desa Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

- NusaBali.com. (2023, November 8). Total Kuota Perempuan di DCT Bali 37,18 Persen. Diakses dari: <https://www.nusabali.com/berita/154395/total-kuota-perempuan-di-dct-bali-3718-persen>
- NusaBali.com. (2024, Maret 8). 4 Srikandi Melenggang ke DPRD Denpasar. Diakses dari: <https://www.nusabali.com/berita/162830/4-srikandi-melenggang-ke-dprd-denpasar>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2022). *Gender Equality in the Digital Economy*. OECD Publishing.
- Rasnino, C. A., Nuryadin, D., & Suharsih, S. (2022). Pengaruh Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah dan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, 2014-2019. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(3), 191-200
- Sabrina, O., dkk. (2023). *Evidence Based: Kupas Tuntas ASI dan Menyusui*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Saraswati, N., & Ayu, R. S. (2021). Sexist Language Showing Gender Stereotypes as Depicted In Efl Textbooks. *UC Journal: ELT, Linguistics and Literature Journal*, 2(2), 119-132
- Schwab, K. (2018). *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum.
- Sultana, A. (2011). *Patriarchy and Women's Subordination: A Theoretical Analysis*. Dhaka: ASA University Review.
- Suryani, L. K. (2003). *Perempuan Bali: Dulu, Kini, dan Esok*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- UN Women. (2019). *Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot*. New York: United Nations.
- UN Women. (2020). *Gender Equality: Women's Rights in Review 25 Years after Beijing*. New York: United Nations.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2020). *Human Development Report 2020: The Next Frontier – Human Development and the Anthropocene*. United Nations.

- United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *Gender Development Index and Gender Inequality Index*. UNDP.
- United Nations Statistics Division. (2020). *The World's Women 2020: Trends and Statistics*. New York: United Nations.
- United Nations. (2023). *Sustainable Development Goals Report*. United Nations Publications.
- UN Women. (2020). *Gender Equality and Women's Empowerment in Local Governance*.
<https://www.unwomen.org>
- Warta Bali Online. (2024, Maret 7). Kuota Perempuan 30 Persen DPRD Bali Belum Terpenuhi. Diakses dari:
<https://wartabalionline.com/2024/03/07/kuota-perempuan-30-persen-dprd-bali-belum-terpenuhi/>
- World Bank. (2021). *Women, Business, and the Law 2021*. The World Bank Group.
- World Bank. (2022). *Women, Business, and the Law*. World Bank Group.
- World Economic Forum. (2021). *Global Gender Gap Report 2021*. Geneva: WEF.
- World Economic Forum. (2023). *Global Gender Gap Report*. World Economic Forum.

Profil Statistik GENDER Kota Denpasar Tahun 2025

